



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**



GOVERNOR OF BANTEN

INTRODUCTION



Puji and syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat and karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan and Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah and Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan and Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan dimaksud, LKPJ disampaikan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Banten.

LKPJ Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 ini memuat informasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan tahun pertama pelaksanaan kinerja berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022. Selain itu, dalam laporan ini juga disampaikan informasi berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Banten.

Kami ucapkan terima kasih and apresiasi atas dukungan dari semua pihak atas terselesaikannya penyusunan LKPJ Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 ini, semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten pada masa yang akan datang.

Serang, 22 Maret 2024

PJ. GOVERNOR OF BANTEN

AL MUKTABAR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-2
1.3 VISI DAN MISI	I-4
1.4 DATA UMUM DAERAH	I-5
1.4.1 Data Geografis Wilayah	I-5
1.4.2 Jumlah Penduduk	I-10
1.4.3 Pertumbuhan Penduduk	I-12
1.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)	I-13
1.4.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-16
1.4.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-17
1.4.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I-17
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023	II-1
2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	II-2
2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah	II-2
2.1.2 Strategi Pendapatan Daerah	II-4
2.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	II-6
2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	II-7
2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah	II-7
2.2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	II-12
2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II-14
2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-14
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah	II-14
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III-1
3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI BANTEN TAHUN 2023	III-1
3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	III-2
3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-4
3.1.3 Persentase Penduduk Miskin	III-6
3.1.4 Tingkat Pengangguran	III-7
3.1.5 Indeks Gini	III-9
3.1.6 Inflasi	III-10
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023	III-11

3.3	CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023	III-26
3.3.1	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	III-31
3.3.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-135
3.3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	III-276
3.3.4	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan...	III-384
3.3.5	Pelaksanaan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan..	III-420
3.3.6	Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.	III-494
3.3.7	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum.....	III-499
3.4	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023	III-508
3.5	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI BANTEN ATAS LKPJ GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022	III-516
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-1
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN	IV-1
4.1.1	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya.....	IV-1
4.1.2	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran	IV-2
4.1.3	Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Pembantuan ..	IV-2
4.2	HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	IV-3
BAB V	PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berkenaan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan strategis lainnya.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penyusunan LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2022. Pada tahun ini, Fase Pelaksanaan RPD Provinsi

Banten Tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama, yang secara kebijakan telah dilaksanakan melalui:

1. Penetapan RKPD Tahun 2023 dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian atas hasil pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas antara Gubernur dengan DPRD sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah dan juga seluruh masyarakat Provinsi Banten.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 8);

1.3. VISI DAN MISI

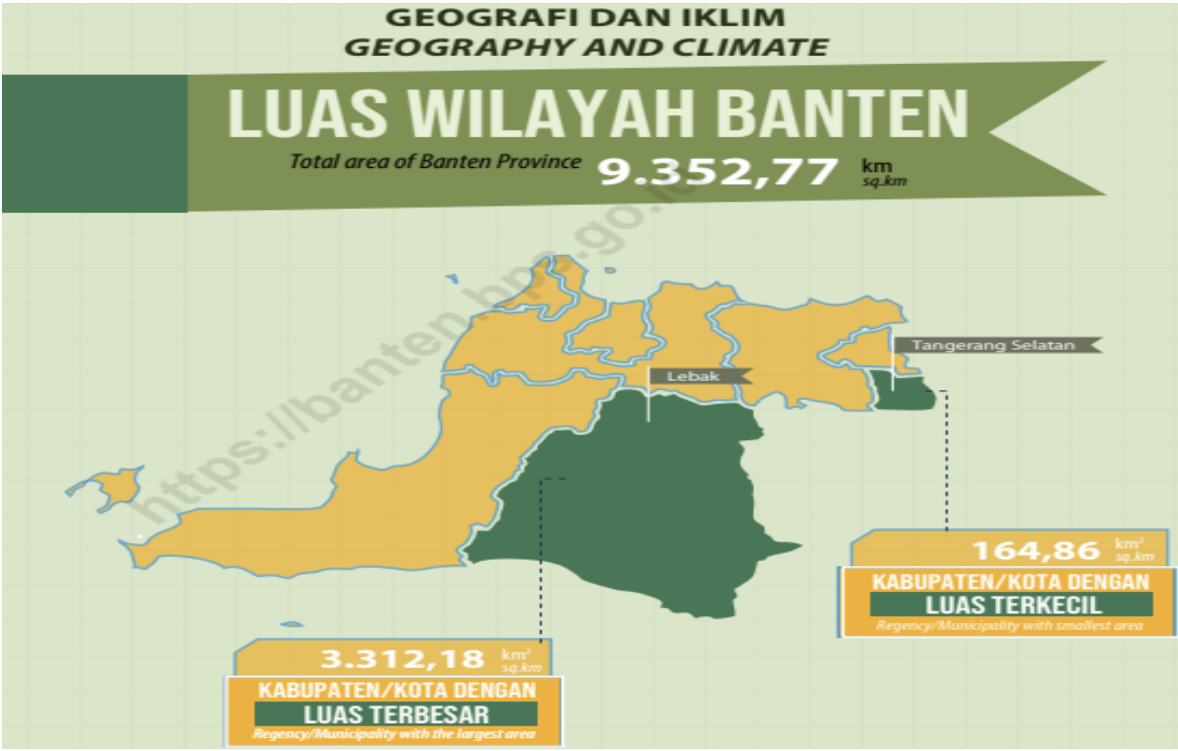
Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan Visi yang juga terdapat dalam RPJPD 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

1.4. DATA UMUM DAERAH

1.4.1. Data Geografis Wilayah

Dari sisi astronomis, wilayah Provinsi Banten berada pada batas 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa (berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Negara, DKI Jakarta) sehingga menambah posisi geostrategis Provinsi Banten sebagai pintu gerbang jalur perdagangan Pulau Jawa dan Sumatera. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan bagian timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.1
Peta Wilayah Provinsi Banten
Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Banten Dalam Angka 2023

Provinsi Banten memiliki luas 9.352,77km² atau sekitar 0,51 persen dari luas daratan Indonesia. Berarti, Banten adalah provinsi dengan luas wilayah terkecil kelima di Indonesia setelah Kepulauan Riau (0,43%), Bali (0,30%), DI Yogyakarta (0,16%) dan DKI Jakarta (0,03%). Provinsi Banten secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 257,93 meter di atas permukaan laut (mdpl), serta memiliki beberapa gunung dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota dengan rincian luas daratan masing-masing kabupaten/kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang 2.771,414 km², Kabupaten Lebak 3.312,180 km², Kabupaten Tangerang 1.027,757 km², Kabupaten Serang 1.469,908 km², Kota Tangerang 178,347

km2, Kota Cilegon 162,514 km2, Kota Serang 265,787 km2, dan Kota Tangerang Selatan 164,860 km2. Rincian secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (kilo meter persegi)	Persen
1	Kabupaten Pandeglang	2.771,414	29,63
2	Kabupaten Lebak	3.312,180	35,41
3	Kabupaten Tangerang	1.027,757	10,99
4	Kabupaten Serang	1.469,908	15,72
5	Kota Tangerang	178,347	1,91
6	Kota Cilegon	162,514	1,74
7	Kota Serang	265,787	2,84
8	Kota Tangerang Selatan	164,860	1,76
	PROVINSI BANTEN	9.352,767	100,00

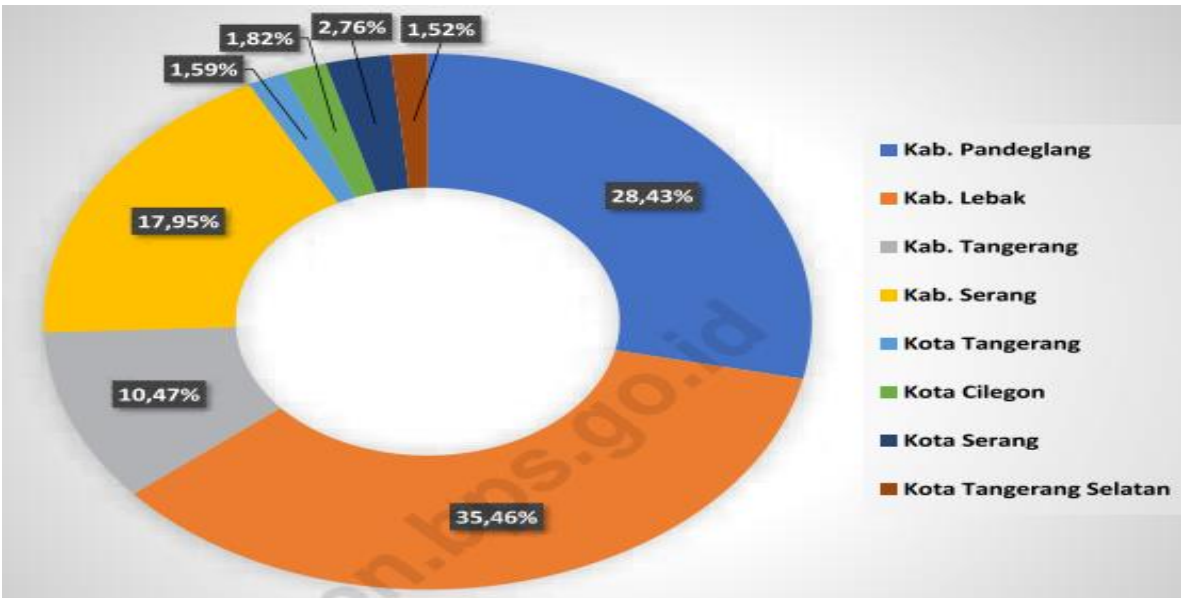
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Rincian luas wilayah, jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Pusat Pemerintahan	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kabupaten					
Pandeglang	22.771,414	Pandeglang	35	326	13
Lebak	3.3102,180	Rangkasbitung	28	340	5
Tangerang	1.027,757	Tigaraksa	29	246	28
Serang	1.469,908	Ciruas Kota	29	326	-
Kota					
Tangerang	178,347	Tangerang	13	-	104
Cilegon	162,514	Purwakarta	8	-	43
Serang	265,787	Serang	6	-	66
Tangerang Selatan	164,860	Pamulang	7	-	54
Provinsi Banten	9.352,77	Kota Serang	155	1.238	313

Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di Provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak dengan persentase luas wilayah sebesar 35,46% dari luas Provinsi Banten. Sedangkan Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,52%. Gambar berikut ini menyajikan proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Gambar 1.2
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Untuk kondisi topografi, wilayah Provinsi Banten bervariasi dari dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) hingga perbukitan terjal, dengan ketinggian berkisar antara 0 mdpl sampai 1.000 mdpl. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Provinsi Banten dikelompokkan dalam kelas ketinggian sebagai berikut:

- Ketinggian 0 – 200 mdpl (dataran rendah), meliputi daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang.
- Ketinggian 201 – 2.000 mdpl; meliputi daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang
- Ketinggian 501 – 2.000 mdpl; meliputi daerah Lebak Timur yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Sedangkan berdasarkan morfologinya, dataran rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 mdpl sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 mdpl. Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah – Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 mdpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 mdpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi. Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

- Dataran (kemiringan 0 – 15%); sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten, yang tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak.
- Perbukitan landai-sedang (kemiringan < 15% dengan tekstur bergelombang rendah-sedang); sebagian besar terdapat di bagian utara yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang.
- Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25%); terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

Untuk klimatologi Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Muson dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (November - Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan pada bulan Agustus cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang cukup ekstrim terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino.

Berdasarkan pengamatan sepanjang tahun 2021, unsur iklim yang tercatat di empat Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Provinsi Banten tercatat memiliki:

- Suhu udara minimum 21,10°C dan maksimum adalah 35,40°C
- Kelembaban udara minimum 40,00% dan kelembaban udara maksimum adalah 100,00%.
- Angin rata-rata adalah 2,70 meter /detik dan maksimum 14,00 meter/detik.
- tekanan udara rata-rata adalah 1.006,50 mb.
- Curah hujan rata-rata tercatat 2.977,8 mm dengan jumlah hari hujan 211 hari.

Struktur geologi Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter dimana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 meter. Formasi dengan satuan tertua ialah formasi Bojongmanik yang diperkirakan berusia Miosen akhir, dengan batuan yang terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasiran, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, yang dimana umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya ditemukan Formasi Cipacar yang terdiri dari *tuff* batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, yang dimana umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini ialah

Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasir, lempung pasir, batu gamping kokina dan tuff.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan aluvium yang diperkirakan berumur mulai Miosen awal hingga Resen. Adapun satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen dan terdiri dari tiga anggota yakni konglomerat, batu lempung dan batu gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicarurup, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api, dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesit hingga basal. Tuff Cikasungka diperkirakan berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuartar. Pada peta lembar Leuwidamar tersaji singkapan batuan metamorf yang diperkirakan berumur Oligo Miosen dan terdiri dari Sekis, Gneis dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Diorit Kuarsa diperkirakan berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit diperkirakan berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuartar. Batuan endapan termuda ialah aluvium serta endapan pantai yang dapat berupa kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Secara hidrologi di wilayah Provinsi Banten terdapat menjadi enam Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

- DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Teluklada, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Selain itu, di wilayah Provinsi Banten terdapat 5 satuan Cekungan Air Tanah (CAT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, antara lain CAT Labuan, CABT Rawadano dan CAT Malingping dan lintas provinsi yang meliputi CAT Serang – Tangerang dan CAT Jakarta. Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air, tetapi juga memiliki potensi bahaya likuefaksi. Terjadinya likuefaksi tergantung pada kedalaman air

tanah dan porositas litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya likuefaksi pada daerah cekungan air tanah yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litologi berupa material lepas (*porous*).

1.4.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Jumlah Penduduk Banten sampai dengan Semester I Tahun 2023 tercatat 12.381.098 jiwa terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sejumlah 129.113 jiwa, terinci pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Tahun 2018 – 2023 Provinsi Banten

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk	10.722.374	10.906.472	11.042.523	12.061.475	12.251.985	12.381.098

Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2023

Selanjutnya sebaran penduduk berdasarkan Kabupaten/Kota, secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut:

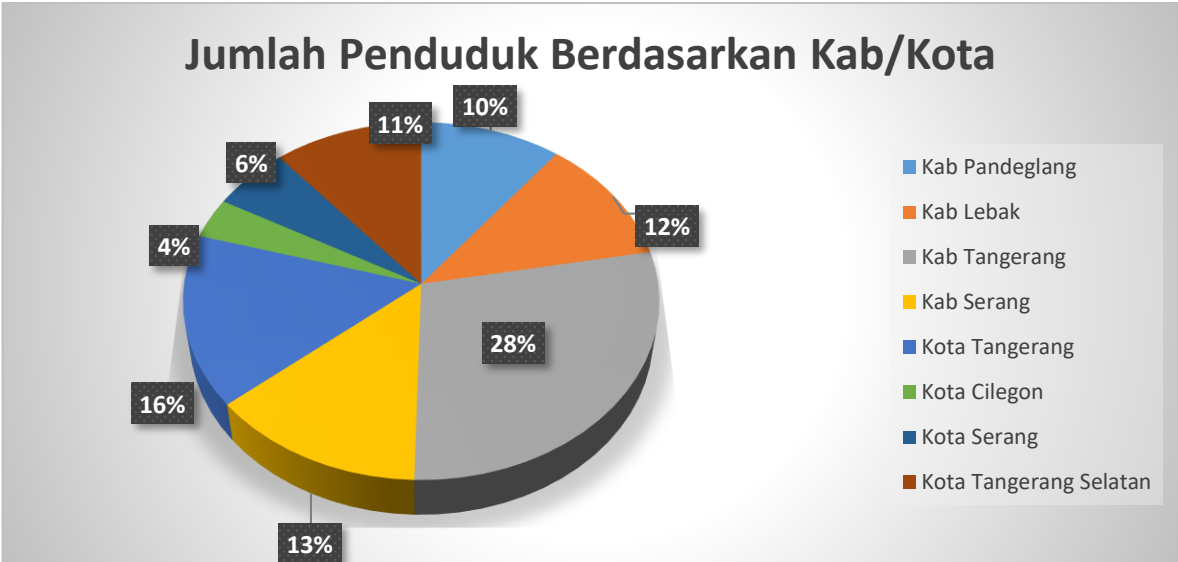
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Tahun 2021 - 2023 Provinsi Banten

KABUPATEN/ KOTA	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			TOTAL		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	661.083	670.356	714.400	627.231	636.734	677.646	1.288.314	1.307.090	1.392.046
Kab Lebak	724.513	737.495	762.128	683.344	696.358	722.457	1.407.857	1.433.853	1.484.585
Kab Tangerang	1.684.328	1.713.548	1.672.223	1.609.205	1.638.924	1.614.197	3.293.533	3.352.472	3.286.420
Kab Serang	842.499	857.951	875.574	805.291	820.964	842.928	1.647.790	1.678.915	1.718.502
Kota Tangerang	966.808	975.709	955.333	945.106	954.847	944.181	1.911.914	1.930.556	1.899.514
Kota Cilegon	224.257	228.454	234.937	217.504	221.817	229.779	441.761	450.271	464.716
Kota Serang	360.182	368.031	371.981	344.436	352.331	358.549	704.618	720.362	730.530
Kota Tangerang Selatan	683.474	689.497	700.754	682.214	688.969	704.031	1.365.688	1.378.466	1.404.785
Provinsi Banten	6.147.144	6.241.041	6.287.330	5.914.331	6.010.944	6.093.768	12.061.475	12.251.985	12.381.098

Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2023

Menurut data tahun 2023, Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang tersebar pada 8 (delapan) kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten/Kota sebagai berikut: Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.484.585 jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.392.046 jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.718.502 jiwa; jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.286.420 jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang

berjumlah 1.899.514 jiwa; jumlah penduduk Kota Cilegon berjumlah 464.716 jiwa; jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 730.530 jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.404.785 jiwa.



Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

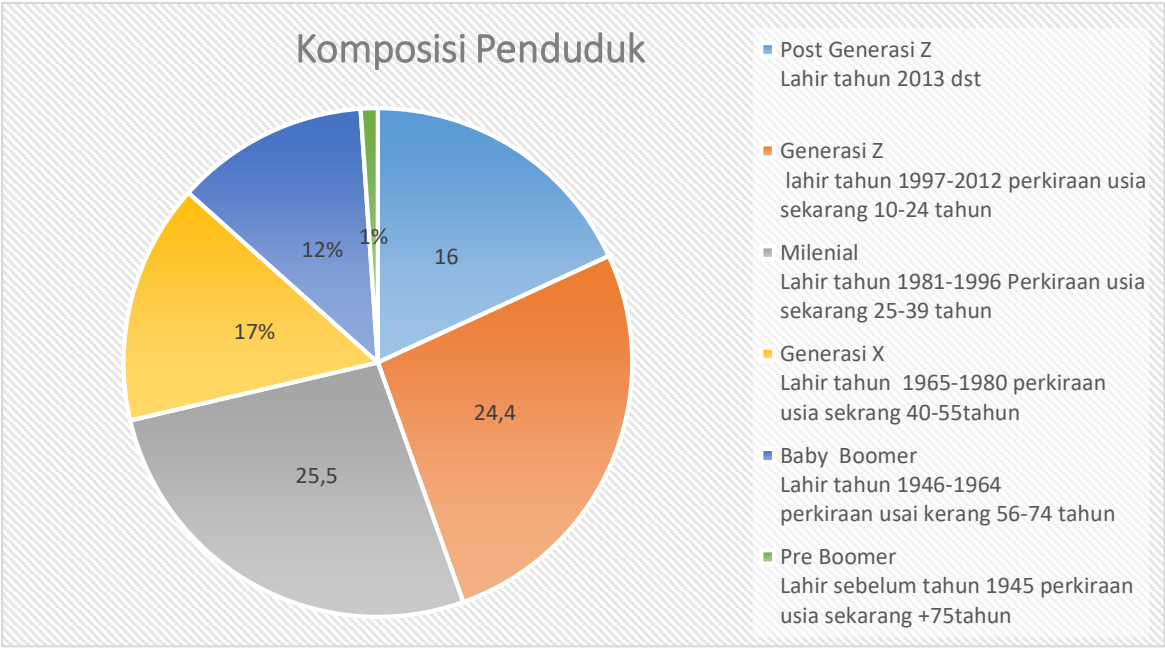
Gambar. 1.3
Sebaran Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota tahun 2023

Komposisi penduduk Tahun 2023 menunjukkan mayoritas penduduk Banten didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebesar 24,4% atau (3.023.535 juta jiwa) dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 25,25 % (3.126.396 juta jiwa) dari total populasi. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut:

Tabel 1.5
Sebaran Penduduk Berdasarkan Generasi di Provinsi Banten Tahun 2022

Daerah	Post generasi Z	Gen-Z	Milenial	Generasi X	baby boomer	Pre boomer
Kabupaten Pandeglang	227.704	348.846	338.512	234.313	110.194	28.464
Kabupaten Lebak	251.294	366.302	372.956	247.082	108.215	25.063
Kabupaten Tangerang	525.863	798.598	855.390	601.473	195.612	33.453
Kabupaten Serang	292.058	420.886	448.456	288.247	114.441	23.837
Kota Tangerang	294.542	452.719	463.895	360.199	139.776	20.816
Kota Cilegon	82.103	113.989	117.227	81.060	29.646	4.526
Kota Serang	127.021	186.109	191.369	121.817	42.146	6.655
Kota Tangerang Selatan	197.945	336.086	338.591	278.755	116.517	18.887
Provinsi Banten	1.998.530	3.023.535	3.126.396	2.212.946	856.547	161.701

Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

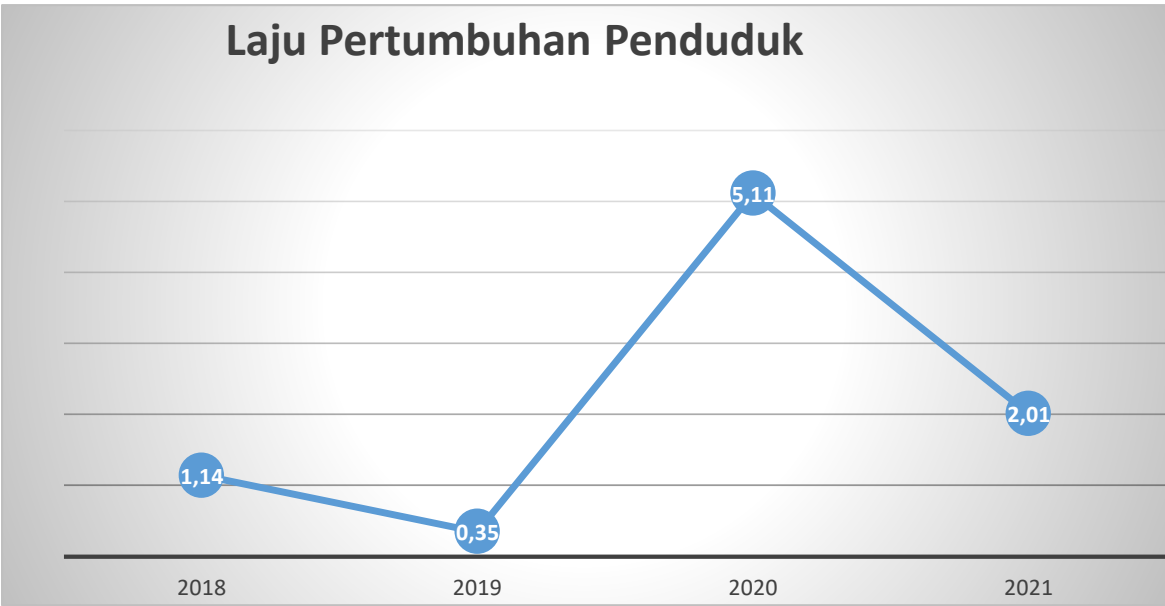


Sumber: Dinas P3AKKB Provinsi Banten

Gambar 1.4
Komposisi Penduduk menurut Generasi Tahun 2023

1.4.3. Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan review Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan Provinsi Banten yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mulai Tahun 2018 sampai dengan 2021 ada pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.5
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2018-2021

Pada gambar 1.5 dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan penduduk 1,14% artinya pada tahun 2018 setiap 100 (seratus) penduduk Banten akan bertambah 1,14 jiwa dari kelahiran dan migrasi penduduk dari luar Banten. Kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk 0,35% dan di 2020 terjadi kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,11% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 2,01%.

Penambahan jumlah penduduk ini akan ditandai dengan adanya bonus demografi tentu dapat menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bonus demografi yang dimiliki dapat ditunjang dengan kenaikan cakupan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di Provinsi Banten (pendidikan dapat diakses secara merata dengan kualitas yang mumpuni) serta peningkatan kesempatan bekerja dengan membuka lowongan pekerjaan di Provinsi Banten.

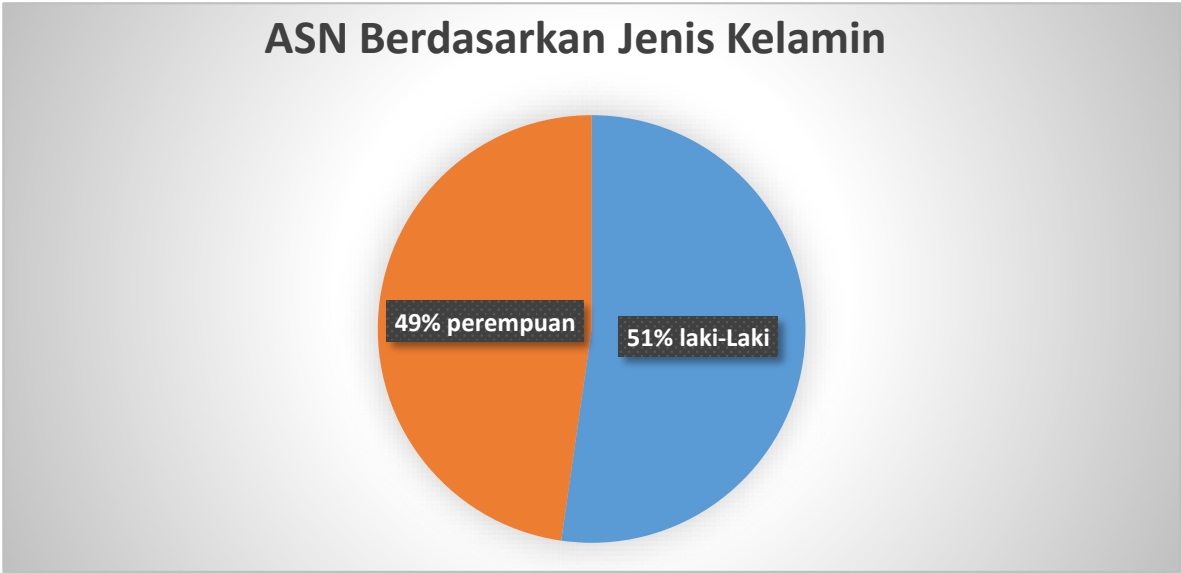
Selain pertumbuhan penduduk, penggambaran kenaikan jumlah penduduk bisa dengan angka *Total Fertility Rate* (TFR) didefinisikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Berikut gambaran TFR Provinsi Banten dan Kab/Kota. TFR Provinsi Banten tahun 2023 berdasarkan data dari siperindu BKKBN sebesar 2,1. TFR paling besar ada di Kabupaten Pandeglang dengan nilai 2,28 dan TFR paling kecil ada di Kota Tangerang Selatan dengan nilai 1,71. TFR ini merupakan suatu ukuran bagi pemerintah untuk melihat jumlah kelahiran total.

1.4.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Banten. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 **sebanyak 10.548 orang**. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci PNS Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan dan tingkat pendidikan.

1.4.4.1. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Pada tahun 2023, jumlah ASN di lingkup Provinsi Banten sebesar 10.548, dengan rincian sebanyak 5.426 orang atau 51 persen berjenis kelamin Laki-laki dan 5.122 ASN atau 49 persen berjenis kelamin perempuan.

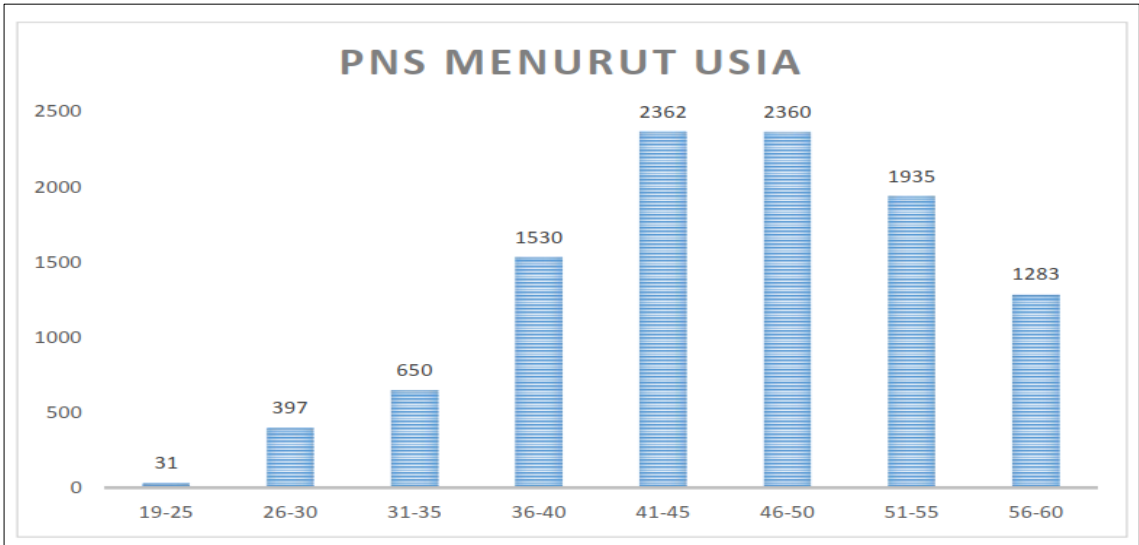


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, diolah

Gambar 1.6
PNS Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Kelamin

1.4.4.2. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Usia

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang berjumlah 10.548 orang terdistribusi di 33 Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dari total PNS tersebut, kelompok usia 41-45 tahun masih mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia dengan jumlah 2.362 orang, sedangkan usia 51-55 tahun sebanyak 1.935 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok pegawai tersebut akan pensiun dalam kurun waktu 3-7 tahun mendatang. Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus sudah siap dengan upaya perekrutan pegawai baru, baik itu yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelamar umum maupun melalui perpindahan guna memenuhi kebutuhan organisasi. Secara rinci data PNS Banten berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, diolah

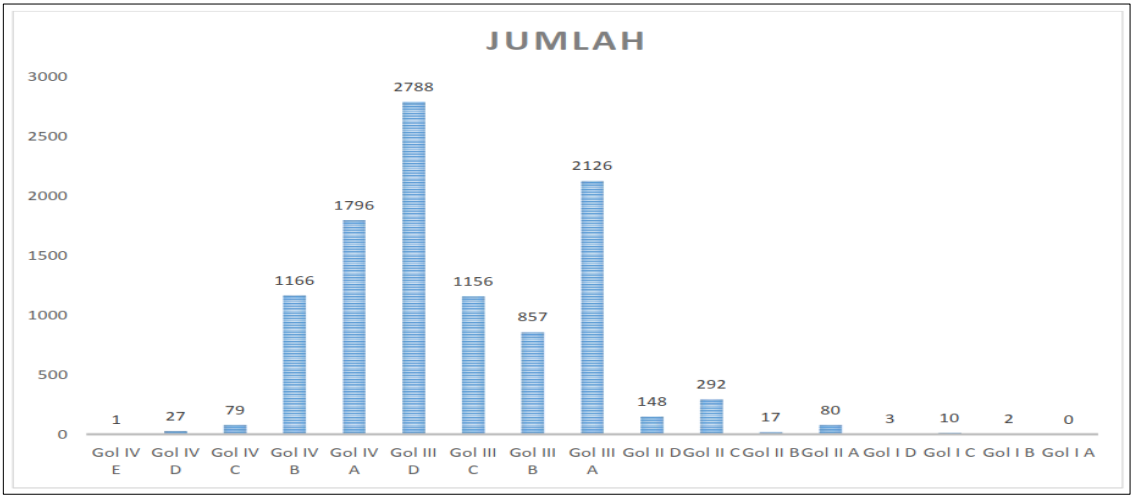
Gambar 1.7
PNS Provinsi Banten Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 1.7 PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten didominasi usia 40 tahun ke atas dengan jumlah sebanyak 7.940 pegawai. Adapun jumlah PNS berusia 19-40 tahun sebanyak 2.608 pegawai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan usia PNS yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kompetensi PNS di setiap kelompok usia PNS. PNS diharapkan dapat memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif.

1.4.4.3. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang

Distribusi pegawai antar golongan secara proporsional dapat menunjang peningkatan profesionalisme PNS. Gambar 1.8 menunjukkan komposisi PNS Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan golongan ruang.

Berdasarkan Gambar 1.8, diketahui bahwa komposisi PNS Provinsi Banten sebagian besar merupakan pegawai golongan III dengan jumlah 6.927 PNS atau 65%, diikuti dengan golongan IV dengan jumlah 3.068 PNS atau 30%, dan golongan II sebanyak 537 PNS atau 5% dan golongan I berjumlah 15 orang 0,3%.

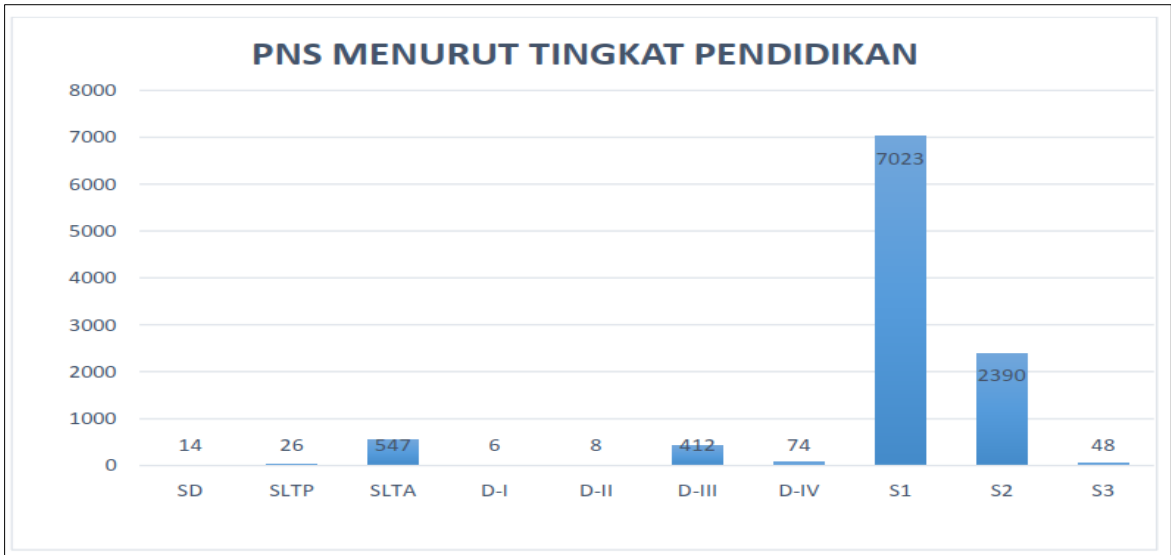


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, diolah

Gambar 1.8
PNS Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang

1.4.4.4. PNS Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan

Secara umum kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir. Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten menurut tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagaimana gambar berikut:



Sumber: diolah BKD Provinsi Banten Tahun 2023

Gambar 1.9
PNS Provinsi Banten Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1.9 sebagian besar tingkat pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten berpendidikan Sarjana (S1) dan hal ini terus mengalami kenaikan dimana di tahun 2023 tercatat sebanyak 7023 ASN berpendidikan S1. ASN berpendidikan Magister/Pascasarjana (S2) sebanyak 2.390 orang. Dapat diketahui bahwa sebanyak 48 orang ASN telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Doktoral (S3) bertambah 12 orang ASN yang menyelesaikan pendidikan S3 nya di tahun 2023 ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

1.4.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Banten terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Adapun realisasi pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.877.574.336.460	8.514.348.394.263	95,91
4.1.01	Pajak Daerah	8.359.205.993.432	8.078.043.383.983	96,64
4.1.02	Retribusi Daerah	16.724.030.580	16.653.438.790	99,58
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.755.038.425	61.808.501.616	101,73
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	440.889.274.023	357.843.069.874	81,16
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.179.171.343.795	3.056.402.268.431	96,14
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.133.893.146.795	3.011.124.071.431	96,08

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	45.278.197.000	45.278.197.000	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.794.200.000	5.794.200.000	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.794.200.000	5.794.200.000	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	12.062.539.880.255	11.576.544.862.694	95,97

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

1.4.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Adapun realisasi belanja daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	7.170.176.329.180	6.752.937.563.482	94,18
5.1.01	Belanja Pegawai	2.370.801.373.384	2.217.441.741.764	93,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.910.990.067.344	3.656.800.229.388	93,50
5.1.03	Belanja Bunga	1.285.894.000	1.285.893.134	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	858.210.720.452	849.755.538.209	99,01
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.888.274.000	27.654.160.987	95,73
5.2	BELANJA MODAL	1.605.193.753.768	1.523.915.187.149	94,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	83.144.449.299	71.692.519.600	86,23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	468.609.753.394	454.691.367.999	97,03
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533.980.771.647	505.018.421.700	94,58
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.512.167.519	458.302.420.280	94,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.663.106.109	33.963.000.670	100,89
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	283.505.800	247.456.900	87,28
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.042.715.378	350.725.160	0,58
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	60.042.715.378	350.725.160	0,58
5.4	BELANJA TRANSFER	3.546.029.899.925	3.542.637.636.925	99,90
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.346.749.899.925	3.346.749.899.925	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199.280.000.000	191.104.793.029	95,90
	JUMLAH BELANJA DAERAH	12.381.442.698.251	11.815.058.168.746	95,43

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

1.4.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan

pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan Daerah terdiri atas 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Adapun realisasi pembiayaan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	718.942.028.785	712.959.498.985	99,17
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	468.942.028.785	462.959.498.985	98,72
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	250.000.000.000	250.000.000.000	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.039.210.789	388.497.733.036	97,11
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	250.000.000.000	250.000.000.000	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	150.039.210.789	138.497.733.036	92,31
	PEMBIAYAAN NETTO	318.902.817.996	324.461.765.949	101,74

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin sinkronisasi dan sinergitas arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas bidang pembangunan nasional antara pembangunan nasional telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, yang di dalamnya telah memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan, isu strategis, prioritas, dan arah kebijakan serta kerangka pendanaan yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (APBD TA 2023).

Selanjutnya untuk melaksanakan RKPD, secara operasional disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tahap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan. Selanjutnya pelaksanaan APBD merupakan manivestasi kolaborasi kinerja unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yaitu antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka mengakomodasi permasalahan pembangunan yang dinamis dan pelaksanaan pembangunan yang adaatif dilakukan Perubahan APBD agar dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan. Perubahan APBD TA 2023, didasarkan pada kriteria yang memenuhi kriteria untuk dilakukannya Perubahan APBD TA 2023, beberapa hal penting yang menjadi latar belakang perubahan APBD, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun berjalan dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, serta faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Adanya kegiatan lanjutan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.
4. Keadaan darurat yaitu keadaan luar biasa, yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan APBD TA 2023, antara lain sebagai berikut:

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penetapan Target Pendapatan Daerah mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan asumsi-asumsi penting lainnya.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pendapatan Daerah secara signifikan berasal dari Pajak Daerah berupa pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat mandatory dalam pengalokasiannya seperti:

- a. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang di bagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- c. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- d. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- e. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- f. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- g. Pemanfaatan dari Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan jenis retribusi yang bersangkutan.
2. Dana Perimbangan/Transfer
Pendapatan dana perimbangan/transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Penetapan target Dana Transfer berpedoman pada Peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana transfer dan/atau berdasarkan informasi yang diterbitkan melalui website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada setiap tahunnya.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengoptimalkan hibah dari Pihak Ketiga, yang dalam hal ini yaitu PT Jasa Raharja.

2.1.2 Strategi Pendapatan Daerah

Untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dinamis dan cenderung meningkat, maka penggalan potensi pendapatan daerah harus senantiasa dilakukan. Untuk meningkatkan pendapatan Daerah, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Pajak Pendapatan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Seluruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda telah ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.
 - c. Kerjasama dengan instansi terkait, seperti dengan melakukan penagihan PKB bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kendaraan bermotor milik perusahaan di wilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK);
 - d. Penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, operasionalisasi penagihan pajak daerah, dan mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada *event* tertentu di kabupaten/kota.

2. Peningkatan Pendapatan Pajak Air Permukaan, melalui:
 - a. Penetapan potensi baru Wajib Pajak Air Permukaan;
 - b. Koordinasi dan sinergitas dengan instansi teknis terkait serta para Wajib Pajak Air Permukaan;
 - c. Kepercayaan masyarakat dalam mengolah dan pengusahaan Air Permukaan memiliki harapan yang cukup baik untuk kegiatan usaha;
3. Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, melalui:
 - a. Pengembangan aplikasi pelaporan PBBKB untuk mempermudah Wajib Pungut PBBKB dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai tahapan dalam penyetoran dan pelaporan PBBKB;
 - b. Pendataan Wajib Pungut Baru yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar kendaraan bermotor namun belum terdaftar sebagai wajib pungut di Wilayah Provinsi Banten;
 - c. Rencana pemberlakuan tarif tunggal sebesar 5% mulai tahun 2022 untuk semua sektor pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Banten.
4. Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah, melalui:
 - a. Fasilitasi OPD Penghasil dalam rangka penyesuaian tarif Retribusi yang sudah ada, yaitu membuat Peraturan Gubernur Banten tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
 - b. Penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;
 - c. Retribusi Pemakaian Bahu Jalan, melakukan survey teknis lapangan, penertiban administrasi melalui surat himbauan/teguran dan tindakan penerbitan dilakukan secara bersama dengan Satpol PP Provinsi Banten dan seluruh pihak terkait;
 - d. Optimalisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seperti Retribusi Alat Berat, dengan meningkatkan potensi alat berat di wilayah Provinsi Banten yang dalam tahap pembangunan infrastruktur sekaligus sebagai penunjang pembangunan, Pengadaan peralatan klinik hewan, pengujian laboratorium, dan retribusi jalan kepelabuhan.
5. Berkaitan dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan BLUD, Jasa Giro, Bunga, dan Pendapatan PAD Lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah ditargetkan Sebesar Rp11 triliun, yang meningkat sebesar Rp515 miliar dari target pendapatan pada APBD Murni yaitu sebesar Rp 12 triliun. Adapun target pendapatan daerah tersebut terealisasinya sebesar Rp11,57 triliun atau sebesar 95,97%. Ringkasan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Daerah APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.544.574.336.460	8.877.574.336.460	8.514.348.394.263	95,91
Pendapatan Transfer	2.989.040.250.000	3.179.171.343.795	3.056.402.268.431	96,14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.845.437.311	5.794.200.000	5.794.200.000	100,00
Jumlah Pendapatan Daerah	11.547.460.023.771	12.062.539.880.255	11.576.544.862.694	95,97

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

Pada kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 8.544.574.336.460 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 8.877.574.336.460 sedangkan realisasinya tercapai sebesar Rp 8.514.348.394.263 atau 95,91 persen dari target yang telah ditetapkan. Sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 94,16 persen terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Pajak Daerah	7.944.849.811.619	8.359.205.993.432	8.078.043.383.983	96,64
Retribusi Daerah	120.886.373.105	16.724.030.580	16.653.438.790	99,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.712.793.358	60.755.038.425	61.808.501.616	101,73
Lain-lain PAD yang Sah	411.125.358.378	440.889.274.023	357.843.069.874	81,16
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.544.574.336.460	8.877.574.336.460	8.514.348.394.263	95,91

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

Pada **Pendapatan Transfer** yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian ditargetkan pada APBD sebesar Rp 2.989.040.250.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp 3.179.171.343.795 tercapai sebesar Rp 3.056.402.268.431 atau 96,14 persen

Pada kelompok **Lain-lain Pendapat yang sah** ditargetkan pada APBD sebesar Rp 411.125.358.378 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp 440.889.274.023, tercapai sebesar Rp 357.843.069.874 atau 81,16 persen.

2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten tahun 2023, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
4. Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Adapun Program Pembangunan dana Arah Kebijakan berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Prioritas 1, Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

PROGRAM PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Daya Beli Masyarakat	- Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital - Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu - Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu - Peningkatan Ketersedian Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha	- Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO - Peningkatan pelayanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja - Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten
Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	- Pengembangan kualitas produk industri - Penguatan Manajemen Pusat Distribusi - Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah
Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	- Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (off farm) - Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	- Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan - Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan provinsi - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan - Pemanfaatan Bendung dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi - Pengelolaan prasarana pengendalian banjir - Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional - Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas - Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi - Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum,

PROGRAM PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
	- Peningkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi - Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik - penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh - Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan - Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan

2. Prioritas 2, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing SDM

PROGRAM PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas keluarga sejahtera	- Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatas	- Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa
Peningkatan Pelayanan Sosial	- Peningkatan Pemberdayaan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial
Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	- Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja
Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus ▪ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah - Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek - Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ▪ Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	- Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting
Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak - Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

PROGRAM PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
	- Penyediaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan - khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.
Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	- Kolaborasi programprogram pemajuan kebudayaan
Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	- Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga tingkat nasional

3. Prioritas 3, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	- Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten - Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui - Penguatan Regulasi - Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan - Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan - Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral
Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif	- Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana - Penurunan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan

4. Prioritas 4, Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan

PROGRAM PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi	- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan - Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan

PROGRAM PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
	- Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah - Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah - Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja - Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah - Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD - Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur - Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal - Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government - Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik
Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	- Peningkatan budaya politik yang demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa - Penurunan kerawanan konflik masyarakat

Selanjutnya kebijakan alokasi belanja daerah tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib mengikat, antara lain Belanja Pegawai, Belanja Transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Belanja Lainnya yang telah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten;
2. Belanja Wajib dalam rangka pemenuhan layanan dasar yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal, antara lain:
 - a. Pemenuhan belanja pendidikan minimal 20 (dua puluh) persen dari Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang system pendidikan nasional. Belanja dimaksud yang diarahkan untuk mendanai pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, dan pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOSDA);
 - b. Belanja Bidang Urusan Kesehatan sebesar minimal 10 (sepuluh) persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Belanja dimaksud diarahkan untuk Pelayanan Kesehatan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Kesehatan, Penyediaan alat kesehatan dan obat, Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan upaya-upaya promotif dan preventif kesehatan;

- c. Belanja Infrastruktur, yang mendukung konektivitas untuk pertumbuhan ekonomi yaitu pengadaan lahan, pemantapan jalan, serta pembangunan jalan baru;
 - d. Pemenuhan kebutuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta pemberdayaan sosial.
3. Belanja dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang, seperti Pemenuhan Belanja Fungsi Pengawasan, Kediklatan, Belanja dalam rangka penanggulangan kebencanaan, dan sejenisnya.
4. Belanja Hibah Kepada Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan termasuk dalam rangka penguatan hibah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada SMA, SMK, dan SKH Swasta.
5. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan provinsi. Secara teknis pengelolaan bantuan keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan Provinsi Banten, dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
6. Belanja dalam mendukung target dan prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2029.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp11.774.651.290.735 yang selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2023 telah ditetapkan menjadi sebesar Rp12.381.442.698.251. Anggaran Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp11.815.058.168.746 atau sebesar 95,43%. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja Operasi	6.835.097.862.719	7.170.176.329.180	6.752.937.563.482	94,18
Belanja Modal	1.794.289.757.043	1.605.193.753.768	1.523.915.187.149	94,94
Belanja Tidak Terduga	79.042.715.378	60.042.715.378	350.725.160	0,58
Belanja Transfer	3.066.220.955.595	3.546.029.899.925	3.542.637.636.925	99,90
Jumlah Belanja Daerah	11.774.651.290.735	12.381.442.698.251	11.815.058.168.746	95,43

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja operasi ditargetkan pada APBD sebesar Rp6.835.097.862.719,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp7.170.176.329.180,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.752.937.563.482 atau 94,18%. Target dan realisasi rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Rincian Belanja Operasi APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja Pegawai	2.397.488.403.632	2.370.801.373.384	2.217.441.741.764	93,53
Belanja Barang dan Jasa	3.807.571.997.487	3.910.990.067.344	3.656.800.229.388	93,50
Belanja Bunga	1.285.894.000	1.285.894.000	1.285.893.134	100,00
Belanja Hibah	598.567.367.600	858.210.720.452	849.755.538.209	99,01
Belanja Bantuan Sosial	30.184.200.000	28.888.274.000	27.654.160.987	95,73
Jumlah Belanja Operasi	6.835.097.862.719	7.170.176.329.180	6.752.937.563.482	94,18

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

2. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.794.289.757.043,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.605.193.753.768,00 dengan realisasi sebesar Rp1.523.915.187.149 atau 94,94%. Target dan realisasi rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Rincian Belanja Modal APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja Modal Tanah	204.135.392.749	83.144.449.299	71.692.519.600	86,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.101.967.091	468.609.753.394	454.691.367.999	97,03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	640.954.120.722	533.980.771.647	505.018.421.700	94,58
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	455.365.049.471	485.512.167.519	458.302.420.280	94,40
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.364.988.110	33.663.106.109	33.963.000.670	100,89
Belanja Modal Aset Lainnya	368.238.900	283.505.800	247.456.900	87,28
Jumlah Belanja Modal	1.794.289.757.043	1.605.193.753.768	1.523.915.187.149	94,94

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

3. Realisasi Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp79.042.715.378,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp60.042.715.378,00 dengan realisasi sebesar Rp350.725.160,00 atau 0,58%.

4. Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer TA 2022 terdiri dari belanja transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan, ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp3.066.220.955.595,00 dan Perubahan APBD sebesar Rp3.546.029.899.925,00 dengan realisasi sebesar Rp3.542.637.636.925,00 atau 99,90%. Target dan realisasi rincian Belanja Transfer APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Rincian Belanja Transfer APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja Bagi Hasil	2.866.940.955.595	3.346.749.899.925	3.346.749.899.925	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	199.280.000.000	199.280.000.000	195.887.737.000	98,30
Jumlah Belanja Transfer	3.066.220.955.595	3.546.029.899.925	3.542.637.636.925	99,90

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Penerimaan atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Serta Pengeluaran Pembiayaan dalam rangka Pembayaran pokok pinjaman dan penyertaan modal kepada Badan Usahan Milik Daerah.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah APBD Murni dianggarkan sebesar Rp227.191.266.964 dan pada Perubahan APBD TA 2023 ditetapkan menjadi sebesar Rp318.902.817.996. Pembiayaan Daerah netto terealisasi sebesar Rp324.461.765.949,00 atau 101,74 persen. Penerimaan Pembiayaan. Rincian Pembiayaan Daerah secara rinci tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Rincian Pembiayaan APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	615.689.000.000	718.942.028.785	712.959.498.985	99,17
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	615.689.000.000	468.942.028.785	462.959.498.985	98,72
Pencairan Dana Cadangan	-	250.000.000.000	250.000.000.000	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	388.497.733.036	400.039.210.789	388.497.733.036	97,11
Pembentukan Dana Cadangan	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	100,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036	150.039.210.789	138.497.733.036	92,31
Jumlah Pembiayaan Netto	227.191.266.964	318.902.817.996	324.461.765.949	101,74

Sumber : BPKAD Provinsi Banten, LRA Per Tanggal 31 Desember 2023 (unaudit).

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

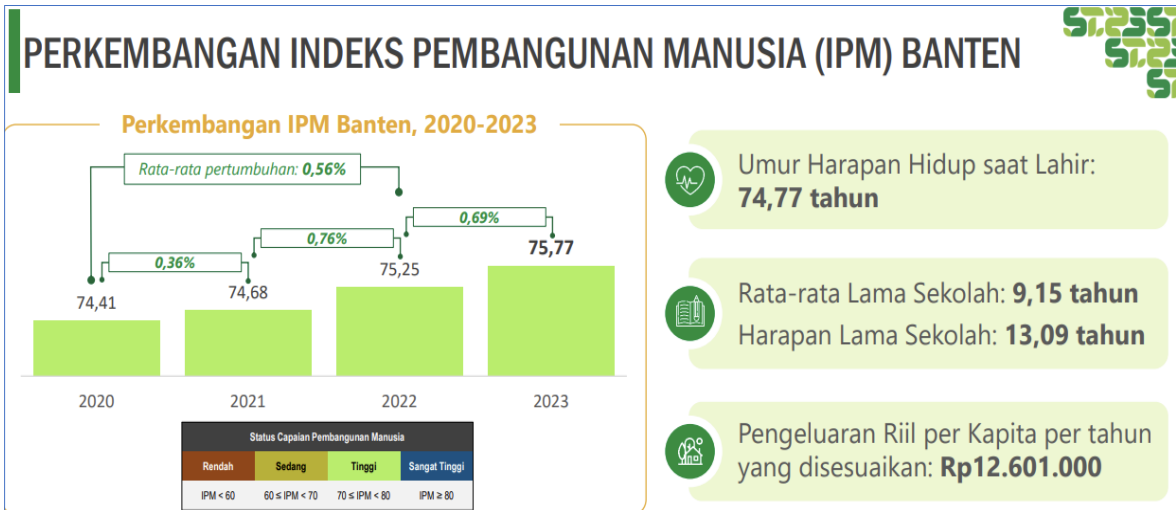
Tabel 3.1
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,60-73,60	75,25	73,59	75,77
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,0-5,6	5,03	4,70-5,2	4,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,7-9,20	8,09	7,9	7,52
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,99-5,4	6,24	6,10	6,17
5	Indeks Gini	Poin	0,370	0,377	0,363	0,368
6	Tingkat Inflasi	Persen	3,4-4,0	5,08	3,0-4,0	3,06

Sumber: RKPD 2023, Badan Pusat Statistik, 2023

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2023

IPM Banten 2023 meningkat, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten salah satunya terpresentasikan melalui capaian IPM. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang rilis pada No. 63/12/36/Th.XVII, 1 Desember 2023, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2023 sangat baik yaitu sebesar 75,77 poin, meningkat sebesar 0,69 poin dari tahun lalu. Capaian kinerja IPM pada tahun 2023 sudah melebihi harapan yang ditargetkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,96% atau meningkat 0,52 poin dari capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja IPM tahun 2023 jika kita lihat sudah mencapai target akhir kinerja RPD yaitu sebesar 74,39 di akhir tahun 2026. Jika dibandingkan capaian Nasional IPM Banten berada di atas nasional sebesar 1,38 poin, IPM nasional sendiri berada di angka sebesar 74,39.

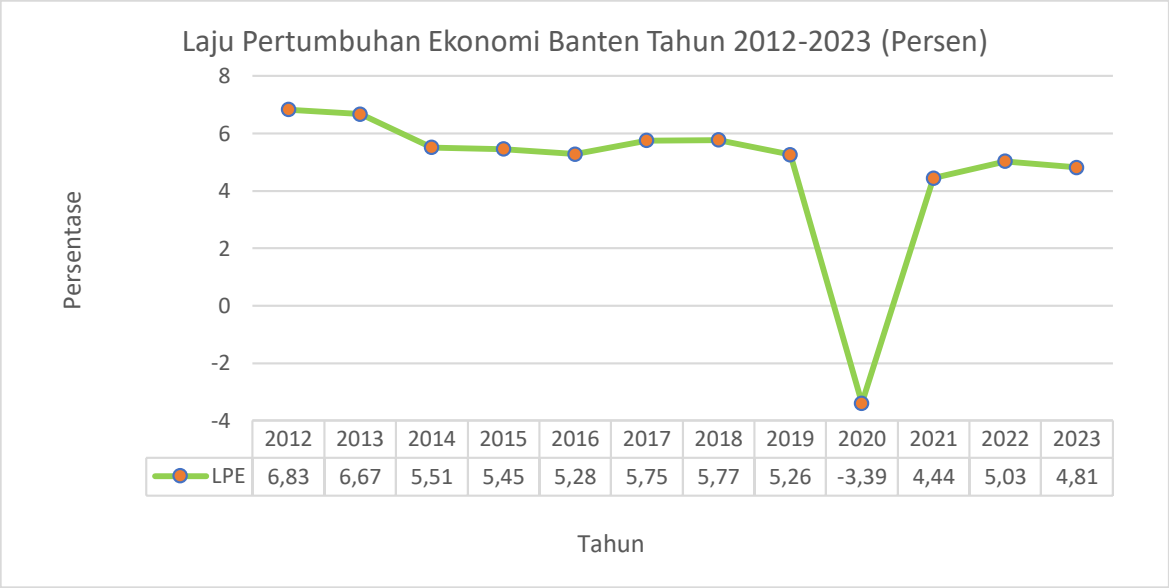
Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2023 termasuk pada klasifikasi “tinggi”, secara peringkat Banten menempati peringkat ke-6 dengan status IPM tertinggi dari 34 Provinsi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2023 terus meningkat, UHH tahun 2023 mencapai 74,77 tahun meningkat 0,31 poin dibanding tahun sebelumnya. Posisi ini diatas nasional 0,84 poin. Capaian kinerja UHH pada tahun 2023 sudah melebihi harapan yaitu sebesar 100,80%. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 74 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 telah mencapai 13,09 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2023, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA. Realisasi ini naik sebesar 0,04 poin dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata Lama Sekolah di Banten menunjukkan perkembangan positif, RLS Banten pada tahun 2023 telah mencapai 9,15 tahun meningkat 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja RLS pada tahun 2023 telah mencapai 100,44 persen atau sudah melebihi harapan dan meningkat sebesar 2,4 persen, dibanding tahun sebelumnya dengan pertumbuhan yang selalu positif. Hal ini artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp.3,12 triliun atau 25,22 persen dari belanja daerah (ketentuan minimal 20 persen); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,2 triliun atau 12,42% dari belanja daerah (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*.

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,7 – 5,2 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor. 09/02/36/Th. XVIII, 5 Februari 2024, realisasi laju Pertumbuhan ekonomi Banten di Tahun 2023 (y on y) sebesar 4,81 persen. LPE dibandingkan dengan tahun kemarin mengalami pelambatan sebesar 0,22 persen. Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,95 persen.



Sumber : Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Banten 2012-2023 (y on y)

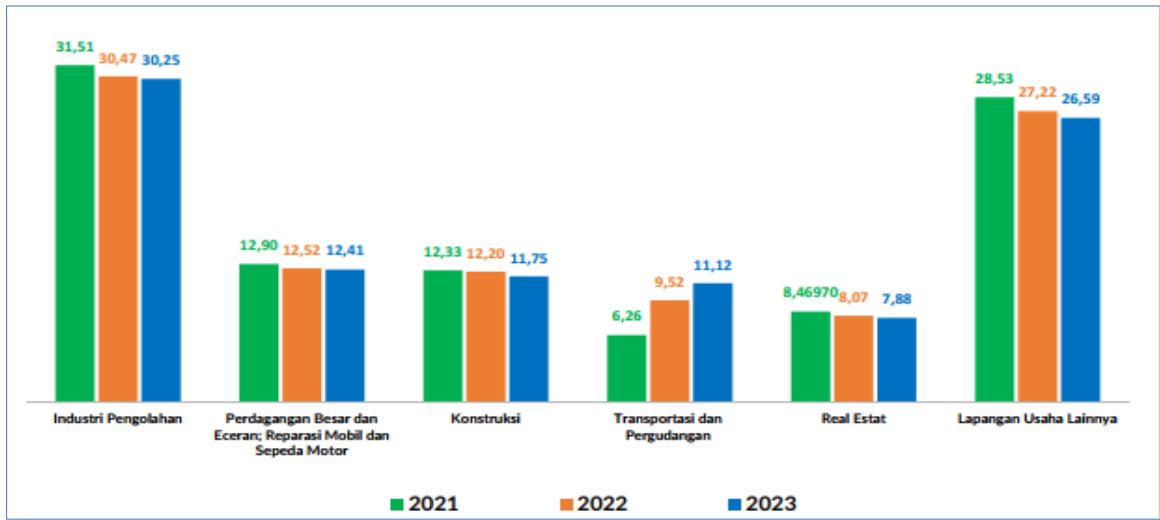
Kondisi ekonomi di Indonesia banyak dipengaruhi keadaan global, melambatnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan kondisi ekonomi global tahun 2023 dimana melambat pada kisaran 3 persen. Ekonomi negara-negara maju diperkirakan juga akan melambat sekitar 1,5 persen. Sementara negara-negara berkembang diperkirakan mengalami penurunan moderat di kisaran 4 persen pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi global berjalan lambat dikarenakan perang Rusia-Ukraina masih berlanjut serta adanya cuaca ekstrem.

Kondisi pada sektor pengeluaran untuk seluruh komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Total Net Ekspor sebesar 19,35 persen. Disusul komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 3,96 persen, komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 3,62 persen, kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) masing-masing tumbuh 3,43 persen dan 0,07 persen. Struktur perekonomian Banten menurut pengeluaran tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 52,47 persen dan tumbuh sebesar 3,96 persen.

Hal lain pada sektor produksi menurut lapangan usaha hampir semua leading sector melanjutkan tren positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi di antaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 9,38 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,43 persen. Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku padatahun 2023 tidak mengalami perubahan. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,41 persen, Konstruksi sebesar 11,75 persen;

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai faktor antara lain: 1) Mempermudah perijinan sehingga investasi di Provinsi Banten pada tahun 2023 naik, mencapai realisasi sebesar Rp. 103,85 triliun dari target RPD 2023-2026 sebesar 60 triliun dan target nasional 82,9 triliun. Hal ini ditunjang dari masuknya investasi dari proyek skala besar; 2) Pemerataan investasi dan pembangunan kawasan industri baru sesuai RTRW Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; 3) Pengembangan kawasan industri eksisting di wilayah Banten utara, dan birokrasi berdampak dengan menguatkan Bangsa Buatan Indonesia (BBI) dan Bangsa Berwisata Indonesia (BWI), investasi daerah, digitalisasi perdagangan; 4) Mendorong konsumsi masyarakat sesuai arahan presiden secara geografis provinsi banten berada pada posisi yang sangat strategis dan didukung dengan infrastruktur konektivitas antar wilayah berupa pelabuhan, bandara dan jalan tol; 5)Kontribusi PDRB Provinsi Banten yang secara dominan adalah sektor industri dan perdagangan yang relatif tumbuh dengan baik ditengah ketidakpastian ekonomi global.

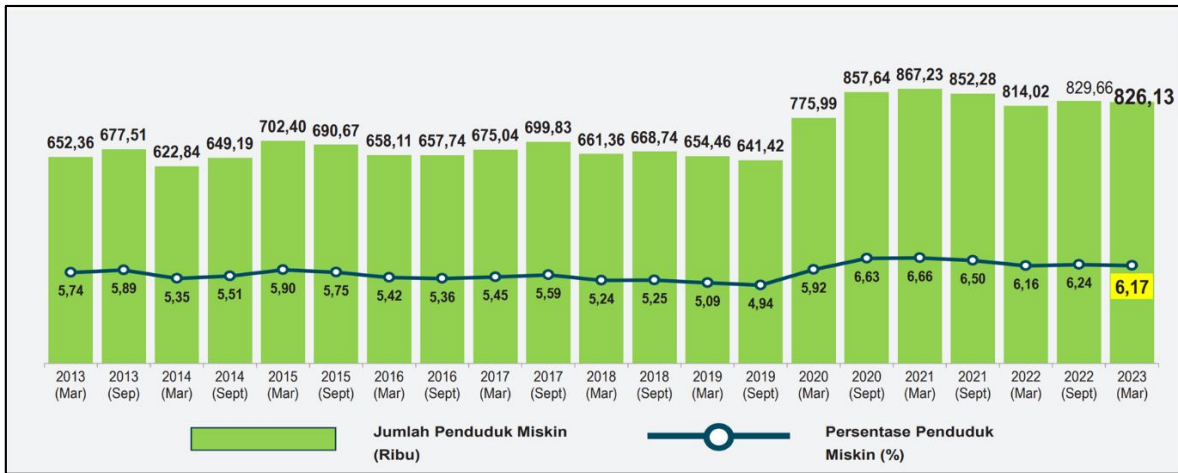


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 3.3
Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2021-2023

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 36/07/36/Th.XVII, 17 Juli 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen, menurun 0,07 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,01 persen poin jika dibandingkan dengan maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 826,13 ribu orang, menurun 3,5 ribu orang terhadap September 2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 3.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2013-2023

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 6 persen, naik menjadi sebesar 0,11 persen poin dibandingkan pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 6,79 persen, turun 0,5 persen poin jika dibandingkan pada September 2022.

Naiknya angka kemiskinan Banten ini disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan di daerah perkotaan Banten. Tercatat, jumlah dan persentase penduduk miskin perkotaan naik dari 566,49 ribu orang dan 5,73 persen menjadi 623,19 ribu orang dan 6,00 persen pada Maret 2023 . Sementara di daerah perdesaan, pada periode yang sama masing-masing turun 44,61 ribu orang dan 0,67 persen poin.

Meningkatnya angka kemiskinan perkotaan Banten sepertinya dipengaruhi oleh turunnya pertumbuhan sub kategori industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki Triwulan I-2023, yang secara y on y terkonsentrasi 9,41 persen. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh turunnya permintaan luar negeri untuk industri alas kaki dari Amerika Serikat dan Tiongkok, akibat terdampak Covid-19 dan perang Rusia- Ukraina. Adapun turunnya permintaan tersebut terlihat dari ekspor alas kaki yang menurun dari 1,43 miliar US\$ (April-September 2022) menjadi 1,18 miliar US\$ (Oktober 2022-Maret 2023).

Turunnya permintaan luar negeri untuk produk alas kaki Banten menyebabkan terjadinya relokasi pabrik alas kaki ke Jawa Tengah. Pabrik alas kaki yang merelokasi

sebagian pabriknya adalah PT. Nikomas Gemilang (Kab. Serang), PT. KMK Global Sport (Kab. Tangerang), dan PT. Parkland World Indonesia (Kab. Serang). Relokasi menimbulkan PHK besar-besaran di industri sepatu Banten. Dimana PT. ADIS (Kab. Tangerang) pada saat bersamaan juga melakukan PHK, akibat turunnya order dari vendor asingnya.

PHK yang terjadi pada industri sepatu menyebabkan turunnya permintaan UMKM untuk usaha kos-kosan dan kontrakan, perdagangan eceran, penyediaan makan dan minum, serta angkutan umum. Inilah yang menjadi penyebab turunnya daya beli masyarakat bawah (pekerja yang di PHK dan pelaku UMKM), sehingga menyebabkan naiknya angka kemiskinan di daerah perkotaan Banten.

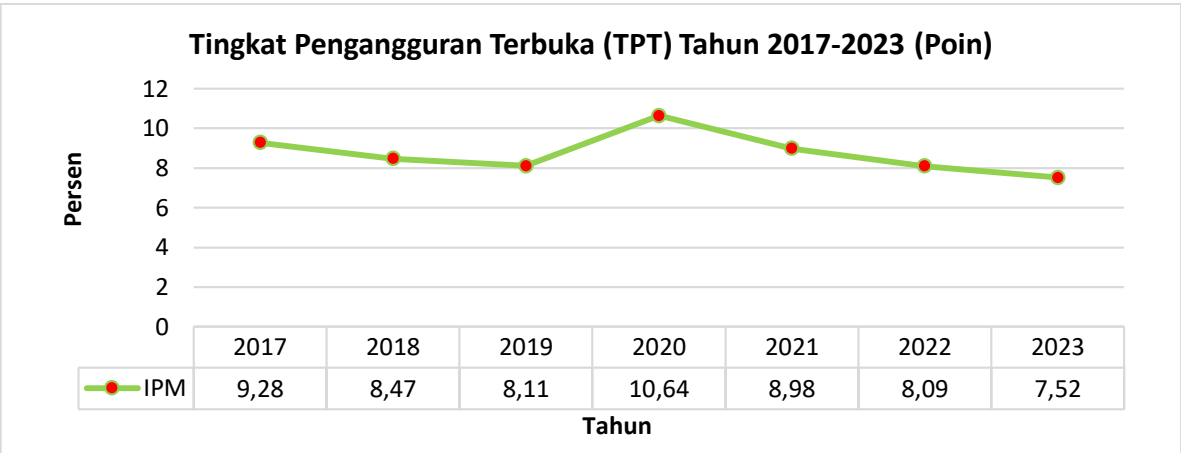
Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 618.721,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp448.240,- (72,45 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp170.481,- (27,55 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,92 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.125.218,-/rumah tangga miskin/bulan. Garis Kemiskinan (GK) per Rumah Tangga Miskin di Banten berada diatas GK per Rumah Tangga Miskin Nasional, Nasional dengan angka sebesar Rp569.299/kapita dan Rp 2.681.398 per rumah tangga miskin.

Provinsi banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintergrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2). Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3). Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

3.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2023 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional dan mengeliatnya kembali ekonomi global walaupun banyak ketidakpastian akibat perang dan dampak masifnya penggunaan IOT dimana banyak pekerjaan yang berkurang memakai tenaga manusia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 58/11/36/Th.XVII, 6 November 2023. TPT Provinsi Banten menurun pada periode Agustus tahun 2023 yaitu sebesar 7,52%, menurun 0,57 poin dari tahun sebelumnya, walaupun posisinya dibanding nasional 2,2% dibawah raat-rata nasional. Capaian kinerja TPT pada tahun 2023 sudah melebihi harapan yaitu sebesar 104,81% meningkat capaiannya 1,53%

dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja TPT di tahun 2023 telah melebihi target RPD 2026 yaitu sebesar 109,04%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 3.5
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2023 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 9,26 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 5,97 juta orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3,29 juta orang dan sebanyak 448 ribu orang menganggur. Penurunan pengangguran ini dilihat dari proporsi penduduk di tahun 2023 ini meningkat terhadap pekerjaan pada kegiatan formal, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Kecenderungan penduduk Banten dari sektor pekerjaan utama kerja sebanyak 50,99% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 22,41%.

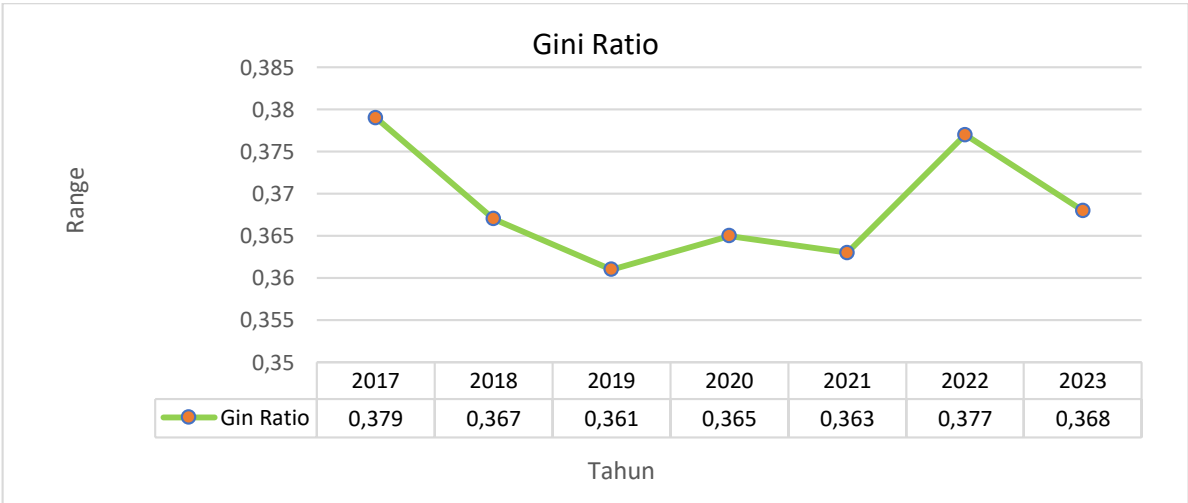
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pengangguran Provinsi Banten mengalami kecenderungan yang terus menurun. Hal ini tentunya adanya berbagai upaya sinergis yang dilakukan baik dari program pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun pendukung penurunan TPT antara lain: 1). Pendidikan vokasi didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja baik siap bekerja di perusahaan maupun membuka usaha mandiri, contoh SMKN 3 Kota Tangerang dengan jurusan tata boga selalu terserap pada pasar kerja (hotel dan restoran). 2). Pendirian beberapa politeknik seperti pendirian politeknik petrokimia di cilegon, 3). Secara regulasi terdapat Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu upaya konkret penanggulangan pengangguran yang berasal dari lulusan SMK, 4). Pendirian beberapa SMK di Banten pada tahun 2023 sebanyak 3 unit sekolah baru, 5). Terdapat pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK. 6). Pengembangan destinasi pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif yang semakin memperluas akses ekonomi masyarakat.

3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi BantenNo. 37/07/36/Th.XVII, 17 Juli 2023 bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode Maret Tahun 2023 mencapai sebesar 0,368 poin yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,014 poin dibanding periode Maret 2022 yaitu 0,363 poin, perubahan angka pada satu tahun terakhir. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2022 mengalami peningkatan 1,49 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377.

Berdasarkan target Perubahan RKPD dimana gini ratio ditargetkan 0,370 dan terealisasi 0,377 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,45%.



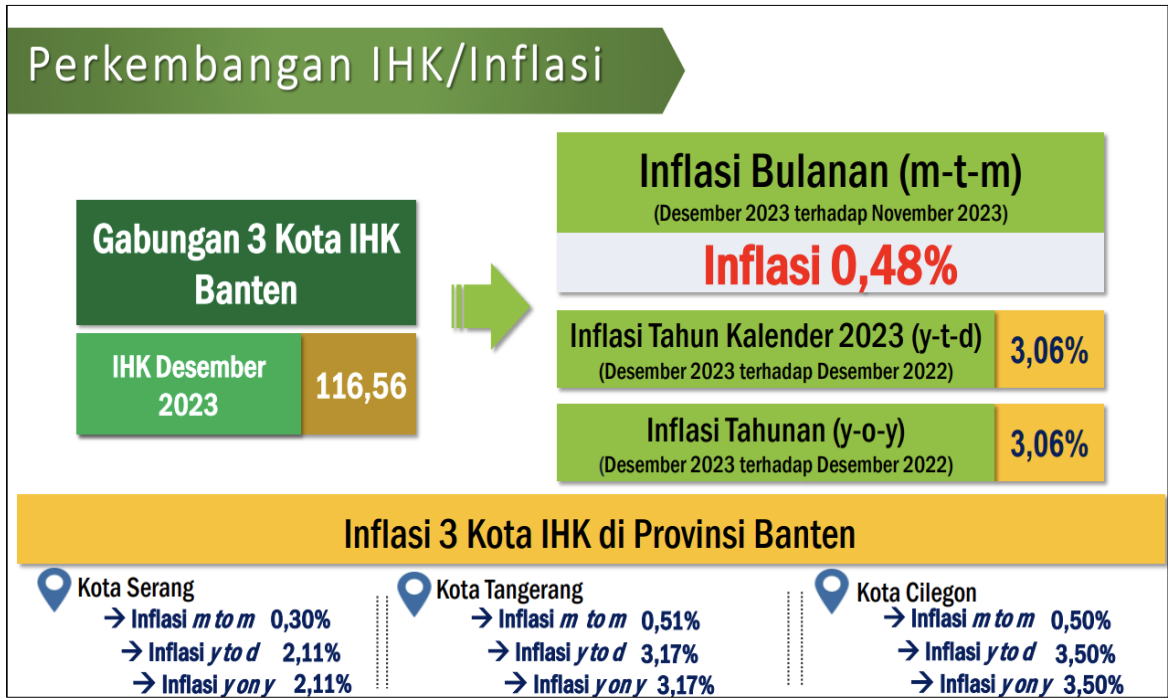
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 3.6
Gini Ratio Tahun 2017-2023 Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi di Provinsi Banten dipantau di 3 (tiga) kota besar yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Serang. BPS Provinsi Banten merilis bahwa inflasi di Provinsi Banten tahun 2023 (y on y) sebesar 3,06%. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada 3 (tiga) kota, Kota Serang sebesar 2,11%, lalu Kota Cilegon 3,50% dan Kota Tangerang 3,17%. Harga komoditas yang sangat mempengaruhi inflasi adalah kenaikan cabai merah, beras dan Sewa rumah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 3.7
Inflasi Provinsi Banten Tahun 2023

Secara umum inflasi Banten relatif terkendali walaupun diatas inflasi nasional sebesar 2,61%. Kondisi inflasi yang dapat terkendali tak lepas dari sinergisitas segenap *stakeholders* dan fokus kerja pemerintahan Provinsi Banten yang bersandarkan pada reformasi birokrasi berdampak.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Penetapan Indikator kinerja Utama Pemda berdasarkan RPD 2023-2026 yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut IKU Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten. Pada Misi 1 terdapat 10 (sepuluh) tujuan/sasaran daerah dengan 14 (empat belas) Indikator, pada Misi 2 terdapat 7 (tujuh) tujuan/sasaran daerah dengan 10 indikator, pada misi 3 terdapat 3 (tiga) tujuan/sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan terakhir misi 4 terdapat 3 (tiga) tujuan/sasaran dengan 6 (enam) indikator. Adapun capaian IKU Daerah disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Tahun 2023			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	6,1	6,17	99,01	sangat tinggi
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,9	7,52	104,81	sangat tinggi
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	73,59	75,77	102,96	sangat tinggi
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	53,56	92,14	sangat tinggi
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,6803	102,30	sangat tinggi
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,12	91,99	sangat tinggi
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94	101,15	sangat tinggi

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Tahun 2023			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian	
		Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,15	100,44	sangat tinggi
		dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	13,09	95,20	sangat tinggi
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,4	74,77	106,20	sangat tinggi
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,5	20	116,37	Sangat tinggi
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,18	99,04	sangat tinggi
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	51,41	93,42	sangat tinggi
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	49,28	99	sangat tinggi
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70-5,2	4,81	100	sangat tinggi
			Indeks Williamson	0,625	0,620	100,80	sangat tinggi
			Indeks Gini	0,363	0,368	101,38	sangat tinggi
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	3,43	86,39	sangat tinggi
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	5,82	116,43	sangat tinggi
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	3,98	163,11	sangat tinggi
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	5,1	116,17	sangat tinggi
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	0,14	20,58	sangat rendah
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi	tinggi	100	sangat tinggi

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Tahun 2023			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	12.216	100,39	sangat tinggi
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,82	87,18	tinggi
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52	100,84	sangat tinggi
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51	98,06	sangat tinggi
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	66	78,17	118	sangat tinggi
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,74	97,09	sangat tinggi
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,2	77,012	93,69	sangat tinggi
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	3,2	100,00	sangat tinggi
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	3,47	3,74	107,78	sangat tinggi
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	100	sangat tinggi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Banten

Keterangan kinerja yang ditampilkan merupakan pedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana keterangan capaian kinerja meliputi: Kinerja capaian Sangat Tinggi dengan range sebesar (≥ 91 -100%), kinerja capaian Tinggi dengan range sebesar (≥ 76 -90%), kinerja capaian Sedang dengan range sebesar (≥ 66 -75%), kinerja capaian rendah dengan range sebesar (≥ 51 -65%), sangat rendah ($\leq 50\%$).

Pembangunan jangka menengah Provinsi Banten berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran

pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Pencapaian indikator pada **Misi Pertama** Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas ditunjukkan dengan 14 (empat belas) indikator, dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100,25 persen. Dimana capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator prevalensi stunting.

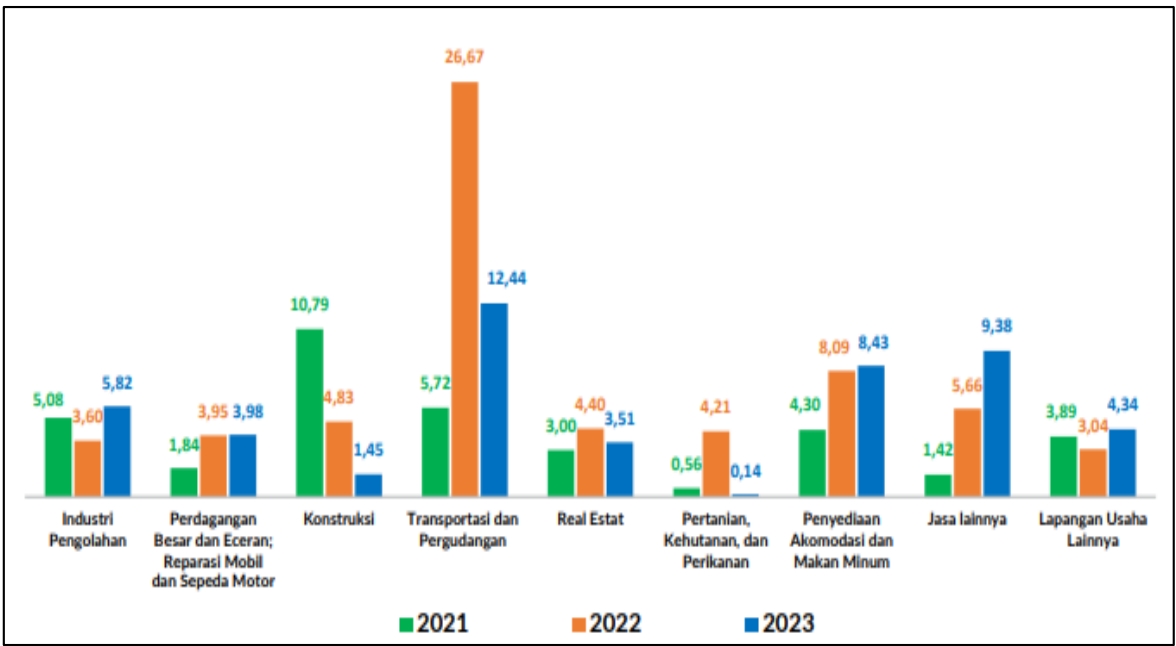
Pencapaian indikator pada **Misi Kedua** Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan ditunjukkan dengan 10 (sepuluh) indikator, capaian kinerja pada misi Kedua sebesar 100,75 persen. Capaian kinerja tertinggi pertumbuhan sektor perdagangan.

Pencapaian indikator pada **Misi Ketiga** Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari ditunjukkan oleh ketercapaian 3 (tiga) indikator kinerja daerah, capaian kinerja pada misi 3 ini sebesar 95,36 persen. Capaian kinerja tertinggi adalah Indeks kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian indikator pada **Misi Keempat** Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa ditopang oleh 6 (enam) indikator, capaian kinerja pada misi ini sebesar 104,03 persen. Capaian kinerja tertinggi Indeks Reformasi Birokrasi.

Capaian kinerja pada tahun 2023 ini didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang menjadi prioritas pada Pemerintah Provinsi Banten yaitu pada **Bidang pendidikan** membangun sekolah baru, membangun ruang kelas baru, membangun laboratorium dan membangun fasilitas pendidikan lainnya. Pada **Bidang Kesehatan** membangun Rumah Sakit Labuan dan Rumah Sakit Ciligrang, melengkapi peralatan medis terkini di RS Banten dan RS Malingping, Penguatan Sumber Daya Kesehatan, Peningkatan Jaminan sosial Kesehatan melalui BPJS, Penguatan program dalam rangka penurunan angka stunting. Pada **Bidang Infrastruktur** Membangun Jembatan Tanara, membangun jembatan Kemayungan, membangun jembatan Nyapah, membangun 296 Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), membangun rumah layak huni. Pada **Bidang Ekonomi** membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), penguatan pengendalian inflasi, peningkatan realisasi investasi, penguatan gerakan pangan murah dan stabilisasi harga komoditas sembako. Pada **Bidang Sosial** menyalurkan bantuan sosial, menyalurkan bantuan keuangan dana desa, bantuan jaminan sosial keluarga, penguatan data Administrasi kependudukan (Adminduk), penguatan penurunan kemiskinan ekstrem. Pada **Bidang Tata Kelola Pemerintahan** menguatkan pengawasan dan fungsi APIP, kerjasama dengan Kejaksaan tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan korupsi, penguatan implementasi Reformasi Birokrasi general dan tematik.

Adapun capaian kinerja sangat rendah adalah sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan dengan indikator pertumbuhan LPE Sektor Pertanian dan Kelautan dengan target 0,68 persen dan realisasi sebesar 0,14 persen dengan capaian kinerja 28 persen. Secara data kontribusi pada sektor ekonomi terjadi Perlambatan LPE Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2023 disebabkan terjadi peningkatan yang signifikan tahun 2022 yaitu dari 25,42 Triliun tahun 2021 menjadi 26,49 Triliun ditahun 2022, sehingga dengan peningkatan signifikan ditahun 2022 tersebut yang kemudian menjadi baseline, akan sangat berpengaruh untuk mencapai kinerja di tahun 2023, peningkatan laju pertumbuhan kontribusi sektor pertanian ditahun 2023 sebesar 26,52 Triliun, naik sebesar 30 miliar dibanding tahun sebelumnya. Gambar berikut menjelaskan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan dari 4,21 persen menjadi 0,14 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

Faktor penyebab rendahnya LPE sektor pertanian dan perikanan khususnya di bidang perikanan disebabkan belum maksimalnya nilai tukar perikanan terutama nilai tukar nelayan yang mayoritas hasil usaha perikanan tangkap di Provinsi Banten belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan belum meratanya nilai ekonomis produksi perikanan di Provinsi Banten yaitu;

1. Armada perikanan tangkap masih didominasi oleh kapal perikanan ukuran dibawah 5 GT;
2. Fishing ground yang makin menjauh;
3. Metode perikanan tangkap masih bersifat tradisional;

4. Belum meratanya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai.

Beberapa Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam menanggulangi permasalahan terkait produksi perikanan tangkap yaitu :

1. Pemberian bantuan sarana prasarana alat penangkapan ikan;
2. Pengadaan fish apartment (rumpon) dan transplantasi terumbu karang;
3. Pelatihan diversifikasi produk hasil tangkapan ikan kepada istri nelayan;
4. Pemberian bantuan BBM bersubsidi bagi kapal perikanan;
5. Pembangunan Fasilitas Pokok dan Fungsional di beberapa pelabuhan perikanan Induk Provinsi Banten.

Selain produksi perikanan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga mengupayakan beberapa kegiatan dalam pemenuhan capaian pada produksi perikanan budidaya diantaranya yaitu:

1. Penyaluran benih ikan yang berkualitas melalui hasil produksi benih UPTD PPBAPL kepada kelompok pembudidaya ikan;
2. Fasilitasi sertifikasi cara budidaya ikan dan cara pembenihan ikan yang baik;
3. Pemantauan penggunaan obat dan bahan kimia ikan yang dilarang.
4. Membangun sarana dan prasarana pelabuhan terutama di Selatan Banten yaitu Pelabuhan Binuangeun dan Cikeusik untuk mendukung pendaratan dan peningkatan produksi perikanan

Meskipun demikian capaian produksi perikanan berupa produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya Provinsi Banten dari data yang dikumpulkan di 8 Kab/Kota mengalami peningkatan. Produksi perikanan tangkap Tahun 2023 sebesar 73.280,25 mengalami peningkatan sebesar 5.520,97 ton dari produksi tahun 2022 sebesar 67.759,28 ton pada tahun 2022. Capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 114.029,18 ton mengalami peningkatan juga sebesar 2.429,88 ton dari tahun 2022 dengan produksi perikanan budidaya sebesar 111.599,30 ton (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2023).

Faktor penghambat peningkatan PDRB sektor pertanian diantaranya berkaitan dengan cuaca musim kemarau (dampak elnino) yang menurunkan produksi komoditas pertanian, kurang memadainya kualitas tenaga kerja pada sektor pertanian, berkurangnya luas lahan pertanian, menurunnya permintaan ekspor pertanian, dan belum optimalnya investasi sektor pertanian.

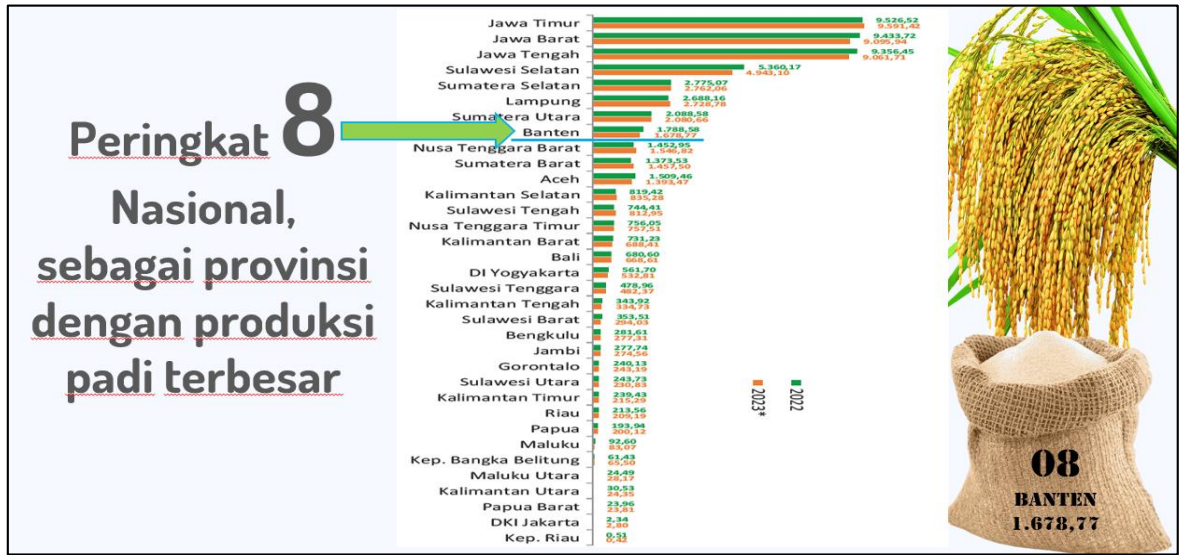
Meskipun demikian pada tahun 2023 rata-rata nilai tukar petani (NTP) Banten tahun 2023 sebesar 106,57 dimana para petani secara umum meningkat kesejahteraannya dibanding tahun 2022 sebesar 91,12. Adapun rincian NTP tahun 2023 disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2023

Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan Menurut Subsektor di Provinsi Banten												
Subsektor	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pertanian	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Tanaman Pangan	105.52	107.49	104.73	104.40	104.85	106.07	106.76	109.50	114.73	118.72	118.02	118.43
Tanaman Holtikultura	96.84	94.20	95.31	94.87	95.20	95.41	95.39	94.46	96.41	98.09	101.11	100.36
Tanaman Perkebunan Rakyat	105.43	105.42	104.82	110.04	106.09	104.94	103.14	104.21	103.85	102.76	101.72	102.35
Peternakan	95.15	96.83	96.77	97.52	97.14	98.25	99.83	97.89	96.56	95.99	94.73	94.69
Perikanan	100.19	99.66	99.55	100.18	100.21	99.92	100.01	100.27	99.71	99.36	98.58	98.10
NTP Gabungan	103.08	104.20	102.47	102.63	102.68	103.55	104.06	105.60	109.16	111.88	111.59	111.78

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Provinsi Banten pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan, dimana salah satu provinsi dengan penyumbang produksi padi tertinggi ke-8 secara nasional dan meraih Anugrah Adhikarya Pembangunan Pertanian di Tahun 2023 dari Kementerian Pertanian.



Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Gambar 3.9
Peringkat 8 (Delapan) Besar Provinsi Penghasil Padi Tahun 2023

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah:

1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
2. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global

- 3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- 4. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform
- 5. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- 6. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani, Pembuatan irigasi tersier dan lain-lain.
- 7. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.

Berdasarkan target dan indicator yang ditetapkan, capaian IKU Tahun 2023 berdasarkan perangkat daerah sebanyak 91 indikator yang tersebar di 32 Perangkat daerah tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	95,65	95,65	Sangat Tinggi
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	71,34	85,74	120,19	Sangat Tinggi
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	63,04	28,76	45,6	Rendah
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,7	11,91	93,77	Sangat tinggi
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)					
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	40	66,6	166,50	Sangat Tinggi
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,92	76,93	100,01	Sangat Tinggi
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	81	69,1	114,69	Sangat Tinggi
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,7	5	93,62	Sangat Tinggi

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
BIDANG KEBUDAYAAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,2	3,95	123,44	Sangat Tinggi
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5	8,30	166	Sangat Tinggi
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73	99,44	108,41	Sangat tinggi
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	60,83	77,55	127,49	Sangat tinggi
Luas Permukiman Kumuh	Ha	219	328,58	150	Sangat tinggi
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)					
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	5,4	6,10	112,96	Sangat tinggi
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)					
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	19,76	6	30,6	Sangat rendah
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87	0,87	100	Sangat tinggi
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	100	96,9	96,9	Sangat Tinggi
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	62,81	58,49	93,12	Sangat tinggi
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	43,86	28,66	65,34	Sedang
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	94	94,25	100,27	Sangat Tinggi
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)					
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,64	116	Sangat Tinggi
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,18	66,67	89,88	Tinggi

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KETERANGAN
b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,44	58,93	108,25	Sangat tinggi
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		80,1	82,95	103,56	Sangat tinggi
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)					
Angka Kelahiran Tota TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,38	1,96	121,43	Sangat Tinggi
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)					
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	60	103,85	173,08	Sangat tinggi
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	86,22	89,72	104,06	Sangat Tinggi
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB	100	Sangat Tinggi
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	273	432	158,24	Sangat Tinggi
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)					
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	70,73	78,71	111,28	Sangat Tinggi
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Dinas Komunikasi dan Informatika)					
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,8	84,61	92,17	Sangat Tinggi
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,25	3,39	104,30	Sangat tinggi
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)					
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	68,26	64,60	94,64	Sangat Tinggi
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (Dinas Pemuda dan Olahraga)					
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,5	0,289	57,8	rendah
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	50	49	98	Sangat Tinggi
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	69,26	68,55	97,57	Sangat Tinggi
Indek Perlindungan Anak	Nilai	74,55	64,33	86,29	Tinggi
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	11,55	88,85	Tinggi
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	67,3	66,23	98,41	Sangat Tinggi
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)					
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KETERANGAN
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)					
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (Dinas Koperasi dan UKM)					
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	25	100	Tinggi
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai kluster	Persen	5	5	100	tinggi
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubungan)					
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,7	21	106	Sangat tinggi
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,72	0,70	97,2	Sangat Tinggi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82	80	97,5	Sangat Tinggi
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa)					
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	14,22	18,98	133,47	Sangat Tinggi
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	13,49	12,86	95,33	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Dinas ESDM)					
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	55,25	59,38	107,47	Sangat tinggi
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5	2,39	47,8	Sangat Rendah
Rasio Elektrifikasi	Persen	98,2	99,99	101,82	Sangat Tinggi
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)					
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,1	39,06	111	Sangat Tinggi
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)					
NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	102	100,19	98,57	Sangat Tinggi
Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	246.569	135849,19	55,10	Rendah
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)					
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	20.060.922	25.664.013	127,93	Sangat tinggi
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,48	12,41	92,06	Sangat tinggi
BIDANG PERINDUSTRIAN					
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	6,43	30,25	470	Sangat tinggi
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)					

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KETERANGAN
Produksi Peternakan	Ton	225.907	256.390	113,49	Sangat tinggi
Produksi Hortikultura	Ton	23.714	31.091	131,10	Sangat tinggi
Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.051.611	1.678.766	81,82	Tinggi
Produksi Perkebunan	Ton	50.855	49.205	96,75	Sangat tinggi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
Indeks Kelembagaan	Nilai	41 - 60	84,2	140	Sangat tinggi
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	65	108	Sangat tinggi
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80	88,59	110	Sangat Tinggi
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	91,16	111,42	Sangat Tinggi
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,24	95,07	Sangat Tinggi
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,24	3,45	81,37	Tinggi
SEKRETARIAT DPRD					
Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD	Persen	100	100	100	Sangat tinggi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	0,5	50	rendah
Maturitas SPIP	Nilai	3,14	3,04	96,82	Sangat Tinggi
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14	15,31	109,29	Sangat Tinggi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat timggi
Kemandirian Keuangan	Persen	63,55	73,8	116,13	Sangat Tinggi
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif (60)	Inovatif (50,41)	84,01	tinggi
KEPEGAWAIAN					
Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5	330,50	102,80	Sangat Tinggi
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	24,48	52,05	212,65	Sangat Tinggi
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	10,23	21,61	211,24	Sangat tinggi

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KETERANGAN
PERENCANAAN					
Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	45	42,19	93,75	Sangat Tinggi
PENGHUBUNG					
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	3-4	3	100	Sangat Tinggi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	77,55	76,87	99.12	Sangat Tinggi
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Banten

Pada tahun 2023 merupakan kinerja tahun pertama pada pelaksanaan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Dimana terdapat 91 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dihitung realisasi dan capaian kinerjanya. Berdasarkan hasil perhitungan sebanyak 76 indikator dengan predikat Sangat Tinggi, 8 indikator predikat tinggi, 1 indikator predikat sedang, 3 indikator predikat rendah, 3 indikator predikat sangat rendah.

Terhadap hasil capaian kinerja indikator kinerja utama perangkat daerah dengan kriteria rendah dan sangat rendah, diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL Regional dan Pengelolaan Sampah Regional diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan target 19,76 persen dan terealisasi sebesar 6 persen dengan capaian kinerja 30,36 atau sangat rendah. Dalam rangka pencapaian capaian pelayanan pada Air minum, IPAL dan Sampah sedang pada tahap perencanaan tahun 2023.
 - a. Untuk SPAM, kondisi terkini yaitu belum beroperasionalnya WTP Sindang Heula dan belum terbangunnya infrastruktur SPAM Karian Barat dan Karian Timur.
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota belum terlaksana karena dokumen rencana induk belum tersusun dan infrastruktur SPALD Regional belum terbangun.
 - c. Untuk IPAL pelaksanaan perpipaan Karian Barat dan Sindangheula secara intensif dilakukan koordinasi dengan Kementerian. Pada tahun 2023, kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan persampahan yaitu reviu Dokumen Rencana Induk Persampahan (RISPAH) Provinsi Banten dan Penyusunan DPPT TPST yang berlokasi di Kecamatan Maja.
 - d. Pada tahun 2024, sudah dialokasikan anggaran untuk pengadaan lahan TPST regional.

Pembangunan sektor lainnya, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil membangun infrastruktur fisik antara lain, di wilayah Banten Utara terdapat pembangunan 5 (lima) unit jembatan, pembangunan 13 (tiga belas) ruas jalan, pembangunan sumber daya air 3 (tiga) unit, 3 UPTD pemeliharaan jalan dan jembatan dan 2 UPTD pemeliharaan aliran sungai. Wilayah Banten Selatan terdapat pembangunan 1 (satu) unit jembatan, pembangunan 7 (tujuh) ruas jalan, 1 (satu) pembangunan bidang cipta karya, 8 (delapan) pembangunan sumberdaya air, 2 UPTD pemeliharaan jalan dan jembatan, 1 UPTD pemeliharaan aliran sungai.

2. Indikator Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4 -18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, target 63,04 persen terealisasi 28,76 persen dengan capaian kinerja 45,62 persen atau sangat rendah. Kondisi ini disebabkan oleh belum semua orang tua murid penyandang disabilitas berusia Sekolah 4 -18 tahun mau dan mampu menyekolahkan anaknya di sekolah khusus. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah mengupayakan peningkatan akses dan sarana prasarana SKH untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada 6 (enam) kab/kota berupa penyediaan SKH Negeri. Sedangkan untuk Kabupaten Serang dan Kota Tangerang akan dibangun SKH Negeri. Pada tahun 2024, Operasionalisasi SKH Negeri di Kota Tangerang menggunakan Gedung Ex UPTD pendidikan Tangerang, sedangkan untuk Kabupaten Serang akan dibangun di wilayah Kecamatan Ciomas di samping padepokan silat, dengan harapan dapat meningkat APS sekolah penyandang disabilitas pada tahun 2025.
3. Indikator Persentase pemanfaatan langsung Energi Baru Terbarukan (EBT) diampu oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral, target 5 persen terealisasi 2,39 persen dengan capaian sebesar 47,8 persen atau sangat rendah. Indikator pemanfaatan langsung EBT ini dihitung oleh Dewan Energi Nasional (DEN) Kementerian ESDM. Pada tahun 2023 kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) Dokumen Kajian Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Wilayah Rawadano, Gunung Pulosari, Gunung Endut dan Gunung Karang, sedangkan pemanfaatan langsung EBT dilaksanakan dengan terpasangnya Infrastruktur EBT di Lingkungan Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten adalah PLTS Rooftop On Grid 25 kWp di Gedung Kantor Bappeda, Dinas ESDM dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Meskipun demikian rasio elektrifikasi di Provinsi Banten saat ini telah mencapai 99% dan Banten sebagai lumbung energi Jawa Bali yang menyumbangkan sebesar 70%. Serta saat ini Listrik di Provinsi Banten dalam kondisi surplus.
4. Indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Target IPO tahun 2023 0,5 poin dengan realisasi 0,289 poin, capaian kinerja

sebesar 57,8 persen atau rendah. Realisasi IPO dihitung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dimana realisasi nasional sebesar 0,327 (rendah) dan realisasi tertinggi hanya 0,462 pada Provinsi Sulawesi Utara, dimana semua Provinsi dan nasional masih kategori rendah. Kondisi IPO yang demikian disebabkan kondisi kebugaran jasmani anak dan pemuda Indonesia memprihatinkan karena ada perubahan gaya hidup dan pola bermain dari area lapangan ke layar (gadget). Dalam peningkatan kebutuhan gerak bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Banten telah membangun Banten International Stadium (BIS) dan akan memperluas fasilitas olahraga bukan hanya lapangan sepak bola namun olahraga lainnya, BIS akan menjadi ruang dan tempat masyarakat dapat berolah raga sebagai salah satu upaya meningkatkan IPO.

5. Indikator Tingkat Produksi Sektor Perikanan diampu oleh Dinas Perikanan dan kelautan. Target di tahun 2023 246.569 ton terealisasi sebesar 135.849,19 ton capaian sebesar 55,10 persen atau rendah. Kendala dalam peningkatan produksi perikanan yaitu belum meratanya sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang memadai Karena kurangnya armada/perahu nelayan yang bisa berlayar hingga ke samudera sementara hasil tangkapan di dekat pantai makin sedikit, selain itu metode perikanan budidaya mayoritas masih bersifat tradisional belum beralih ke sistem intensif, banyaknya transaksi penjualan ikan di tengah laut karena pelabuhan di Banten belum memadai untuk bersandar kapal-kapal besar dan harga hasil jualnya juga rendah. Meskipun demikian untuk mendukung Tingkat Produktivitas perikanan, pada Dinas kelautan dan Perikanan saat ini sedang membangun sarana dan prasarana pelabuhan terutama di Selatan banten yaitu Pelabuhan Binuangeun dan Cikesik untuk mendukung pendaratan dan peningkatan produksi. Selain itu pada UPTD PPBAPL unit Curug Barang untuk produksi ikan tawarnya melebihi target dan menjadi salah satu komponen untuk menurunkan stunting karena memberikan ikan secara gratis kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan di 8 (delapan) kabupaten/kota.
6. Indikator jumlah unit yang berpredikat Zona Integritas (ZI) diampu oleh Inspektorat target 1 unit terealisasi 0,5 dengan capaian 50 persen. Pembentukan unit Zona Integritas di berikan oleh Kemenpan RB. Tahun 2023 RSUD Banten sudah masuk tahap kandidat. Adapun kendala pada pembentukan ZI yaitu Pengelolaan pengaduan belum di kelola dengan baik seperti pengaduan yang sering berulang. 2. Inovasi tidak berkelanjutan sehingga perbaikan layanan belum signifikan 3. survei kepuasan belum dimanfaatkan untuk perbaikan 4. sosialisasi Pembangunan Internal Zi belum menjelaskan gratifikasi. Kedepan Inspektorat akan 1. Mengusulkan kembali penilaian Unit kerja yang di tetapkan sebagai role model pembangunan ZI untuk lebih berkomitmen dan memperkuat pelaksanaan ZI terutama pada pimpinan Perangkat daerah dan pimpinan Unit kerja dan

seluruh ASN 2. Membangun Unit kerja pada core pelayanan utama lainnya untuk membangun Zona integritas terutama pada unit kerja SMK dan SMA bekerja sama dengan Forpak 3. Tim evaluator internal Pembangunan Zona integritas (Inspektorat) akan lebih aktif secara berkala melakukan pembinaan dan Fasilitasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas setiap triwulan pada unit kerja yang di tetapkan oleh Sekretaris Daerah. Meskipun demikian pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menguatkan pencegahan korupsi dengan menjalin Kerjasama dengan kejaksaan dan KPK. Selain itu nilai Monitoring center for Prevention (MCP) KPK Provinsi Banten di tahun 2023 sebesar 95,10 persen dimana rerata capaian nasional sebesar 91 persen.

3.3. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan konkuren pemerintahan ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 17 (tujuh belas) bidang urusan pemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan

sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Adapun penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan penghubung. Penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas 2 (dua) bidang urusan yakni bidang urusan sekretariat DPRD, dan sekretariat daerah. penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni inspektorat daerah. Penyelenggaraan unsur pemerintahan umum terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni kesatuan bangsa dan politik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 meliputi 165 (seratus enam puluh lima) Program dengan total indikator program 324 (tiga ratus dua puluh empat), 525 (lima ratus dua puluh lima) Kegiatan dan 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) Sub Kegiatan. Rekapitulasi Capaian indikator kinerja program Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tersaji pada tabel 3.5 berikut;

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023

Misi	Jumlah Indikator	Kriteria				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91	84	2	1		4
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	90	83	5	1		1
Urusan Pilihan	64	54	3	1	3	1
Penunjang Urusan Pemerintahan	50	35	1	13		1
Pengawasan Pemerintahan	3	2	1			
Pendukung Urusan Pemerintahan	21	20	1			
Pemerintahan Umum	5	5				
Total Indikator	324	285	13	16	3	7

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 324 (tiga ratus dua puluh empat) Indikator program dengan kriteria capaian kinerja sangat tinggi sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) indikator program, kriteria capaian tinggi sebanyak 13 (tiga belas) indikator program, kriteria capaian kinerja sedang sebanyak 16 (enam belas) indikator program, kriteria capaian kinerja rendah sebanyak 3 (tiga) indikator program, dan kriteria capaian kinerja sangat rendah sebanyak 7 (tujuh) indikator program. Adapun terhadap pencapaian kinerja indikator program dengan kriteria rendah dan sangat rendah, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target 9 persen terealisasi 0 persen. Pada tahun 2023

Belum beroperasi WTP Sindang Heula dan belum terbangunnya infrastruktur SPAM Karian Barat dan Karian Timur. Tahun 2023 telah dilaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR. Meskipun demikian Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Layak di Banten telah mencapai 92,95 persen hasil ini lebih baik dibandingkan nasional yang hanya 91,72 persen.

- b. Indikator cakupan penyediaan prasarana persampahan regional pada Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Banten, dengan target 0,26 persen realisasi 0 persen. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu Review Dokumen Rencana Induk Persampahan (RISPAH) Provinsi Banten, Penyusunan DPPT TPST yang berlokasi di Kecamatan Maja dan Penyusunan Dokumen Feasibility Study Cileles. Tahun 2024 sudah dianggarkan untuk pengadaan lahan TPST. Meskipun demikian Provinsi Banten bekerjasama dengan TPST Kota Serang dalam rangka pengelolaan sampah untuk sampah yang dihasilkan di Kawasan strategis Provinsi Banten.
- c. Indikator persentase penyediaan IPALD yang tersambung pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota. Target 1,61 terealisasi 0 persen. Pada tahun 2023 dilaksanakan Kajian Studi Lahan IPAL Regional Banten. Pembangunan IPAL belum terlaksana karena Dokumen rencana induk belum tersusun dan infrastruktur SPALD Regional belum terbangun. Meskipun begitu pengelolaan air limbah RSUD Banten dan RSUD Malingping telah terbangun dengan baik.
- d. Indikator Persentase penyelesaian simpang tidak sebidang pada program penyelenggaraan jalan, target 25 persen realisasi 0 persen. Pada tahun 2023 Dinas PUPR masih dalam proses menyiapkan *Readiness Criteria* (RC) antara lain pengadaan lahan, dokumen DPPT, dokumen andalalin dan sebagainya. Meskipun begitu kondisi jalan mantap Provinsi Banten telah mencapai 92,23%.
- e. Indikator Rata-rata pengeluaran wisatawan pada program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dari yang ditargetkan sebesar Rp 4.998.799 terealisasi sebesar Rp 2.347.107 dengan capaian kinerja sebesar 46,95 persen. Rendahnya pengeluaran disebabkan adanya keterbatasan daya beli masyarakat (faktor ekonomi global) serta masih rendahnya daya saing produk kerajinan lokal, kuliner dan *home stay* di Provinsi Banten. Selanjutnya akan ditingkatkan daya saing produk pariwisata melalui pengemasan produk hingga pemasaran produk di lokasi-lokasi strategis/lokasi destinasi wisata. Meskipun demikian terjadi peningkatan rata-rata Lama menginap tamu dari 1,42 hari pada Januari 2023 menjadi 1,48 hari pada Januari 2024.

- f. Indikator Persentase desa yang melakukan kerjasama pada Program Peningkatan Kerjasama Desa. Target 1,19 persen realisasi 0 persen. Kondisi ini dialami karena belum optimalnya peran pemangku kebijakan baik Kabupaten maupun Provinsi dalam menjembatani terciptanya kerjasama Desa, Perbedaan sudut pandang, budaya dan adat istiadat suatu Desa, Keterbatasan Sumberdaya, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar Desa, serta lemahnya Lembaga Desa dalam memetakan Potensi Desa. Meskipun demikian pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) Banten mengalami peningkatan dari 0,622 (berkembang) di tahun 2022 meningkat menjadi 0,683 pada tahun 2023.
- g. Indikator Presentase ASN Provinsi Banten yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kondisi ini disebabkan tidak semua peserta mempersiapkan Sertifikasi/ Uji kompetensi secara maksimal baik dengan mengikuti Bimtek maupun pembelajaran mandiri. BPSDMD sudah memfasilitasi bimbingan teknis pra uji kompetensi dengan menghadirkan widyaiswara pembimbing sehingga memudahkan peserta dalam melakukan simulasi maupun konsultasi, namun tidak semua peserta memaksimalkan pelaksanaan Bimtek tersebut. Meskipun demikian nilai indeks profesionalitas dimensi kompetensi aparatur tahun 2023 mengalami peningkatan dari 10,23 poin di 2022 naik menjadi 21,61 poin pada tahun 2023.
- h. Indikator produksi perikanan tangkap pada program pengelolaan perikanan tangkap, dengan target tahun 2023 sebesar 130.338 ton terealisasi sebesar 73.280,25 ton dengan capaian 56,22 persen. Kondisi ini disebabkan belum meratanya sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang memadai, selain itu metode perikanan budidaya mayoritas masih bersifat tradisional belum beralih ke sistem intensif. Meskipun demikian untuk mendukung tingkat produktivitas perikanan pada Dinas kelautan dan Perikanan saat ini sedang membangun sarana dan prasarana pelabuhan terutama di Selatan Banten yaitu Pelabuhan Binuangun dan Cikeusik untuk mendukung pendaratan dan peningkatan produksi perikanan.
- i. Indikator peningkatan jumlah sertifikasi benih (sertifikat) pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan target 409 sertifikat terealisasi 237 sertifikat dengan capaian 57,95 persen. Kondisi ini disebabkan karena tahapan untuk sertifikasi benih prosesnya panjang dan terkadang melewati masa 1 tahun anggaran, selain itu belum semua petani mengurus sertifikat karena proses yang panjang dan pembiayaan yang besar. Meskipun demikian Provinsi Banten salah satu yang menghasilkan produksi padi terbesar ke-8 secara nasional dan mendapat penghargaan Anugrah Adhikarya Pembangunan Pertanian.
- j. Indikator pertumbuhan nilai ekspor non migas pada program pengembangan ekspor target 26,38 terealisasi sebesar 13,39 dengan capaian 50,38 persen. Nilai ekspor barang

non migas secara kumulatif periode Januari-Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 14,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini disebabkan karena Pangsa ekspor sektor industri pengolahan untuk periode Januari - Desember 2023 sedikit mengalami penurunan dibanding periode kumulatif yang sama tahun lalu yakni dari 97,81 persen turun menjadi 97,30 persen. Kemudian pada pangsa ekspor pertanian menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari 1,06 persen menjadi 1,03 persen. Meskipun demikian pada urusan perdagangan telah melakukan Kerjasama misi dagang dengan Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan ekspor. Hal lain dalam rangka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah menerbitkan 1715 Sertifikat TKDN bagi Industri Kecil Menengah dan Sertifikat TKDN bagi Industri Besar. Dalam upaya meningkatkan kuantitas ekspor, sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah menerbitkan 1067 Form SKA bagi 56 perusahaan ekspor. SKA (Preferensi) memberikan kemudahan bagi perusahaan ekspor untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk pada barang ekspor tertentu yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan. Saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten telah memberikan pelayanan penerbitan SKA secara elektronik (e-SKA). Karena dapat diajukan secara online, pengajuan SKA bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga e-SKA dapat mengurangi beban biaya operasional perusahaan. Pelayanan SKA secara online terbukti sangat membantu proses percepatan dan transparansi dalam penerbitan SKA. Banyak pengguna e-SKA terutama eksportir Banten merasakan manfaat dari sistem ini sebagai layanan ekspor.

Selanjutnya rincian capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

3.3.1. Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	1.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	7	7	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100,00				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7266	7266	100,00				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7266	7266	100,00				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	100,00				
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	100,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00				
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1	100,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	100,00				
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	100,00				
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00				
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00				
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00				
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	0,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	9	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	25	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	66	100,00				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	120	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	31	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	40	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	72.06	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	38	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	9	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
						Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B	76	95,00	125,00	Sangat Tinggi			
						Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah / Sederajat	79,84	108,52	135,92	Sangat Tinggi			
						Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah / Sederajat	60,18	85,74	142,47	Sangat Tinggi			
						Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan	19,72	24,18	122,62	Sangat Tinggi			
						Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus	Baik	sangat Baik	100,00	Sangat Tinggi			
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	3	100,00				
					Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	56	56	100,00				
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7	7	100,00				
					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	5	5	100,00				
					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	11	11	100,00				
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	9	9	100,00				
					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	2	2	100,00				
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25	25	100,00				
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5	5	100,00				
				Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	88	88	100,00				
				Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	15	100,00				
				Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1	1	100,00				
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	32	32	100,00				
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	110	110	100,00				
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	35	35	100,00				
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	217495	217495	100,00				
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	550	550	0,00				
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	550	550	100,00				
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900	900	100,00				
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	545	545	100,00				
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	545	545	100,00				
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	2	100,00				
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	3	100,00				Pada Sub ini terbangun 3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
													USB dan 9 USB Tahap 2
					Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	96	96	100,00				
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	2	100,00				
					Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	16	16	100,00				
					Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	15	15	100,00				
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15	15	100,00				
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	100,00				
					Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1	1	100,00				
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	6	100,00				
					Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	5	5	100,00				
					Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5	5	100,00				
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3	3	100,00				
					Pembangunan Ruang / Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5	5	100,00				
					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	9	9	100,00				
					Rehabilitasi Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1	1	100,00				
					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	7	7	100,00				
					Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	2	2	100,00				
					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3	3	100,00				
					Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	2	100,00				
					Rehabilitasi Ruang Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	51	51	100,00				
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3	3	100,00				
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	17	17	100,00				
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	160147	160147	100,00				
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar							
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	74	74	100,00				
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300	300	100,00				
					Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	8	8	100,00				
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	750	750	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	750	750	100,00				
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	746	746	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Khusus								
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	2	100,00				
					Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	8	8	100,00				
					Pembangunan Ruang Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1	1	100,00				
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16	16	100,00				
					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	4	4	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	100,00				
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9	9	100,00				
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2	2	100,00				
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	9	9	100,00				
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	9	9	100,00				
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6360	6360	100,00				
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	109	109	100,00				
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	109	109	100,00		kegiatan ini yang rencananya dilaksanakan di 5 wilayah KCD,, hanya dilaksanakan 1 kali / digabung sehingga terdapat efisiensi honor narasumber dan perjalanan dinas		
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	684	684	100,00				
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	109	109	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	100	100	100,00				
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8	8	100,00				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak									
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	426	426	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	381	381	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	3	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	432	432	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	426	426	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	381	381	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	3	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	432	432	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Khusus								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450	450	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	300	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	350	350	100,00				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang									
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	100	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	300	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	3	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	365	365	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	100	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	200	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	3	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	330	330	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Khusus								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	100	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	65	65	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	3	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	320	320	100,00				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seragon									
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	290	290	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180	180	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	295	295	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	290	290	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	115	115	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	295	295	100,00				
				Pengelolaan Pendidikan Khusus									
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	85	85	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	65	65	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	100	100,00				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang									
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	150	150	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	100	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan	100	100	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	100	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	100	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	100	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Khusus								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50	50	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	50	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	50	100,00				
				Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tansel									
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	170	170	100,00		Terdapat perbedaan nilai dengan laporan bulanan karena temuan inspektorat	Penyerahan STS	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350	350	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	2	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	100	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	400	400	100,00		Terdapat perbedaan nilai dengan laporan bulanan karena temuan inspektorat	Penyerahan STS	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350	350	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	2	100,00				
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300	300	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Khusus								
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	370	370	100,00				
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250	250	100,00				
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	50	100,00				
				UPTD TIKP									
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	240	240					
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1	1					
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	240	240					
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	240	240					
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1	1					
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	240	240					
				Pengelolaan Pendidikan Khusus									
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1	1					
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1	1					
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1	1					
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah	77,44	80,00	103,31	Sangat Tinggi			
						Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus	51,90	51,79	99,78	Sangat Tinggi			
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah								
					Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	7390	7390	100,00				
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	550	550	100,00				
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus								
					Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	1000	1000	100,00				
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	20	20	100,00				
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
						Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran	74,00	65,97	89,15	Tinggi			
					Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi								
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	1	100,00				
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	3	100,00				
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								
						Persentase sekolah yang mendapatkan izin	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2	2	100,00				
					Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2	2	100,00				
					Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat								
					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	42	42	100,00				
					Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	8	8	100,00				
2	1.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
		Dinas Kesehatan											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100,00				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (satuan : dokumen)	5	5	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100,00				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	135	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	10	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100,00				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT RSUD Banten)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (satuan : orang)	218	218	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	2	100,00				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (satuan : laporan)							
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (UPT RSUD Banten)	2	2	100,00				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPT RSUD Malingping)	97	97	100,00		1. Tukin & kelangkaan dr bedah yg tdk dicairkan krn tdk ada rekomendasi dari bkd 2. Potongan tukin dr spesialis, tdk dirubah pada anggaran perubahan	Pada tahun berikutnya anggaran akan disesuaikan	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT RSUD Malingping)	12	12	100,00				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPT RSUD Malingping)	3	3	100,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (UPT RSUD Malingping)	2	2	100,00				
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (UPT RSUD Malingping)	1	1	100,00				
						Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah							
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00				
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	100,00				
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	20	100,00				
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD LABKESDA)	1	1	100,00				
						Administrasi Umum Perangkat Daerah							
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD LABKESDA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PELKES)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT RSUD Banten)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (satuan : paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT RSUD Banten)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (satuan : paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (satuan : paket)	2	2	100,00				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (satuan : unit)	1	1	100,00				
				Pengadaan Mebel (UPTD LABKESDA)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	18	18	100,00				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	6	6	100,00				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	18	18	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (satuan : unit)	3	3	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	92	92	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	356	356	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (satuan : laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (satuan : laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD LABKESDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Bulan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD LABKESDA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Bulan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Bulan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD PELKES)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Bulan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (satuan : laporan)	3	3	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT RSUD Banten)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (satuan : laporan)	1	1	100,00		Gaji dokter spesialis tidak terserap karena tidak adanya tenaga yang mendaftar sampai akhir tahun dan gaji Non ASN nakes yang menjadi	cermat dan akuntebel dalam merencanakan anggaran dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan serta	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											P3K masih teranggarkan	membuat penganggaran pegawai Non ASN sesuai dengan jumlah pegawai	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00		Gaji non ASN yang menjadi P3K masih teranggarkan sehingga double anggaran	Pada tahun berikutnya anggaran akan disesuaikan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (satuan : unit)	2	2	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (satuan : unit)	50	50	100		Komponen terbanyak adalah Bahan Bakar Minyak Genset yang tidak diserap karena sesuai kebutuhan	mengitung dengan cermat kebutuhan anggaran sesuai penggunaan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	8	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (satuan : unit)	3	3	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD LABKESDA)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Bulan)	15	15	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	129	129	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PELKES)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Bulan)		0	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)		0	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD PELKES)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	100	100	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (satuan : unit)	11	11	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (satuan : unit)	33	33	100		Komponen terbanyak adalah Bahan Bakar Minyak Genset yang tidak diserap karena sesuai kebutuhan	mengitung dengan cermat kebutuhan anggaran sesuai penggunaan	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (satuan : unit)	1	1	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	26	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	124	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41	41	100				
					Peningkatan Pelayanan BLUD								
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD Banten)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (satuan : unit kerja)	1	1	100,00				
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD Malingping)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100,00				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
						Cakupan Kualitas Keluarga Sehat (%)	57	78,50	137,72	Sangat Tinggi	jumlah kelahiran hidup datanya tidak up to date	koordinasi ke Kab/Kota	tidak ada
						Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) (%)	86	89,40	103,95	Sangat Tinggi			
						Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu (unit)	239	252,00	105,44	Sangat Tinggi			
						Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin (%)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana (%)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (%)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (%)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (%)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi (%)	79,20	91,00	114,90	Sangat Tinggi			
						Rasio Daya Tampung RS Rujukan (Rasio)	0,13	0,13	100,00	Sangat Tinggi			
						Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (parameter)	118	118,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Persentase Standar Bagian Penunjang sebagai RS Pendidikan	50	60,00	120,00	Sangat Tinggi			
							Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan	50	50,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Persentase Standar Bagian Pelayanan Keperawatan sebagai RS Pendidikan	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan	50	50,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana,dan alat kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
					Pengembangan Rumah Sakit			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (unit)	2	2	100,00			
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (unit)	2	2	100,00			
					Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk, dan Habis Pakai Lainnya			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (paket)	2	2	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan obat,vaksin,makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan (paket)	4	4	100,00				
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (unit)	1	1	100,00				
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD LABKESDA)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (unit)	10	10	100,00				
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (UPTD LABKESDA)	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	26	26	100,00				
					Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (UPTD LABKESDA)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (paket)	5	5	100,00				
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (satuan : unit)	2	2	100,00				
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (UPT RSUD Banten)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (satuan : unit)	2	2	100,00				
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	60	60	89,09		Efisiensi dari anggaran DAK tahun 2023 yakni Pagu Rp. 25.095.631.00 tetapi setelah dilakukan asistensi dengan kementrian Kesehatan dan Bappenas maka Pagu yang disetujui adalah Rp. 22.063.880.000,- sehingga anggaran tidak bisa di serap maksimal	penyusunan DAK yang cermat sejak pengusulan Rencana Kegiatan di aplikasi Krisna Kementerian Kesehatan dengan memperhitungkan dokumen pendukung yang sudah lengkap	
					Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (UPT RSUD Banten)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	9	9	98,50				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (UPT RSUD Banten)	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (satuan : unit)	413354	413354	99,99				
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT RSUD Banten)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan (satuan : paket)	4	4	100,00				
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6	6	100,00				
					Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	58	58	100,00				
					Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	5	5	100,00				
					Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	273	273	100,00				
					Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19	19	100,00				
					Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	4	4	100,00				
					Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2	2	100,00				
					Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	3300	3300	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	300	300	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	3	3	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (dokumen)	1	1	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	2	2	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	8	8	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	8	8	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (dokumen)	2	2	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	11	11	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (dokumen)	8	8	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (dokumen)	7	7	100,00			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (orang)	27	27	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dokumen)	3	3	100,00				
					umlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (dokumen)	2	2	100,00				
					Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (dokumen)	3	3	100,00				
					Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (dokumen)	8	8	100,00				
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (unit)	7	7	100,00				
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan (UPT RSUD Banten)	umlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan (dokumen)	4	4	100,00				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	11	11	100,00				
					Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	17	17	100,00				
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8	8	100,00				
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Darurat Terpadu (SPGDT) (UPT RSUD Malingping)	Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
					Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	5	100,00				
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	7	7	100,00				
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)	106	106	100,00				
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (unit)	40	40	100,00				
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (satuan : dokumen)	2	2	100,00		Adanya Efisiensi Harga Satuan pada saat kontrak cetak profil Untuk Realisasi keuangannya tidak bisa 100%, tetapi Realisasi Fisik sudah sampai 100%	Realisasi kegiatan dilakukan pada awal tahun agar jika ada permasalahan dapat diperbaiki di anggaran perubahan	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT RSUD Banten)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (UPT RSUD Banten)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia (satuan : unit)	29	29	100,00				
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT RSUD Malingping)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	100,00				
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
						Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan (orang)	470	470,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPT Pelatihan Kesehatan (orang)	360	360,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (orang)	336	336	100,00				
					Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (orang)	336	336	100,00				
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (orang)	360	360	100,00				
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokumen)	8	8	100,00				
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI , ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan (persen)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan SaranaPerusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan (sarana)	55	55	100,00				
					Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)								
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (sarana)	50	50	100,00				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (kelompok masyarakat)	13	13	100,00	Sangat Tinggi			
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								
					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (dokumen)	2	2	100,00				
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi								
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dokumen)	2	2	100,00				
3	1.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : %)	7	7	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2	100,00		Efisiensi		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Satuan : Dokumen)							
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00		Efisiensi		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	4	4	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dar pagu		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang/ Bulan)	201	201	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18	18	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)							
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	4	4	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)	33	33	100,00		Honor narasumber tidak terserap (Kendala Waktu)	Diperlukan manajemen waktu yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00		Efisiensi harga dari pagu		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00		Efisiensi		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	3	3	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00		Efisiensi		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	3	3	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan : Unit)	0	0	0,00				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	69	69	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	7	7	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	574	202	35,19		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu untuk asuransi dan Pemeliharaan Roda Empat Pajak tidak terserap karena nilai pagu tidak sesuai dengan aplikasi disamsat, perbedaan karena tidak menghitung pajak tertunggak	Perencanaan perlu dilakukan dengan cermat	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	167	167	100,00		Efisiensi		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	100,00		Efisiensi nilai terkontrak dari pagu		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)							
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	23	23	100,00		Efisiensi		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	3	3	100,00		Efisiensi		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	21	21	100,00		Efisiensi		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00		Efisiensi		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	7	7	100,00		Efisiensi		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan : Unit)	0	0	0,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	19	19	100,00		Efisiensi pengadaan laptop		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	8	100,00		Efisiensi		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100,00		Efisiensi		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21	21	100,00		Efisiensi		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/Jasa		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/Jasa		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	5	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/Jasa		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/Jasa		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/Jasa		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	19	19	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/ Jasa	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	49	49	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/ Jasa	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi Belanja	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/ Jasa	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	48	48	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/ Jasa	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	4	4	100,00		Tidak Ada Kendala, Efisiensi Belanja dari hasil negosiasi pada proses pengadaan barang/ Jasa	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1	1	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)							
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	100,00				
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
						Pengadaan Mebel	8	8	100,00				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34	34	100,00				
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100,00				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100,00		Adanya efesiensi dari sisa Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan, karena seluruh tagihan telah di bayarkan sesuai dengan jumlah tagihan pemakaian pada setiap bulannya.		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	7	100,00				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100,00		Adanya efesiensi dari Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	20	20	100,00		Tidak Ada Kendala, efesiensi dari sisa		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)					Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Khusus		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan : Unit)	3	3	100,00		Tidak Ada Kendala, efesiensi dari sisa Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00		Efisiensi nilai kontrak Belanja Alat Listrik		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	3	3	100,00		Efisiensi nilai kontrak dari nilai pagu		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00		Efisiensi nilai kontrak dari nilai pagu		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)	7	7	100,00		Efisiensi		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : Laporan)	1	1	100,00		Efisiensi		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan : Unit)	-	-	-				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	111	111	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	5	5	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	5	5	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	2	2	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi Honor		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	17	17	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan : Unit)	2	2	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	51	51	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Satuan : Unit)	4	4	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	6	6	100,00		Efisien Nilai Kontrak dari nilai pagu		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	20	20	100,00				
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00		Sisa Anggaran dan Dikarenakan adanya selisih harga DPA dan harga di ekatalog		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	12	12	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	4	4	100,00		Sisa Anggaran dan Dikarenakan adanya selisih harga DPA dan harga di ekatalog		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	56	56	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan : Unit)	68	31	45,59		Dikarenakan adanya selisih harga DPA dan harga di ekatalog dan adanya persetujuan pembatalan paket oleh PPK		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	21	0	0,00		Adanya persetujuan Pembatalan Paket oleh PPK		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	105	105	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	3	3	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	228	228	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	29	29	100,00		Negosiasi Terhadap Harga Satuan		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan : Unit)	76	76	100,00				
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	68	68	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Satuan : Unit)	8	8	100,00				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	-	-	-				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00		Dikarenakan ada Selisih Harga DPA dan harga di ekatalog, serta adanya Negoisasi Antara Penyedia dan PBJ		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00		Dikarenakan ada Selisih Harga DPA dan harga di ekatalog, serta adanya Negoisasi Antara Penyedia dan PBJ		
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan : Paket)	3	3	100,00		Dikarenakan ada Selisih Harga DPA dan harga di ekatalog		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	27	27	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	29	29	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan : Unit)	39	39	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	71	71	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	4	4	100,00				
					Administrasi Kepegawaian								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	4	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)							
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	4	4	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	42	42	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	26	26	100,00				
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	4	4	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	30	30	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	7	7	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan : Unit)	24	24	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Satuan : Unit)	5	5	100,00				
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								
					Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Satuan : %)	16,67	16,67	100,00	Sangat Tinggi			
				Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi								
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Satuan : Sistem Jaringan)	1	1	100,00		Efisiensi : Sisa kontrak konstruksi		
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
					Persentase Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi (Satuan : %)	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi			
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi								
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00		Efisiensi		
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	8	8	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Satuan : Gedung)						
						Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00		Efisiensi waktu	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN									
							Persentase Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Bangunan di Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	63,64	50	78,57	Tinggi		
						Penyelenggaraan Penataan Bangunan di Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Satuan : Dokumen)	21	21	100,00			
						Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Satuan : Kawasan)	5	5	100,00		Efisiensi	
						Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Satuan : Kawasan)	5	5	100,00			
						Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Satuan : Kawasan)	2	2	100,00			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
							Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air	9,01	0	0,00	Sangat Rendah	Belum beroperasionalnya WTP	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						minum curah lintas kabupaten/kota (Satuan : %)					Sindang Heula dan belum terbangunnya infrastruktur SPAM Karian Barat dan Karian Timur		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Satuan : Dokumen)	5	5	100,00		Efisiensi		
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara (Satuan : Unit)	1	1	100,00		Efisiensi		
					Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Satuan : Ha)	0,72	0	0,00		Efisiensi dan pelaksanaan DPPT Sindangheula tidak ada kegiatan penyelenggaraan lahan		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
						Cakupan penyediaan prasarana persampahan regional (Satuan : %)	0,26	0,26	100,00	Sangat Tinggi	Sampai dengan Tahun 2023 belum terbangun TPST Regional yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu Review Dokumen Rencana Induk Persampahan (RISPAH) Provinsi Banten, Penyusunan DPPT TPST yang berlokasi di Kecamatan Maja dan Penyusunan Dokumen Feasibility Study Cileles		
						Pengelolaan sampah di Kawasan Strategis Provinsi (KP3B, BIS dan Banten Lama) diangkut ke TPA Cilowong, dengan membayar retribusi ke DLH Kota Serang				Sangat Rendah			
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	3	3	100,00		Efisiensi		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Satuan : Dokumen)							
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
						Persentase penyediaan IPALD yang tersambung (Satuan : %)	1,61	0	0,00	Sangat Rendah	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota belum terlaksana karena Dokumen rencana induk belum tersusun dan infrastruktur SPALD Regional belum terbangun.		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional								
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Satuan : Paket)	1	1	100,00		Efisiensi		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
						Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	94	92,23	98,12	Sangat Tinggi	Pada Tahun 2023 terdapat penambahan ruas jalan kabupaten/kota yang beralih status menjadi ruas jalan kewenangan Provinsi Banten dengan kondisi perkerasan ruas jalan rusak sehingga capaian terhadap target jalan dan jembatan mantap belum tercapai.	Pada Tahun 2024 Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk pananganan jalan ex kewenangan kabupaten/kota.	
						Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	95	86,95	91,52	Sangat Tinggi			
						Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya (Satuan : %)	83,13	80,51	96,85	Sangat Tinggi			
						Persentase Penyelesaian Jalan Baru (Satuan : %)	16	15,15	94,70	Sangat Tinggi	Ruas Banten Lama-Tonjong 1,5 Km, Ruas Cikeusal-Boru (Lahan) 1 Km		
						Persentase Penyelesaian simpang tidak sebidang (Satuan : %)	25	0	0,00	Sangat Rendah	Masih menyiapkan Readiness Criteria (RC) antara lain pengadaan lahan, dokumen DPPT, dokumen andalalin dan sebagainya..		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi									
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan (Satuan : M2)	17.968	11.772	65,52		Pada ruas Pakupatan - Palima : 1. Kelurahan Sukawana terdapat 2 bidang yang belum terbayarkan karena pemilik yang kurang kooperatif 2. Kelurahan Cilaku, hasil penilaian KJPP baru diserahkan pada akhir Desember 2023		
					Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Satuan : Km)	0,73	0,73	100,00				
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (Satuan : Km)	10,34	10,45	101,06				
					Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur (Satuan : Km)	0	0	100,00		Kewajiban pembayaran		
					Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Satuan : Km)	20,27	20,25	99,90				
					Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (146,95 m) (Satuan : Paket)	6	6	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (4 m) (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Satuan : Dokumen)	31	31	100,00				
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi UPTD PJJ Tangerang								
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00		Efisiensi harga satuan		
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Satuan : Km)	14,827	14,827	100,00		Efisiensi Nilai Kontrak Harga Satuan di E Katalog		
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : Km)	140	140	100,00		Efisiensi Nilai Kontrak Harga Satuan di E Katalog dan Efisiensi Belanja Bbm.		
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : M)	1.141,125	1.141,125	100,00		Efisiensi Nilai Kontrak Dikarenakan ada Selisih Harga DPA dan harga di ekatalog.		
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi UPTD PJJ Serang-Cilegon								
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Satuan : Km)	15.157	15.157	100,00				
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : Km)	139.567	139.567	100,00				
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : M)	1.333,50	1.333,50	100,00				
					Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana (Satuan : M)	48.007	48.007	100,00				
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi UPTD PJJ Pandeglang								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Satuan : Km)	10,23	10,23	100,00				
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : Km)	153,54	153,54	100,00				
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : M)	1.490	1.490	100,00				
					Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana (Satuan : M)	48,01	48,01	100,00				
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi UPTD PJJ Lebak								
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Satuan : Km)	11,435	11,435	100,00				
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : Km)	179,84	179,84	100,00				
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Satuan : M)	1.119,11	1.119,11	100,00				
					Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana (Satuan : M)	192	192	100,00				
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
						Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi (Satuan : %)	21,69	26,06	120,15	Sangat Tinggi			
						Prosentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tahun 2023 UPTD Lab telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga mengalami peningkatan permintaan jasa pengujian bahan dan konstruksi bangunan yang sangat signifikan.		
					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Satuan : Orang)	400	400	100,00				
					Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi (Satuan : Orang)	50	50	100,00				
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Satuan : Orang)	300	300	100,00				
					Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi								
					Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (Satuan : Dokumen)	8	8	100,00				
					Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (UPTD PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI) (Satuan : Laporan)	1	1	100,00		Efisiensi perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebijakan internal untuk lebih fokus pada pekerjaan peningkatan jumlah pengujian bahan bangunan serta penambahan ruang lingkup akreditasi Laboratorium Pengujian.		
					Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (UPTD PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN	1	1	100,00		Efisiensi : 1. Realisasi harga satuan dibawah harga pagu DPA 2. Negosiasi pada		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						DAN INFORMASI KONSTRUKSI) (Satuan : Dokumen)					proses pengadaan barang/ Jasa		
						Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi							
						Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	6	6	100,00				
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	6	6	100,00		Efesiensi belanja		
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
						Persentase penanganan situ/embung (Satuan : %)	0,73	0,73	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase penanganan abrasi (Satuan : %)	74,39	68,60	92,22	Sangat Tinggi	Tidak ada pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai pada tahun 2023		
						Persentase penanganan banjir (Satuan : %)	43,20	28,66	66,34	Sedang	Tidak ada pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai pada tahun 2023		
						Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (Satuan : %)	63,10	62,25	98,65	Sangat Tinggi			
						Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD DAS Ciujung-Cidanau	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD DAS Ciliman-Cisawarna	100	100	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang Disusun (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00		Efisiensi Belanja		
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00		Efisiensi anggaran		
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Satuan : Dokumen)	5	5	100,00		Efisiensi Belanja		
				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Satuan : Unit)	2	2	100,00		Efisiensi Belanja		
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Satuan : Lembaga)	3	0	0,00		SK Tim Pembentukan Dewan SDA belum di Tanda tangani oleh Gubernur Banten sehingga beberapa pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai target, seperti Peringatan Hari Air Dunia		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)								
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan : Unit)	7	7	100,00				
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (Satuan : Km)	1,2	1,2	100,00		Tidak Ada Kendala. Terdapat sisa anggaran berupa efisiensi belanja		
				Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan : Km)	1,8	1,8	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)								
					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan : Unit)	12	12	100,00				
					Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (Satuan : Km)	1,25	1,25	100,00				
					Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Operasi dan Pemeliharaan Sungai (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)	Panjang Sungai yang Dipelihara (Satuan : Km)	11,33	11,33	100,00				
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN-CISADANE)								
					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN-CISADANE)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan : Unit)	17	17	100,00		Sisa Nilai Kontrak dari beberapa kegiatan dan efisiensi belanja		
					Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN-CISADANE)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00		Efisiensi Belanja		
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Satuan : Dokumen)	18	18	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Satuan : Km)	7,2	7,2	100,00				
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (Satuan : M)	173	173	100,00				
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (Satuan : DI)	20	20	100,00				
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)								
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan : Km)	94,68	94,68	100,00		Tidak Ada Kendala. Terdapat sisa anggaran berupa efisiensi anggaran belanja		
					Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Satuan : Bendung)	4	4	100,00		Tidak Ada Kendala. Terdapat sisa anggaran berupa efisiensi anggaran belanja		
					Operasional Unit Pengelola Irigasi (UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU)	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (Satuan : Unit)	9	9	100,00				
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)								
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan : Km)	228,957	228,957	100,00				
					Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Satuan : Bendung)	11	11	100,00		Anggaran yang tidak terserap antara lain: efisiensi belanja		
					Operasional Unit Pengelola Irigasi (UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA)	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (Satuan : Unit)	11	11	100,00				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang (Satuan : %)	20	20	100,00	Sangat Tinggi	Target pada renstra adalah tersusunnya 2 dokumen namun pada Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan kajian teknis KSP sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari: 1. Ranpergub KSP Seragon, 2. KSP Kawasan Serang Utara Terpadu 3. KSP koridor Pantai Barat Banten		
						Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sesuai amanat permen ATR/BPN No 15 Tahun 2021, rapat koordinasi dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, namun Dinas PUPR telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali		
						Persentase Ketidak Sesuaian Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana tata Ruang (Satuan : %)	71	1,29	198,18	Sangat Tinggi	Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan ruang semakin kecil nilainya maka semakin baik capaiannya karena diartikan bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap tata ruang hanya sedikit.		
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi								
					Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Satuan : Dokumen)	4	4	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang								
					Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (Satuan : Laporan)	2	2	100,00		Anggaran tidak terserap 100% namun semua target kinerja mencapai 100%. Anggaran yang tidak terserap antara lain efisiensi belanja		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Satuan : Dokumen)	4	4	100,00		Efesiensi dari belanja		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (Satuan : Dokumen)	3	3	100,00		Efisiensi dan kelanjutan dari hasil pekerjaan yang lain. Terkendala dalam mencari data yang diperlukan.		
4	1.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			100	92,07	92,07	Sangat Tinggi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat belanja peralatan yang digunakan untuk untuk Pemeliharaan di kawasan banten lama dan pemeliharaan di KP3B Tahun 2023 sudah menjadi kewenangan Dinas PUPR		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100,00				
					Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58	58	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah							
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Korodinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD							
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	3	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3	2	2	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	16	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	164	164	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00				
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37	16	43,24				
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerinthan daerah							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	17	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	56	56	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
					Sub Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	376	297	78,99				
					Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	100,00				
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	100,00				
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
						Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	43,50	47,27	108,66	Sangat Tinggi	Targe kinerja = $100/531*100\% = 18,83\%$ Target DPA tahun 2022 = $131/531*100\% = 24,67\%$ Target s.d tahun 2023 = $18,83\% + 24,67\% = 45,50\%$ ket: 131 Target PA tahun 2022 100 target tahun 2023 531 base line selama 5 thn (2022-2026) Realisasi kinerja = $120/531*100\% = 22,607\%$ Target DPA (sesuai resntra) tahun 2022 = $131/531*100\% = 24,67\%$ Realisasi s.d tahun 2023 = $22,60\%+24,67\% = 47,27\%$ ket: 120 realisasi tahun 2023 531 base line selama 5 thn (2022-2026)		
					Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	3	3	100,00				
					Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2	2	100,00				
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	1	100,00				
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	100,00				
					Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	1	1	100,00				
					Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	1	100,00				
					Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							
					Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	50	50	100,00				
					Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							
					Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	11	11	100,00				
					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	120	120	100,00				
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	262	262	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							
				Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1	1	100,00				
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
					Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	109,42	109,42	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai Targe kinerja = $100/531 \times 100\% = 18,83\%$ Target DPA tahun 2022 = $131/531 \times 100\% = 24,67\%$ Target s.d tahun 2023 = $18,83\% + 24,67\% = 43,50\%$ ket: 131 Target DPA tahun 2022 100 target tahun 2023 531 base line selama 5 thn (2022-2026) Realisasi kinerja = $120/531 \times 100\% = 22,60\%$ Target DPA (sesuai resntra) tahun 2022 = $131/531 \times 100\% = 24,67\%$ Realisasi s.d tahun 2023 = $22,60\% + 24,67\% = 47,27\%$ ket: 120 realisasi thn 2023 531 base line selama 5 thn (2022-2026)		
				Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh							
				Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2	1	50,00				
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	100,00				
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani							
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	10	10	100,00				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19	19	100,00				
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	247	0	0,00				
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	109,42	109,42	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
					Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	91,73	99,59	108,57	Sangat Tinggi	Target telah tercapai Target kinerja = $50/1813 \times 100\% = 2,76\%$ Target tahun 2022 = 88,97% Target s.d tahun 2023 = $2,76\% + 88,97\% = 91,73\%$ ket: 50 target tahun 2023 1813 base line selama 5 thn (2022-2026) Realisasi kinerja = $1610/1619 \times 100\% = 99,44\%$ Realisasi s.d tahun 2023 = 99,44% ket: 1610 realisasi th 2023 1619 target th 2023		
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani							
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	17	17	100,00				
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1919	1910	99,53				
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	242	242	100,00				
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
					Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai		
				Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah							

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	1	1	100,00				
				PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								
					Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yag selesai tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai		
				Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi							
				Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1	1	100,00				
				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
					Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai, dikarenakan pekerjaan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, namun masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota) Realisasi = $100/100 \times 100\% = 100\%$		
				Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
				Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dalam rangka Reforma Agraria.							
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH									
						Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target telah tercapai, dikarenakan pekerjaan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, namun masih menjadi kewenangan Pusat (Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten Kota) Realisasi = $100/100 \times 100\% = 100\%$		
					Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1	1	100,00				
5	1.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
				Satuan Polisi Pamong Praja									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	99,30	99,30	Sangat Tinggi	Satpol PP belum mempunyai gedung kantor sendiri, sehingga operasional kantor tidak optimal	mengusulkan anggaran pemb. Gedung kantor satpol pp pada renja 2025	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kurangnya SDM (sesuai kualifikasi kelas jabatan)	Mengusulkan penambahan SDM yang berkualitas	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)	4	4	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)							
					Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	3	3	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi dan Pelaporan dari Kegiatan tidak tepat waktu dari beberapa kegiatan sehingga penatausahaan keuangan kurang optimal	Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dan peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang/ 14 Bulan)	87	87	100,00		Kelebihan Penganggaran Biaya Accres Gaji	Pada tahun berikutnya anggaran akan disesuaikan	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur	mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)	0	0	-		Optimalisasi Anggaran		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Satuan : Unit)	-	-	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	143	142	99,30		1 Unit pengadaan tidak terserap dikarenakan kelebihan kebutuhan	Pada tahun berikutnya anggaran akan disesuaikan dengan Kebutuhan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	4	4	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	60	60	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	105	105	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Tidak ada
						Cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional trantibum	Mengusulkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana operasional trantibumlinas	
						Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100	100	100,00	Sangat Tinggi	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perda dan perkada	Meningkatkan sosialisasi perda dan perkada	
						Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas PPNS se Provinsi Banten	Membentuk Sekretariat PPNS pada Satpol PP di tahun 2024	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional trantibum	Mengusulkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana operasional trantibumlinas	
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Satuan : Kasus)	272	272	100,00				
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Satuan : Kasus)	228	228	100,00				
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yangDitingkatkan Kapasitasnya (Satuan : Orang)	445	445	100,00				
				Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama AntarLembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Satuan : Dokumen)	0	0	-		Optimalisasi Anggaran		
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Satuan : Unit)	4	4	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Satuan : Dokumen)	0	0	-		Optimalisasi Anggaran		
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Satuan : Lembaga)	3	3	100,00				
					Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perda dan perkada	Membentuk Sekretariat PPNS pada Satpol PP di tahun 2024	
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan : Laporan)	3	3	100,00				
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan : Laporan)	8	8	100,00				
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (Satuan : Laporan)	2	2	100,00				
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						Kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas PPNS se Provinsi Banten	Membentuk Sekretariat PPNS pada Satpol PP di tahun 2024	
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Satuan : Laporan)	3	3	100,00				
					Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat	7	7	100,00				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP (Satuan : Dokumen)							
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
					Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana kebakaran	mengusulkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana kebakaran	Tidak ada
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						Kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana kebakaran	mengusulkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana kebakaran	
				Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
				Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						<i>Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Satuan : Dokumen)</i>							
					<i>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi</i>	<i>Jumlah Dokumen secara PeriodikPenyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Satuan : Dokumen)</i>	1	1	100,00				
					<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait (Satuan : Unit)</i>	12	12	100,00		<i>Adanya Efisiensi Kontrak dan Anggaran Penunjang, tetapi Realisasi Fisik 100%</i>	<i>Pada tahun berikutnya anggaran akan disesuaikan</i>	
					<i>Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Satuan : Orang)</i>	30	30	100,00				
					<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan : Dokumen)</i>	1	1	100,00				
					<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi</i>	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) (Satuan : Kab/Kota)</i>	1	1	100,00				
					<i>Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran Serta Penyelamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Satuan : Dokumen)</i>	1	1	100,00				
					<i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap</i>	50	50	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							<i>Bencana Rumah Tangga (Satuan : Keluarga)</i>							
						Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						Kurangnya pengetahuan masyarakat ttg potensi bencana kebakaran	meningkatkan pembinaan melalui sosialisasi dan pengawasan ke kabupaten kota	
						<i>Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan : Laporan)</i>	1	1	100,00				
						<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan : Laporan)</i>	1	1	100,00				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
				Program Penanggulangan Bencana Daerah										
							Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dokumen Belum dilegalkan dalam bentuk peraturan/keputusan	Sudah dilakukan koordinasi dan usulan ke biro hukum terkait legalisasi dokumen Kebencanaan	
							Persentase Penanganan Pra Bencana (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
							Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi							
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan BencanaProvinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana Lintas Kabupaten/Kota	770	770	100,00				
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kab/Kota yang memperoleh	1040	1040	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana							
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6	6	100,00		Efisiensi Perjalanan Dinas yang tidak terserap		
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung diri terhadap bencana	13177	13177	100,00		Efisiensi dari harga kontrak barang dan jasa		
					Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	-	-	0,00		Sub kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran di optimalisasi		
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2	2	100,00				
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	560	560	100,00				
					Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	2	2	100,00				
					Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	3	3	100,00				
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
					Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	3	3	100,00				
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	3	3	100,00				
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	34500	34500	100,00				
					Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	1	100,00				
					Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							
					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Bencana di Daerah	2	2	100,00				
					Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2	2	100,00				
					Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan Informasi Kebencanaan	3	3	100,00				
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	10	10	100,00				
					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3450	3450	100,00				
					Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasma) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang disusun	2	0	0,00		Pada tahun anggaran 2024 telah direncanakan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah, pembentukan Tim JITUPASNA Provinsi Banten		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
						Persentase Ketercapaian dari seluruh kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	46	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00				
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	100,00		kegiatan dilaksanakan tidak menggunakan serapan anggaran		
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100,00				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	#DIV/0!		Sub Kegiatan tidak dilaksanakan karena optimalisasi		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00				
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00			
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00	kegiatan dilaksanakan tidak menggunakan serapan anggaran		
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00	kegiatan dilaksanakan tidak menggunakan serapan anggaran		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0,00	sub Kegiatan tidak dilaksanakan karena dioptimalisasi		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	1	1	100,00			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	30	100,00			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	Anggaran tidak diserap karna perjalanan dinas dalam kota serang		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	5	100,00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	47	47	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	99	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
6	1.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
		Dinas Sosial		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	101,05	101,05	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)	9	12	133,33				
					Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)							
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	3	5	166,67				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang/ 14 Bulan)	78	78	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	5	5	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	2	2	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)	77	2	2,60				
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan : Orang)	77	72	93,51				
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	-	-	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Dinas Jabatan yang Disediakan (Satuan : Unit)							
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	-	-				
						Pengadaan Mebel	1	1	100,00				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	100,00				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	100,00				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100,00				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	100,00				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	20	100,00				
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112	112	100,00				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	5	100,00				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100,00				
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00			
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Paket)	1	1	100,00			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	10	9	90,00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Laporan)	1	1	100,00			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	1	1	100,00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	8	8	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	17	17	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan :Dokumen)	2	2	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan :Laporan)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan :Laporan)	1	1	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan :Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan :Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan :Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan :Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan :Paket)	1	1	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan :Unit)	9	9	100,00				
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan :Unit)	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan :Laporan)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan :Laporan)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan :Unit)	6	6	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan :Unit)	25	25	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan :Unit)	6	6	100,00				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
						Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial (Satuan : %)	100	154,03	154,03	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi								
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	850	918	108,00				
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan : Orang)	155	155	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Satuan : Keluarga)	30	40	133,33				
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Satuan : Lembaga)	7	13	185,71				
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN									
						Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal								
					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Orang)	60	60	100,00				
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
						Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti								
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	600	598	99,67				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)							
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	87	87	100,00				
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	60	60	100,00				
					Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	400	400	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti								
					Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	600	583	97,17				
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	-		100,00				
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		120	0	-				
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	16	30	187,50				
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	16	7	43,75				
					Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	30	30	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi	1	1	100,00				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Satuan : Dokumen)						
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti							
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	600	3585	597,50			
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	270	270	100,00			
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	16	32	200,00			
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	16	14	87,50			
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00			
					Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti							
					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	180	235	130,56			
					Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Satuan : Orang)	125	154	123,20			
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti								
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti								
					Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	20	25	125,00				
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	20	25	125,00				
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	20	25	125,00				
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	20	25	125,00				
					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	20	25	125,00				
					Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	20	25	125,00				
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	20	25	125,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Satuan :Dokumen)	1	1	100,00				
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial								
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	60	60	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)							
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	60	60	100,00				
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	60	60	100,00				
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	60	60	100,00				
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	10	10	100,00				
					Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	38	38	100,00				
					Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Satuan :Orang)	18	17	94,44				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Satuan :Dokumen)	1	1	100,00				
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti								
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	30	40	133,33				
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	30	40	133,33				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	30 40	133,33				
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	30 40	133,33				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Satuan : Dokumen)	1 1	100,00				
					Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti							
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	50 40	80,00				
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	50 40	80,00				
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	50 40	80,00				
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	50 40	80,00				
					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	50 40	80,00				
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	25 17	68,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	50	40	80,00				
					Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	50	40	80,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
						Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Satuan : %)	100	95,59	95,59	Sangat Tinggi			
						Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal								
					Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	5	27	540,00				
					Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Satuan : Orang)	5	1	20,00				
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi								
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000	47.795	95,59				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kewenangan Provinsi (Satuan : Keluarga)							
					Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan : Keluarga)	100	100	100,00				
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	720	6200	861,11				
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
						Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi									
					Penyediaan Permakananan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	400	400	100,00				
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	300	500	166,67				
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Satuan : Unit)	120	120	100,00				
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	400	400	100,00				
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Satuan : orang)	300	300	100,00				

3.3.2. Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
I	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
							Kualitas pengembangan kebudayaan	Sangat Baik	Sangat Baik	100,00	Sangat Tinggi					
					PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI											
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	2	2	100,00		daya serap rendah pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas karena disesuaikan dengan kebutuhan.				
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2	2	100,00		daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan.				
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara			100,00						
					PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN / KOTA DALAM DAERAH PROVINSI											
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	3	3	100,00						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan							
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	1	100,00				
					Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10	10	100,00				
					PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI								
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	2	100,00				
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	1	100,00				
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1	1	100,00		daya serap rendah pada Belanja Modal Bangunan Peninggalan karena belum ada acc Pj Gubernur (nota dinas kadis tanggal 3 agustus no. 430/2724/dindikbud/2 023).		
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
						Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	65	65,00	100,00	Sangat Tinggi			
					PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI								
					Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3	3	100,00				
					Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	1	100,00		- SK tim ahli cagar budaya belum diterbitkan - daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dikarenakan terdapat		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											efisiensi dari biaya perjalanan dinas yang bersifat at - Cost.		
						PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI							
						Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2	2	100,00			
						Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2	2	100,00			
						Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2	2	100,00			
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	4	4	100,00	- karena kurangnya tenaga pelestari tingkat provinsi - tidak diserap pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Belanja Perjalanan Dinas dikarenakan terdapat efisiensi dari biaya perjalanan dinas yang bersifat at - Cost.		
						PENERBITAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH PROVINSI							
						Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	1	1	100,00			
						Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1	1	100,00	daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas karena koordinasi banyak dilakukan secara daring.		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							
							Pertumbuhan Jumlah Pengunjung museum dan Taman Budaya provinsi	20	41,07	100,00	Sangat Tinggi		
						Pengelolaan Museum Provinsi							
						Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	35	35	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1	1	100,00				
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	20	20	100,00		daya serap rendah pada Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) karena menyesuaikan dengan harga pasar dan sisa dari pengadaan.		
					Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1	1	100,00				
2	2.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1						
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1						
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12						
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12						
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1						
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1						
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1						
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5						
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	174						
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1						
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1						
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Paket)	1						
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1						
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	umlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1						
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1						
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1						
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1						
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Latihan Kerja								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1						
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Latihan Kerja								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1						
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1						
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6						
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	72						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12						
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1						
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang,								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak								
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12						
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8						
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1						
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang								
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12						
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4						
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang								
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12						
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									
						Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	68,26	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu money, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro (Orang)	100						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										
							Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja	6,64	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
							Capaian Produktivitas Tenaga Kerja	4,96	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
					Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	1296						
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan	9						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)							
					Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja								
					Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	20						
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah								
					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	60						
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi								
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	1						
					Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja								
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	1040						
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1						
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
						Capaian Kesempatan Kerja	13,61	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
					Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
						Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	400						
						Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	400						
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	700						
						Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	75						
						Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	120						
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									
						Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1						
						Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Orang)	1700						
						Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	10000						
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi									
						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	632						
						Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	120						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										
							Capaian Hubungan Industrial	4,19	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
							Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
							Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												pemeriksaan baik itu monev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota									
					Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Teraftar di WLKP Online (Perusahaan)	200					
					Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Teraftar Di WLKP Online (Perusahaan)	200					
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	1					
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah									
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10					
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	8					
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)								
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	1						
					Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Penetapan UMK (Surat Keputusan)	1						
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN									
						Persentase Kondisi Lingkungan Kerja	3,53	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Target : jumlah LHP yang direncanakan dalam PKPT 2022. Realisasi : jumlah aktual LHP yang diterbitkan selama tahun 2022. Realisasi LHP melebihi target PKPT dikarenakan adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan baik itu movev, audit kepatuhan atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau diperdalam pemeriksaannya, sehingga menghasilkan LHP di luar PKPT.		
					Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								
					Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	1000						
					Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	12						
					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	750						
3	2.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Persentase Ketercapaian Seluruh Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100,0	100,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD(Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : dokumen)	12	12	100,00				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : dokumen)	3	3	101,18				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : dokumen)	68	68	100,00				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (UPTD PPA)								
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : dokumen)	2	2	100,00		Realisasi anggaran tidak diserap karena penyusunan dan rekonsiliasi dilaksanakan bersamaan dengan laporan di Dinas Induk	Penyusunan dan rekonsiliasi akan dilaksanakan secara mandiri oleh UPTD PPA	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan : dokumen)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Satuan : dokumen)	0	0	-				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PPA)								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan : dokumen)	12	12	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan : dokumen)	12	12	100,00		Monitoring evaluasi penilaian kinerja dilaksanakan di bagian umum kepegawaian dinas induk, sedangkan untuk Penjiwaan dan pelatihan dilaksanakan melalui BPSDM	Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara mandiri oleh UPTD PPA	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Satuan : dokumen)	3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya KDukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PPA)								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan : dokumen)	6	6	100,00				
					PPenyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Satuan : dokumen)	5	5	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : dokumen)	5	5	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : dokumen)	74	74	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel (Satuan : dokumen)	0	0	-				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan : dokumen)	20	20	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PPA)								
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Mebel (Satuan : dokumen)	111	111	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Satuan : dokumen)	17	17	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan : dokumen)	1	1	100,00		jasa surat menyurat tidak menggunakan jasa kurir namun menggunakan proses pengiriman internal dinas	Pengiriman jasa surat menyurat dilakukan melalui jasa kurir	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan : dokumen)	3	3	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD PPA								
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Satuan : dokumen)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	48	48	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan (Satuan : dokumen)							
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel (Satuan : dokumen)	0	0	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan : dokumen)	73	73	100,00				
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Satuan : dokumen)	7	7	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PPA)								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
						Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD (Satuan : %)	7,5	10,16	135,47	Sangat Tinggi			
						Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Satuan : %)	17,65	17,65	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi (Satuan : %)	36,13	31,71	87,77	Tinggi	masih rendahnya peran dan kontribusi perempuan di dunia kerja dan menurunnya angka pekerja formal perempuan	peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan di bidang ekonomi baik formal maupun non formal	
					Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	19	19	100,00				
					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	39	39	101,18				
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi								
					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi								
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	2100	2100	100,00				
					Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)							
				Program Perlindungan Perempuan									
						Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	5	5	100,00				
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	40	40	100,00				
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : dokumen)	24	24	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	72	72	100,00				
					Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	100	100	100,00				
					Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga									
						Presentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (Satuan : %)	27,27	27,12	99,45	Sangat Tinggi			
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	20	20	100,00				
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	110	110	100,00				
				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	3	3	100,00				
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : dokumen)	5	5	100,00				
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak								
					Pesentase Pengelolaan Sistem Data Gender (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								
				Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi(Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Pemenuhan Hak Anak									
						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Satuan : %)	72,51	61,53	84,86	Tinggi	Masih kurangnya sinergitas dan kolaborasi dalam aspek pemenuhan hak anak	peningkatan sinergitas dan kolaborasi terkait pemenuhan hak anak	
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	9	9	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi								
					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	50	50	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Program Perlindungan Khusus Anak									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Satuan : %)	84,36	77,93	92,38	Sangat Tinggi	Masih kurangnya sinergitas dan kolaborasi dalam aspek perlindungan khusus anak	peningkatan sinergitas dan kolaborasi terkait perlindungan khusus anak	
						Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	25	25	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	5	5	100,00				
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								
					APenyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	10	10	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)							
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	3	3	100,00				
4	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana										
				Program Pendaftaran Penduduk								
					Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Pelayanan Pendaftaran Kependudukan								
				Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan								
				Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Kabupaten/Kota								
				Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk (Satuan : dokumen)	0	0	-				
				Program Pencatatan Sipil								
					Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun (Satuan : %)	98,00	96,16	98,12	Sangat Tinggi	Kerjasama Layanan Pencatatan Akta Lahir Oleh Fasilitas Kesehatan Dengan Disdukcapil Sesuai Domisili Belum Menyeluruh Sehingga Berdampak Terhadap Percepatan Layanan Penerbitan Akta Lahir	Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan	
					Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Pelayanan Pencatatan Sipil								
				Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	0	0	-				
				Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Terlaksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting (Satuan : dokumen)	0	0	-				
				Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (Satuan : dokumen)	8	8	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	0	0	-				
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
					Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	5	5	100,00				
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	0	0	-				
					Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	0	0	-				
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan SipilPenduduk	Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	0	0	-				
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil (Satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan (Satuan : %)	19,51	24,24	124,24	Sangat Tinggi			
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Terlaksananya Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	TerlaksananyaPenyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TerlaksananyaPemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi								
					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Satuan : dokumen)	0	0	-				
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan								
						Ketersediaan Profil Kependudukan (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Penyediaan Profil Kependudukan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Data Kependudukan Provinsi (Satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Terlaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
5	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana										
				Program Pengendalian Penduduk								
					Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun (Satuan : %)	22,10	22,30	100,90	Sangat Tinggi			
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Kependudukan Provinsi								
				Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Terlaksananya Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi								
				oordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Terlaksananya koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
				Program Pembinaan Keluarga Berencana								
					Persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern pada saat pengamatan. Adapun ontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, untik, Pil, Kondom dan MAL (Satuan : %)	60,91	59,60	97,85	Sangat Tinggi	masih rendahnya PUS dengan kesertaan ber-KB modern (mCPR)	petugas pemberi pelayanan KB, materi komunikasi tersedia di lapangan, stok alat kontrasepsi memadai, fasilitas dan petugas yang kompeten sehingga program KB dapat berjalan dengan semestinya	
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
				Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Satuan : dokumen)							
					Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
					Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera								
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Specific Fertility Rate/ASFR (Satuan : %)	10,00	14,30	69,93	Sedang	masih belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja	perlu adanya sistem informasi yang masif tentang kesehatan reproduksi ini di sekolah dan keluarga	
					Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPk Melalui Mitra Kerja (Satuan : dokumen)	120	120	100,00				
					Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Terlaksananya Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) (Satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK (Satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Satuan : dokumen)	8	8	100,00				
					Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Satuan : dokumen)	100	100	100,00				
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
					Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Satuan : dokumen)	66	66	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Satuan : dokumen)	3	3	100,00				
6	2.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
		Dinas Ketahanan Pangan											

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : Persen)	100,00	100	100	Sangat Tinggi			
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00				
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	3,00	3,00	100,00				
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang/Bulan)	60,00	60,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : dokumen)	12,00	12,00	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : dokumen)	12,00	12,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : dokumen)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	18,00	18,00	100,00				
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)	1,00	1,00	100,00				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1,00	1,00	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)							
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan (Satuan : Paket)	0,00	0,00	-			
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1,00	1,00	100,00			
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00			
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan : Laporan)	1,00	1,00	100,00			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	22,00	22,00			
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan : Unit)	0,00	0,00	-			
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan : Paket)	15,00	15,00	100,00			
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	58,00	58,00	100,00			
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	15,00	15,00	100,00			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	18,00	18,00	100,00				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	173,00	173,00	100,00				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1,00	1,00	100,00				
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1,00	1,00	100,00				
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1,00	1,00	100,00				
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	12,00	12,00	100,00				
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1,00	1,00	100,00				
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	10,00	10,00	100,00				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	3,00	3,00	100,00				
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	6,00	6,00	100,00				
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	2,00	2,00	100,00				
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	10,00	10,00	100,00				
				Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan									
						Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (Satuan :Persen)	100	78,34	78,34	Tinggi	1. Kurang optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial. 2. Lemahnya Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainya selain beras	1. Mengembangkan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial. 2. Pengembangan Sistem cadangan pangan melalui lembaga usaha ekonomi produktif atau lembaga usaha lainnya. 3. Pengembangan Sistem caadangan pangan melalui lembaga usaha ekonomi produktif atau lembaga usaha lainnya	
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan	100,00	100,00	100,00		Dalam penyusunan Peta Jalan Kebutuhan	Telah dilakukan kajian lebih	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (Satuan : Persen)					Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan, hanya menggambarkan proyeksi kebutuhan Infrastruktur pangan, belum menghasilkan rekomendasi rencana aksi kebutuhan pangan	mendalam dalam penyusunan peta jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	
					Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia (Satuan : Unit)	0,00	0,00	-				
					Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Satuan : Unit)	0,00	0,00	-				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Satuan : Laporan)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00				
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat									
						Skor Pola Pangan Harapan (Satuan : Persen)	85	93,3	109,76	Sangat Tinggi	1. Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan 2. Kurangnya promosi akan pentingnya konsumen pangan yang beragam, bergizi, 3. El Nino atau kemarau panjang berdampak pada hasil produksi pertanian yang menurun sehingga harga pangan mengalami kenaikan, mengakibatkan inflasi beberapa komoditi pangan startegis. 4. Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang	1. Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan masyarakat. 2. Meningkatkan peran BUMD/Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen. 3. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pangan di daerah. 4. Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan masyarakat.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											berakibat pada tinginya ongkos angkut	5. Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui impor pangan antar daerah. 6. Peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah.	
					Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00		1. Banyaknya permohonan lokasi pelaksanaan GPM dari masyarakat/lembaga 2. Kurangnya komitmen Gapoktan terhadap MoU pasokan ke TTID	1. Penambahan lokasi pelaksanaan GPM Teralokasi pada kegiatan dekonsentrasi 2. Melakukan sosialisasi dan bintek dalam pembinaan Gapoktan	
					Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Prognosa Harga (Satuan : Dokumen)	12,00	12,00	100,00				
					Sub Kegiatan c	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Satuan : Unit)	44,00	44,00	100,00				
					Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00		Adanya perubahan harga beras yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bapanas No. 333.1/HK.02.05/K/VII/2023 tentang Harga Pembelian Beras untuk CPP Tahun 2023	Addendum jual beli beras dengan Bulog dan penyesuaian stok beras dengan harga beras yang telah ditetapkan pemerintah	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan : Laporan)	1,00	1,00	100,00				
					Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100,00		Tidak validnya data penerima bantuan untuk penanganan penurunan stunting di Masyarakat	Melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan di lokasi stunting	
					Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Satuan : Dokumen)	20,00	20,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00				
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Satuan : Laporan)	9,00	9,00	100,00				
				Program Penanganan Kerawanan Pangan									
						Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Satuan : Persen)	22,22	22,22	100	Sangat Tinggi	1. Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan dibandingkan dengan kebutuhan. 2. Tingginya prevalensi balita stunting. 3. Terbatasnya akses air bersih. 4. Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.	1. Pemberian bantuan pangan beras portivikasi di daerah rawan pangan. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder. 3. Penataan prasarana pertanian, perikanan dan peternakan. 4. Pembinaan masyarakat di	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												daerah rentan pangan.	
					Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00		Adanya peraturan terbaru dalam penyusunan dan pemutakhiran Peta FSVA	Melakukan sosialisasi dan bintek penyusunan dan pemutakhiran Peta FSVA	
					Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00				
					Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	6,00	6,00	100,00		Dalam pengadaan bantuan pangan beras tidak ada beras fortifikasi keberadaan dipasaran tidak tersedia atau melalui proses	Mengganti bantuan beras dari beras fortifikasi menjadi beras premium dalam pengadaannya	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	4,00	4,00	100,00				
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Satuan : Dokumen)	4,00	4,00	100,00				
				Program Pengawasan Keamanan Pangan									
						Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Satuan : Persen)	25	38,75	155,00	Sangat Tinggi	1. Perubahan Sistem dalam pendafaran dari manual ke online, dimana para pelaku usaha kecil tidak mempunyai teknologinya sehingga sulit untuk mengaksesnya. 2. Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki INB dan NPWP dimana itu merupakan persyaratan dalam mendaftarkan produk mereka secara online di OSS 3. Kurangnya tenaga	1. Pengawasan di tingkat pelaku usaha PSAT, melalui uji sampel dan uji lab PSAT. 2. Meningkatkan surveillance atas pelaku usaha/petani yang sudah memiliki sertifikat prima 2-3 maupun produk PSAT yang sudah teregistrasi secara ketat dan kontinyu 3. Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuha (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 4. Sampai saat ini Provinsi Banten belum memiliki Laboratorium pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sendiri.	mutu pangan. 4. Perbanyak sosialisasi cara pendaftaran PSAT secara online di OSS baik secara cetak dan elektronik.	
					Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Dokumen)	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00				
					Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00				
					Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Sertifikat)	25,00	27,00	108,00				
					Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Dokumen)	30,00	128,00	426,67				
					Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Satuan : Dokumen)	0,00	0,00	-				
7	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
							Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100		100	Sangat Tinggi	Beberapa UPTD dan Cabang Dinas (UPTD SPTH, CDLHK Lebak Tangerang, CDLHK	Mengusulkan Pengadaan /Pembangunan Gedung Kantor	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											Pandeglang Serang dan Cilegon belum memiliki gedung kantor sendiri		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%		Adanya Penyesuaian Anggaran (Pergeseran Anggaran) Sehingga perlu penyesuaian Anggaran dari yang sudah direncanakan	Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Kegiatan Secara Efektif dan Efisien	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%		Proses Pengadministrasian Dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan Beberapa Kegiatan Masih Belum Tepat Waktu Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Kegiatan	Proses Persiapan Pengadministrasian Dan Pelaporan Yang Lebih Baik Lagi Serta Peningkatan Koordinasi Dengan Pelaksana Kegiatan Dengan Memperhatikan Dan Mengacu Pada Rencana Operasional	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Kegiatan Atau (rok) Yang Telah Dibuat	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang /Bulan	139 Orang /Bulan	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00				
					Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%		Belum Optimalnya Inventarisasi Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Dan Fungsi Admisitrasi Perangkat Daerah (kebutuhan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan, kebutuhan Gedung Kantor Untuk Uptd/cdlhk, Kendaraan Dinas Lapangan /operasional))	Melaksanakan Inventarisasi Sarpras Perkantoran Serta Mengusulkan/ merencanakan Penyediaan Sarpras Dan Penyiapan Anggaran Pada Tahun Berikutnya	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100,00		terbatasnya ketersediaan anggaran dalam peningkatan kapasitas aparatur	Dukungan Anggaran Dan Perencanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Yang Lebih Baik	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang (24 Kegiatan)	8 Orang (24 Kegiatan)	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 Dokumen	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 Dokumen	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100,00				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	100,00				
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	102 Unit	102 Unit	100,00				
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00				
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Lab Lingkungan	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100,00				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 Unit	13 Unit	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	10 Unit	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	136 Unit	136 Unit	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	100%	100,00		Terbatasnya SDM di CDLHK LT	Mengusulkan Penambahan SDM	
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	100%	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100,00				
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100,00				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon	100%	100%	100,00				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK PSC	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	100,00				
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%	100%	100,00				
				Peyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%	100%	100,00				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	20 Unit	100,00				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100,00				
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	100,00				
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pejak dan perizinannya	10 Unit	10 Unit	100,00				
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100%	100%	100,00		belum optimalnya Perencanaan Anggaran pada UPTD SPTH	Penyusunan perencanaan aggran yang lebih baik	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00				
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
					Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian kegiatan Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	100%	100%	100,00				
					Pengadaan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00				
					Pengadaan Mebel	jumlah paket meubel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	18 Unit	18 Unit	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase Ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD SPTH	100%	100%	100,00		belum optimalnya Perencanaan Anggaran pada UPTD SPTH	Penyusunan perencanaan aggran yang lebih baik	
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	23 Unit	100,00				
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100,00				
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
						Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	100	100	100	Sangat Tinggi	- Perda terkait RPPLH masih dalam	- Meningkatkan Pengawasan dan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											proses/belum ditetapkan - tidak semua kabupaten/kota sudah selesai menyusun dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota	Evaluasi dalam rangka Pengendalian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00		- Perda terkait RPPLH masih dalam proses/belum ditetapkan - tidak semua kabupaten/kota sudah selesai menyusun dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota	- Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	100,00				
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	6 dokumen	6 dokumen	100,00		- Masih berubah-ubah aturan terkait penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD yang menyebabkan perubahan dokumen ditengah-tengah pengerjaan. - Masih banyak tim penyusun KLHS Kab/Kota yang belum memahami proses penyusunan KLHS secara benar. - Proses penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia membuat proses validasi terhambat.	- Melakukan asisten terhadap tim penyusun KLHS Kab/Kota. - Berkoordinasi secara intens dengan KLHK RI. - Mensuport seluruh data yang dibutuhkan oleh tenaga ahli dalam penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00				
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
						Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	51	53,49	104,88	Sangat Tinggi	- Adanya Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, perubahan Iklim/kemarau panjang - masih rendahnya koordinasi multistekholder (pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota terhadap pengendalian pencemaran (Air, Udara dan Air laut)	- Meningkatkan komitmen terhadap pengendalian pencemaran khususnya pencemaran udara . - Menambah jumlah peserta sosialisasi terkait pengendalian pencemaran - Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder khususnya dalam program pengendalian pencemaran - Melakukan inovasi yang terkait program pengendalian pencemaran udara Air dan Air Laut	-
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15 dokumen	15 dokumen	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	4 Dokumen	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK	11 dokumen	11 dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan							
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Ketercapaian Jumlah Titik Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Titik	3 Titik	100,00				
					Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Titik	3 Titik	100,00				
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
						Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	21	21	100,00	Sangat Tinggi	Adanya Peralatan (ispu) Yang Kurang Maksimal Atau Rusak Berat Sehingga Akan Mempengaruhi Terhadap Perhitungan/pengukuran Kualitas Udara	Untuk Dapat Dianggarkan Biaya Pemeliharaan / Penggantian Sarana Prasarana pada Tahun berikutnya	
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan	8 dokumen	8 dokumen	100,00		Adanya Peralatan (ispu) Yang Kurang Maksimal Atau Rusak Berat Sehingga Akan Mempengaruhi Terhadap Perhitungan/pengukuran Kualitas Udara	Untuk Dapat Dianggarkan Biaya Pemeliharaan / Penggantian Sarana Prasarana pada Tahun berikutnya	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	8 dokumen	8 dokumen	100,00				
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00		Adanya Peralatan (ispu) Yang Kurang Maksimal Atau Rusak Berat Sehingga Akan Mempengaruhi Terhadap Perhitungan/pengukuran Kualitas Udara	Untuk Dapat Dianggarkan Biaya Pemeliharaan / Penggantian Sarana Prasarana pada Tahun berikutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
						Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	14,29	14,29	100,00	Sangat Tinggi	Penetapan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Provinsi Banten belum dapat diproses dikarenakan luasannya kurang dari 10 Ha sehingga tidak belum dapat ditetapkan menjadi taman kehati provinsi	Menambah luasan calon taman kehati provinsi (pengadaan lahan untuk kekurangan luasan Taman Kehati Provinsi $\pm$ 2 Ha)	
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100%	66,67%	66,67		Penetapan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Provinsi Banten belum dapat diproses dikarenakan luasannya kurang dari 10 Ha sehingga tidak belum dapat ditetapkan menjadi taman kehati provinsi	Menambah luasan calon taman kehati provinsi (pengadaan lahan untuk kekurangan luasan Taman Kehati Provinsi (kekurangan $\pm$ 2 Ha)	
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	1 Dokumen	100,00				
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100 Orang	100,00				
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 unit	0 Unit	0,00				
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
						Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100	100	100,00	Sangat Tinggi	masih minimnya penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan Limbah domestik khususnya untuk masyarakat	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik khususnya untuk masyarakat.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 dokumen	3 dokumen	100,00		- Data jumlah timbulan Limbah B3 yang dihasilkan per kabupaten/ kota kurang akurat karena dari sekitar 2.900 industri yang ada di Provinsi Banten, hanya 1.000 industri yang telah teregistrasi dalam aplikasi SIMPEL dan dari 1.000 industri hanya 300 industri yang secara aktif melakukan penginputan data/ laporan ke dalam Aplikasi SIMPEL; - Minimnya sumber daya manusia sebagai pengendali atau pembina yang dapat melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap industri/ pelaku usaha.	- Untuk mendapatkan data jumlah timbulan Lmbah B3 yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan pembinaan/ pendampingan kepada industri/ pelaku usaha tentang cara penginputan data pengelolaan Limbah B3 ke dalam aplikasi SIMPEL - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pada pelatihan/ workshop tentang pengelolaan Limbah B3 dengan memberdayakan SDM yang ada di DLHK Provinsi Banten.	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya							
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH									
						Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	11,76	17,65	150,09	Sangat Tinggi			
					Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	100,00				
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00				
					Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 dokumen	2 dokumen	100,00				
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
						Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	141,67	141,67	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100,00		kurangnya tenaga teknis maupun tenaga administrasi dalam melaksanakan kegiatan	Penambahan personil / tenaga teknis	
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	15 lembaga	15 lembaga	100,00				
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 Dokumen	100,00				
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	870 Orang	870 Orang	100,00				
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	269 keluarga	269 Keluarga	100,00				
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
					Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68,00	159,00	233,82	Sangat Tinggi			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	68 lembaga/7 Kab.kota	159 lembaga dan 7 kab. Kota adipura	100,00				
				Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	75 Entitas	75 Entitas	100,00				
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
					Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	80	84,00	105,00	Sangat Tinggi	Belum ditetapkan Pengawas lingkungan /PPLH	Usulan Penetapan PPLH	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100,00		Belum ditetapkan Pengawas lingkungan /PPLH	Usulan Penetapan PPLH	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00				
					Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	28 Orang	28 Orang	100,00				
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	125 Laporan	125 Laporan	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
						Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Lingkungan (PPNS-LH)	Mengusulkan Bimtek terkait PPLH dan PPNS LH	
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100%	100%	100,00		Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Lingkungan (PPNS-LH)	Mengusulkan Bimtek terkait PPLH dan PPNS LH	
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	20 dokumen	20 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	4 dokumen	4 dokumen	100,00				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
						Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	- Belum ditetapkan TPST Regional Provinsi Banten - Masih minimnya pengawasan dan pemantauan sampah laut	- Mempercepat proses penetapan TPST Regional - Mendorong perlindungan mutu	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												laut melalui pencegahan pemantauan sampah - Melakukan pemantauan sampah laut minimal 2 kali setahun	
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100%	100%	100,00		Data jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per kabupaten/ kota kurang akurat; Penyerahan bantuan Cator kepada Bank Sampah mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena keterlambatan pengiriman Cator dari pihak penyedia barang.	Untuk mendapatkan data jumlah timbulan sampah yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan kunjungan/ pendampingan cara penginputan data pengelolaan sampah ke dalam aplikasi SIPSN; Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan Cator kepada Bank Sampah, maka dengan memperkuat kesepakatan melalui poin-poin di dalam kontrak kerjasama dengan pihak penyedia barang.	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
					Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	120 Ton	120 Ton	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
8	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
				Program Penataan Desa								
					Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Satuan : Desa)	68	68	100,00	Sangat Tinggi			
					Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat							
					Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	6	0	0,00		Terdapat Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat tidak memenuhi Kriteria peruntukan dan Penerima berdasarkan Pergub Bansos serta Kode rekening belanja tersebut Tidak Sesuai dan lebih tepatnya memakai kode rekening Belanja Penghargaan Atas suatu Prestasi		
				Program Peningkatan Kerjasama Desa								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Persentase desa yang melakukan kerjasama (Satuan : %)	1,19	0,00	0,00	Sangat Rendah	- Belum optimalnya peran pemangku kebijakan baik Kabupaten maupun Provinsi dalam menjembatani terciptanya kerjasama Desa; - Perbedaan sudut pandang, budaya dan adat istiadat suatu Desa; - Keterbatasan Sumberdaya; - kurangnya komunikasi dan koordinasi antar Desa; dan - lemahnya Lembaga Desa dalam memetakan Potensi Desa.	1) Meningkatkan koordinasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten serta pemangku kebijakan lainnya dalam mewujudkan kerjasama Desa; 2) pola kegiatan bersifat jemput bola (lokasi kegiatan difokuskan pada Desa perbatasan yang potensial untuk melakukan kerjasama Desa; dan 3) MOU Kerja sama antar Desa menjadi target Kinerja.	
					Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi							
					Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Program Administrasi Pemerintahan Desa									
							Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang serta desa Maju (Satuan : %)	6,32	10,26	162,34	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (satuan : Orang)	1420	1420	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota (satuan : Dokumen)					Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi (satuan : Desa)	2	2	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
					Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa (satuan : Laporan)	1	1	100,00		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		
				Program Peningkatan Kerjasama DesaProgram Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									
						Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal. desa berkembang dan desa maju (satuan : Desa)	68	80	117,65	Sangat Tinggi			
					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan							
					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (satuan : Dokumen)	0	0	#DIV/0!				
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	69	80	115,94		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota;		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	kapasitas Kelembagaannya (satuan : Lembaga)							
					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (satuan : Unit)	1670	190	11,38		1) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota; dan 3) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Meja dan Kursi Untuk Posyandu) yang tidak direalisasikan karena belum adanya Penetapan SK Gubernur terkait Calon Penerima Barang		
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (satuan : Dokumen)	0	0	#DIV/0!				
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (satuan : Laporan)	0	0	#DIV/0!				
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (satuan : Laporan)	1	1	100,00		1) Belanja Sewa Peralatan, Sewa Kendaraan dan Jasa Tenaga Masak tidak diserap; 2) Efisiensi Kontrak Belanja Barang diserahkan Kepada Masyarakat PMT Stunting; 3) Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; dan 4) Efisiensi Belanja		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	87,50	87,50	Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (satuan : Dokumen)	2	2	100,00		1). Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota; 3) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan 4) Efisiensi Kontrak Belanja Sewa Hotel.		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (satuan : Dokumen)	2	2	100,00		Efisiensi belanja penggandaan/foto copy		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi belanja penggandaan/foto copy		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (satuan : Laporan)	10	10	100,00		1). Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli; 2) Efisiensi Belanja		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Perjalanan Dinas dalam Kota; 3) Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa; 4) Efisiensi Kontrak Belanja belanja Jasaklan/Reklame, Film, dan Pemotretan; dan 5) terdapat penambahan anggaran belanja Jasaklan/Reklame, Film, dan Pemotretan akan tetapi berdasarkan LHR Inspektorat direkomendasikan untuk tidak diserap		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (satuan : Orang/Buan)	44	42	95,45		Terdapat silpa acrees serta Gaji dan Tunjangan Eselon II tidak diserap karena Masih Sebagai Pelaksana Tugas (PLT)		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (satuan : Dokumen)	12	12	100,00		Efisiensi belanja penggandaan/foto copy		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (satuan : Dokumen)	12	12	100,00		Efisiensi belanja penggandaan/foto copy		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (satuan : Laporan)	1	1	100,00		Efisiensi belanja penggandaan/foto copy		
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1	1	100,00		Efisiensi belanja penggandaan/foto copy		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Tindak Lanjut Pemeriksaan (satuan : Dokumen)							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (satuan : Laporan)	18	18	100,00		Efisiensi belanja penggunaan/foto copy		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		Efisiensi belanja penggunaan/foto copy		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (satuan : Laporan)	0	0	#DIV/0!				
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah							
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (satuan : Paket)	1	1	100,00		Sisa Kontrak		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (satuan : Orang)	2	2	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (satuan : Paket)	1	1	100,00		Efisiensi Kontrak		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (satuan : Paket)	1	1	100,00		Efisiensi Kontrak		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (satuan : Paket)	1	1	100,00		Efisiensi Kontrak		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (satuan : Paket)	1	1	100,00		Efisiensi Kontrak		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (satuan : Paket)	1	1	100,00		Efisiensi Kontrak Belanja Barang Cetak		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (satuan : Laporan)	1	1	100,00		Fasilitasi perjalanan Dinas Bersifat Tentative dan diserap sesuai kebutuhan		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		Belanja ATK (Box File Kardus) tidak diserap, karena spesifikasi barang pada e,katalog harga satuannya lebih besar dari harga yang tercantum dalam DPA.		
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (satuan : Dokumen)	1	1	100,00		Efisiensi belanja fotocopy		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan Barang milik daerah pada perangkat daerah							
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (satuan : Paket)	0	0	#DIV/0!				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (satuan : Unit)	2	0	0,00		Spesifikasi di DPA tidak sesuai dengan Barang yang tayang di E-Katalog		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi Belanja Tagihan Listrik		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (satuan : Laporan)	12	12	100,00		Efisiensi Kontrak Belanja Jasa Tenaga Outsourcing		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang milik daerah pada perangkat daerah							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (satuan : Unit)	1	1	100,00		Sisa Kontrak		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (satuan : Unit)	11	11	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (satuan : Unit)	36	36	100,00		Sisa Kontrak		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (satuan : Unit)	2	2	100,00		Sisa Kontrak		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (satuan : Unit)	2	2	100,00		Sisa Kontrak		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (satuan : Unit)	22	22	100,00				
9	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
		Dinas Perhubungan											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00		- Honorarium dan uang saku pelaksanaan Renja tidak dapat dicairkan, karena peserta hanya internal saja. - Belanja makan minum rapat	- Penyusunan Data Sektoral harus peserta dari kabupaten / kota / stackholder.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Penyusunan Dokumen Data Sektoral tidak dibelanjakan. - Belanja perjalanan dinas Penyusunan Dokumen Data Sektoral tidak dibelanjakan		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00		- Kelebihan belanja penggandaan.	- Rasional jumlah penggandaan.	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00		- Kelebihan belanja penggandaan.	- Rasional jumlah penggandaan.	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00		- Kelebihan honorarium belanja jasa tenaga operator komputer.	- Rasional jumlah penggandaan. - Estimasi kebutuhan belanja operator komputer sesuai kebutuhan.	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00		- Kelebihan honorarium belanja jasa tenaga operator komputer.	- Rasional jumlah penggandaan. - Estimasi kebutuhan belanja operator komputer sesuai kebutuhan.	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00		- Belanja perjalanan dinas RAD-GRK tidak dibelanjakan. - Belanja makan minum rapat RAD-GRK tidak dibelanjakan. - Uang saku Rapat RAD-GRK tidak dibelanjakan.	- Rasionalkan belanja berdasarkan kebutuhan.	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100,00		- Kelebihan belanja perjalanan dinas. - Belanja makan minum rapat Reformasi Birokrasi tidak semua dibelanjakan	- Rasional belanja berdasarkan sesuai kebutuhan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	102	100,00				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00				
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00				
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00				
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100,00				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	1	200,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00		- Sisa kontrak ATK, Kertas dan cover, natura dan pakan natura, jasa pengolahan sampah, langganan surat kabar	- Rasional belanja berdasarkan kebutuhan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											- selisih harga materai - selisih harga sewa mesin penggandaan		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	100,00	- Penyediaan Roll baner, spanduk, umbul-umbul dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan	- Rasional belanja berdasarkan sesuai kebutuhan.	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100,00	- Selisih harga air minum kemasan - selisih harga penggandaan	- Rasional belanja berdasarkan sesuai kebutuhan.	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	- Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Biasa digunakan sesuai kebutuhan	- Rasional belanja berdasarkan sesuai kebutuhan.	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00	- Sisa kontrak jasa konsultasi berorientasi manajemen penatausahaan arsip SKPD - Selisih harga penggandaan	- Rasional belanja berdasarkan sesuai kebutuhan.	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	77	77	100,00			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	- sisa honorarium non ASN, jaminan kesehatan, JKK dan JKM pegawai yang resign/meninggal	- Rasional belanja berdasarkan sesuai kebutuhan.	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	60	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	78	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
						Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Pemenuhankebutuhan angkutan masal	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan							
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	3	100,00				
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	4	4	100,00				
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	3	100,00				
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi							
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	11	11	100,00				
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	22	22	100,00				
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan							
					Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	6	6	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	5	5	100,00				
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	6	6	100,00				
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal							
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	1	100,00		- Kelebihan belanja perjalanan dinas. - Belanja makan minum rapat tidak dibelanjakan	- Rasionalkan belanja berdasarkan kebutuhan.	
				Program Pengelolaan Pelayaran									
						Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	2	2	100,00		- Realisasi Belanja BBM Kapal kegiatan Pemantauan Angkutan Laut mengikuti harga tarif pada saat realisasi (harga terkini) sehingga ada efesieni / silpa pada anggaran Belanja Bahan bakar Minyak, Efesieni Perjalanan	Efesieni	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											Dinas Dalam dan Luar Daerah di realisasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, efesiensi belanja transpot perjalanan dinas direalisasikan sesuai kebutuhan,		
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								
					Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2	2	100,00		- Sisa Kontrak dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah disiapkan untuk memenuhi undangan dari pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) dan dikarenakan undangan bersifat zoom meeting, maka realisasi menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.	Sisa Kontrak dan Efisiensi	
				Program Pengelolaan Perkeretaapian									
						Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
					Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Terlaksananya Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian kewenangan provinsi							
					Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	5	5	100,00		Belanja perjalanan dinas biasa ke Madiun tidak di serap	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Madiun di alihkan ke Perjalanan Dinas Biasa DKI	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1	1	100,00		Sisa Transport Perjalanan dinas , Sisa Honor Narasumber pejabat provinsi banten dan sisa makan minum peserta rapat sosialisasi	rasionalisasi belanja sesuai kebutuhan	
				Program Pengelolaan Pelayaran									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase ketercapaian kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1	100,00		Tarif belanja lembur antara SIPD dan SSH berbeda, sehingga ada pengurangan honor petugas pendukung posko Nataru Menggunakan tarif	Sisa Anggaran Petugas Pendukung Posko Nataru Akan dilaksanakan Pada bulan Desember 2023	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											belanja lembur Petugas Posko sesuai SSH		
10	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00		Adanya sisa kontrak dari belanja sewa hotel, sisa honorarium narsum dan sisa dari penginapan perjalanan dinas		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	5	5	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang)	50	50	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	3	3	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya (Satuan : Paket)	3	3	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan : Dokumen)	14	14	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)	12	12	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	12	12	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	12	12	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	77	77	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	19	19	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	20	20	100,00				
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan : Unit)	17	17	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	266	266	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	2	2	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
						Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF (Satuan : Persen)	39	64,10	162,74	Sangat Tinggi			
						Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah (Satuan : Persen)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi									
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Satuan : Dokumen)	6	6	100,00				
					Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis (Satuan : Dokumen)	3	3	100,00				
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan : Orang)	212	212	100,00				
					Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Satuan : Dokumen)	3	3	100,00				
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Satuan : Persen)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Satuan : Persen)	91	96,97	106,67	Sangat Tinggi			
					Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
					Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi (Satuan : Domain)	2	2	100,00				
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Satuan : Unit)	33	33	100,00				
					Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
					Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Satuan : Unit)	2	2	100,00				
					Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Satuan : PD)	33	33	100,00				
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Satuan : Unit)	8	8	100,00				
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Satuan : Dokumen)	16	14	87,50				
					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
11	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian											
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
						Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (Satuan : Persen)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Satuan : Orang)	50	50	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral (Satuan : Orang)	100	100	100,00				
					Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik (Satuan : Unit)	3	3	100,00				
					Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
12	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian											
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
						Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Satuan : Persen)	55	86,40	157,09	Sangat Tinggi			
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	6	6	100,00				
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	4	100,00				
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39	39	100,00				
13	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	25	25	100				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)							
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100				
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	100				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100				
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91	91	100				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45	45	100				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100				
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	18	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	100				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	100				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	4	4	100				
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	100				
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	100				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100				
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	100				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapain kegiatan Adminidtrasi Kepegawaian daerah	10	10	100				
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	100				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	100				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	1	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Informasi Kepegawaian (Dokumen)							
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	100				
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	100				
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pengadaan barang milik daerah	18	18					
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	100				
						Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	1	1	100				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	100				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	100				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	100				
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	8	8	100				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100				
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	100				
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	100				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36	36	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	71	71	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	16	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3	3	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	100				
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
						Persentase Koperasi Aktif (%)	25	25	100	Sangat Tinggi			
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (Unit)	400	400	100				
					Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	12	12	100				
					Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	400	400	100				
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Unit)	400	400	100				
					Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		400	400	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									
						Persentase koperasi yang mendapatkan akses (kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	30	30	100	Sangat Tinggi			
						PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	30	30	100				
						Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400	400	100				
						Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penata Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	400	400	100				
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	400	40	1.000				
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN									
						Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian (%)	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400	400	100				
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	400	400	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
					Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat (%)	5	5	100	Sangat Tinggi			
				PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	JUMLAH UNIT USAHA KECIL YANG DILAKUKAN PEMBERDAYAAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	457	457	100				
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	457	457	100				
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	457	457	100				
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	
					Jumlah unit usaha yang mendapatkan akses (kemitraaan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	457	457	100	Sangat Tinggi			
				PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH	Jumlah pengembangan Usaha Kecil yang berorientasi ke usaha menengah (Unit)	457	457	100				
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	457	457	100				
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	457	457	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
14	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	- Ketersediaan sarana serta prasarana kerja belum optimal; - Jumlah pegawai belum memadai	- Pengadaan sarana dan prasarana kerja berupa Laptop, PC; - Optimalisasi pegawai dengan membentuk tim kerja	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57	57	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah							
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	100,00				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00				
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65	65	100,00				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	15	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	100,00				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102	102	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100,00				
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								
					Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal (Satuan : %)	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	Belum optimalnya ketersediaan data UMKM dan Perusahaan yang bisa dikerjasamakan	Pendataan Pelaku usaha dan UMKM yang dapat dilakukan Kemitraan	
					Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti (Satuan : %)	45,45	59,09	130,01	Sangat Tinggi	Belum optimalnya perencanaan potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan	Penyusunan Dokumen Investasi yang siap ditawarkan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
				Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	100,00				
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	50	50	100,00				
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	6	6	100,00				
					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	7	7	100,00				
				Program Promosi Penanaman Modal									
						Presentase Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal (Satuan : %)	25	44,38	177,50	Sangat Tinggi	Materi promosi investasi belum optimal sehingga belum optimal untk menarik penanam modal	Penyediaan materi promosi investasi sesuai dengan potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Provinsi Banten	
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi							
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	10	10	100,00				
				Program Pelayanan Penanaman Modal									
						Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK (Satuan : %)	85	80,86	95,13	Sangat Tinggi	Proses penerbitan izin memerlukan rekomendasi teknis dari dinas teknis terkait, sehingga penyelesaiannya tergantung dinas teknis	Melakukan koordinasi dengan OPD teknis dalam upaya percepatan penerbitan rekomendasi teknis	
					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi							
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	1000	1000	100,00				
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan	100	100	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi							
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100	100	100,00				
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
							Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal (Satuan : %)	25	21,32	85,28	Tinggi	Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Dilakukan sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Klinik Konsultasi LKPM kepada pelaku usaha	
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi							
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	100,00				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150	150	100,00				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100	100	100,00				
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
							Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Satuan : %)	25	25,64	102,54	Sangat Tinggi	belum optimal Penyebarluasan data dan informasi penanaman modal	Penyebarluasan data dan informasi penanaman modal melalui Web DPMPSTSP https://investasi.bantenprov.go.id/	
						Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	2	100,00				
15	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100%	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100,00		adanya efisiensi anggaran / silfa		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	54	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	4	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	50	100,00				
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 %	100 %	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00			
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	100,00			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100,00			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	100,00			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Tersusunya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100,00			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	100,00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	9	100,00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
						Persentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan	14,66 %	15,05%	102,66	Sangat Tinggi			
						Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan	25 %	25,37%	101,48	Sangat Tinggi			
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	7	7	100,00		adanya efisiensi anggaran / silfa		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	330	330	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	350	350	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60	60	100,00				
					Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	-	#DIV/0!				
					Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1	1	100,00				
					Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan,	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan	60	60	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan							
					Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1	1	100,00				
					Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	50	50	100,00				
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2	2	100,00		adanya efisiensi anggaran /silfa		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	75	75	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1	1	100,00				
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING		KEOLAHRAGAAN							
						Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	42 %	56,12%	133,62	Sangat Tinggi			
						Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	3,02 %	7,56%	250,33	Sangat Tinggi			
						Persentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional	10 %	21%	210,00	Sangat Tinggi			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3	3	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	5	5	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha								
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	3	3	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	3	100,00				
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olahraga	3	3	100,00				
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1	1	100,00				
					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	300	300	100,00				
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	3	3	100,00				
					Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	10	10	100,00				
					Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	10	10	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1	1	100,00				
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3	3	100,00				
					Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	3	3	100,00				
					Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	10	10	100,00				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
						Prosentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan	81,97 %	81,97 %	100,00	Sangat Tinggi			
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	8	8	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	1	1	100,00				
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	100,00				
					Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1	1	100,00				
					Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	100	100,00				
					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1	1	100,00				
					Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	1	100,00				
					Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	1	1	100,00				
					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1	1	100,00				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	100 %	100 %	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	100 %	100 %	100,00		adanya efisiensi anggaran / silfa		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	100 %	100 %	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Tersusunya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	100 %	100 %	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada perangkat daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	100 %	100 %	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	100,00				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
					Persentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	21,93 %	72,50%	330,60	Sangat Tinggi			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	3	3	100,00				
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	3	100,00				
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	3	3	100,00				
				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	#DIV/0!				
				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	1	100,00				
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	90	90	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
16	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan										
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tidak ada	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Kegiatan Forum OPD 2024 2. Dokumen Kegiatan Forum Data 2023 3. Dokumen Perkin/IKU 2023 4. Dokumen Perkin/IKU Perubahan 2023 5. Dokumen RENJA tahun 2024 6. Dokumen Perubahan Renja 2023 Faktor Penghambat: Efisiensi Honor Narasumber, BBM dan Uang Pengganti Transport Peserta Rapat Form Data Sektoral. Faktor Pendukung: Dukungan data dari leading sektor terkait	Tidak ada	Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	100,00		Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan 1. Dokumen DRPK 2024 2. Dokumen Penilaian Risiko 2024 3. Dokumen RKA OPD 2024 Faktor Penghambat : Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung : Dukungan data dari leading sektor terkait		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	3	100,00		Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan 1. Dokumen DRPK Perubahan 2023 2. Dokumen Penilaian Risiko Perubahan 2023 3. Dokumen RKA OPD Perubahan 2023 Faktor Penghambat : efisiensi Sisa Belanja Cetak dan Penggandaan Faktor Pendukung : Dukungan data dari leading sektor terkait	Tidak ada	Tidak ada
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00		Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan tidak ada Faktor Penghambat : DPA 2024 baru akan dilaksanakan pada awal Januari 2024 Faktor Pendukung: Dukungan data dari leading sektor terkait	Tidak ada	Tidak ada
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00		Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan 1. Dokumen DPA Perubahan SKPD 2023 Faktor Penghambat : Efisiensi Faktor Pendukung : Dukungan data dari leading sektor terkait	Tidak ada	Tidak ada
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00		Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan Dokumen Laporan Barang/ Jasa Dan Dokumen Laporan Bulanan Keuangan/ Fisik	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Faktor Penghambat : Efisiensi Honor Narasumber, BBM dan Uang pengganti transport peserta Rapat PPID. Pengurangan anggaran pada Belanja Perjaanan Dinas sebesar Rp. 5.180.000,- Faktor Pendukung : Dukungan data dari leading sektor terkait		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen LKIP/SAKIP OPD 2022 2. Dokumen LKPJ OPD 2022 3. Dokumen LPPD OPD 2022 4. Dokumen PPID OPD 2023 5. Dokumen IKM 2023 6. Dokumen Data Pembangunan Sektor OPD 2023 7. Dokumen Visualisasi Perangkat daerah 2023 Faktor Penghambat: Visulaisasi tidak dilaksanakan karena terdapat Pengurangan Anggaran pada pekerjaan Visualisai Faktor Pendukung: Dukungan data dari leading sektor terkait	Tidak ada	Tidak ada
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah						Tidak ada	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63,00	63,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Laporan Gaji dan Tunjangan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Faktor Penghambat: Jumlah ASN hanya 63 dari target 65 Pegawai Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	12,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Laporan Administrasi Pelaksana Tugas ASN Faktor Penghambat: dibayarkan sesuai aturan Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi	Tidak ada	Tidak ada
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	12,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen laporan pajak pembantu bulanan dan laporan bulanan DTH pajak Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi	Tidak ada	Tidak ada
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,00	12,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Laporan Bulanan Akuntansi Keuangan 2022 Faktor Penghambat:	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	1,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi	Tidak ada	Tidak ada
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00	1,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Faktor Penghambat: Belum ada tanggapan pemeriksaan dari Inspektorat Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18,00	18,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi	Tidak ada	Tidak ada
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	1,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2022 Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: SDM Keuangan yang sudah di SK kan dan acuan aturan sesuai regulasi	Tidak ada	Tidak ada
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah						Tidak ada	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00	2,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengiriman Diklat Pegawai Faktor Penghambat: Sesuai Kebutuhan Faktor Pendukung: SDM yang siap melaksanakan pelatihan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3,00	3,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Faktor Penghambat: Sesuai Target Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan kantor	Tidak ada	Tidak ada
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah						Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7,00	7,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Alat Listrik sesuai dengan kebutuhan kerusakan di lapangan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan rutin kantor	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	Tidak ada
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,00	3,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan rutin kantor	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3,00	3,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian Isi Tabung Pemadam Kebakaran, , Perabot Kantor (Alat Pembersih), Karangan Bunga Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan rutin kantor	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	Tidak ada
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00	2,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Makan dan Minum Rapat, Air Galon Faktor Penghambat: Anggaran digunakan Sesuai Kebutuhan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan rutin kantor	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	Tidak ada
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	12,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Penyediaan Barang Cetak Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan rutin kantor	Tidak ada	Tidak ada
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,00	2,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Konsultasi SKPD Faktor Penghambat: Belanja Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan. Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan rutin kantor		
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	1,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Fumigasi Ruang Record Center Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan rutin kantor	Tidak ada	Tidak ada
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Tidak ada	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengadaan Alat Penyimpanan Peralatan Kantor Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang penunjang operasional kantor	Tidak ada	Tidak ada
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	45	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengadaan Alat Rumah	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											Tangga Lainnya, Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 2. Pengadaan Alat Kantor Lainnya, Pengadaan Alat Pendingin 3. Pengadaan Personal komputer, pengadaan peralatan personal komputer Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang penunjang operasional kantor		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	0,00		Ketrangan Pekerjaan Fisik Yang sudah dilakukan tidak ada Faktor Penghambat : Anggaran tidak direalisasikan karena hanya untuk mengenakan pagu. Faktor Pendukung : Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang penunjang operasional kantor	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	Tidak ada
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tidak ada	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6,00	6,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Promosi Publikasi, Telepon, listrik, internet dan surat kabar Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan Penyedia jasa kantor		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,00	2,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembelian Perabotan Kantor (gorden) Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan Penyedia jasa kantor	Tidak ada	Tidak ada
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6,00	6,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Tenaga Administesi, , tenaga keamanan,Tenaga Arsip dan Perpustakaan supir/driver, pengelolaan sampah dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Faktor Penghambat: dibayarkan sesuai aturan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran pada kebutuhan Penyedia jasa kantor	Tidak ada	Tidak ada
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tidak ada	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	14	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kendaraan Dinas Jabatan (Service, Suku Cadang, BBM dan Pajak Kendaraan Jabatan) Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang kantor		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	100,00	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang kantor	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	Tidak ada
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91	91	100,00	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan Mesin Fotocopy, Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan Komputer, Printer 3. Pemeliharaan CCTV dan Pemeliharaan Genset Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Faktor Pendukung: Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang kantor		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan Lift, Pemeliharaan toilet 2. Pemeliharaan Pengaman Buku, Pemeliharaan Jaringan Internet, Perbaikan Lift, Pemeliharaan jaringan Listrik Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang kantor	Tidak ada	Tidak ada
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										
							Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1,00	2,07	207,00	Sangat Tinggi	Keterangan: Jumlah total koleksi perpustakaan : 186.246 eksp. Penambahan koleksi buku sudah dilakukan melalui pengadaan buku dan e-book sesuai target (3.866 eks dari 3.866 eksp tahun 2023). Penghitungan yang diperoleh adalah = $3866/186.246 \times 100 = 2,07\%$ Faktor Pendorong : Dukungan kecepatan seleksi bahan pustaka yang sesuai dengan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												kebutuhan pemustaka		
							Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah	20,00	18,19	90,95	Sangat Tinggi	Keterangan : - Jumlah pemustaka DPK tahun 2022 sampai dengan bulan Desember sebanyak 45.624 orang dan jumlah pemustaka dari Januari s.d Desember 2023 sebanyak 53.924 orang. Terdapat kenaikan jumlah pengunjung sebanyak 8300 Sehingga diperoleh persentase kenaikan pengunjung sebesar $8300/45.624 \times 100 = 18,19\%$ Faktor Pendorong : Tahun 2022 masih masa adaptasi pasca pandemi dan DPK Provinsi Banten baru buka layanan pada bulan Maret 2022 sehingga jumlah pengunjung masih sedikit. Tahun 2023 ini tingkat kunjungan pemustaka sudah normal kembali. Faktor Penghambat : Munculnya saingan dalam penyediaan informasi dalam bentuk internet sehingga sebagian masyarakat beralih mencari sumber informasi dari buku konvensional ke dalam format digital	Tidak ada	Tidak ada
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	1	1	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Layanan Mobil Pintar 2. Pengelolaan Website DPK 3. Pengembangan Aplikasi ibanten (Perpustakaan digital) 4. Layanan Audio Visual 5. Pemeliharaan Perpus Elekt Dgn Manaj Lay TIK Berbasis ISO20000 (Rapat) 6. Pengembangan Sistem Informasi perpustakaan 7. berlangganan Subscribes Enterprice menggunakan Whatsapp Engine Faktor Penghambat: Sertifikat ISO 20000-1 belum bisa dibayarkan karena waktu standar penerbitan sertifikat ISO belum terpenuhi. Faktor Pendukung: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mendukung layanan perpustakaan	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan , dan sertifikasi ISO dianggarkan ulang pada Perubahan TA 2024	Tidak ada
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	75	75	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Konsultasi Tentang Akreditasi Ke Perpustakaan Nasional RI 2. Konsultasi Penyusunan PERGUB Perpustakaan Ke BAPUSIPDA Jawa Barat	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan , karena silpa cukup besar	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											3. Koordinasi dan Konsultasi Ke Jakarta terkait Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA Se-Prov.Banten 4. Pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA Se-Prov.Banten 5. Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA 6. Pelaksanaan Rakor Peningkatan Peran Kepala Sekolah dan Kepala Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA 7. Pelaksanaan Fasilitasi Pilot Proyek Pembinaan Perpustakaan Sekolah Di Kab/Kota 8. Pelaksanaan Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA Se-Prov.Banten Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Adanya dukungan dari Instansi Pembina (Perpustakaan Nasional RI) khususnya dalam hal sertifikasi perpustakaan		
					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	13	13	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Dongeng dan Crafting 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan 3. Pelaksanaan Kegiatan Perpustakaan Keliling dan Koleksi Simpan Pakai 4. Pelaksanaan Kegiatan Kelas Pemustaka Faktor Penghambat: Terdapat Pengurangan Anggaran pada APBDP Sebesar Rp. 117.250.000 pada Kegiatan Kelas Pemustaka. Faktor Pendukung: Adanya kerjasama dengan masyarakat dalam pembangunan uruan perpustakaan (misal TBM, Sekolah. Komunitas,dll)		
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.091	2.091	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Penelusuran Karya Cetak Karya Rekam dan Penyusunan Literatur Sekunder 2. Pelaksanaan Peningkatan Koleksi Perpustakaan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan penerbit dan adanya e-catalog mempermudah proses seleksi bahan pustaka	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						Tidak ada	
					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	56	56	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Literasi Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat 2. Pelaksanaan Gerakan Banten Membaca SMA/SMK/MA Se- Provinsi Banten Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Adanya kerjasama pembangunan budaya baca dengan masyarakat dan komunitas	Tidak ada	Tidak ada
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	4	4	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemberian penghargaan kepada penggiat literasi dalam rangka peningkatan budaya baca Faktor Penghambat: Penyerahan Hadiah lomba yang harusnya 4 Katogori hanya diberikan 2 katagori karna hanya ada 2 kategori yang berhasil masuk ke tingkat nasional Faktor Pendukung: Adanya masyarakat yang membantu tupoksi pembinaan minat baca melalui	Ke depan akan lebih konsisten pada target dan perencanaan kegiatan , dan semua akan dilaksanakan	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												penggiat literasi daerah		
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	40	40	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) 2. Pelaksanaan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK, sisa anggaran berasal dari sisa uang saku peserta Bimtek yang tidak memenuhi kuota dan perjalanan dinas monitoring yang tidak terserap semua Faktor Pendukung: Dukungan Program TPBIS dari Perpustakaan Nasional RI dan sudah adanya pilot project TBIS di Kab/Kota	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan, kuota peserta akan disesuaikan dengan kebutuhan	Tidak ada
17	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan												
				PROGRAM PENGELOLA ARSIP										
							Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	Keterangan: Tahun 2022 sebanyak 43.768 arsip sudah dipreservasi. Pada Desember 2023 sudah dilaksanakan preservasi sebanyak 8.735 arsip. Sehingga capaiannya adalah 8.753: 43.768x 100% = 20%. Catatan : yang	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												dilaksanakan adalah preservasi preventif berupa fumigasi Faktor Pendorong : Adanya dukungan anggaran dan SDM untuk melaksanakan preservasi Faktor Penghambat:Jumlah arsip statis cenderung bertambah setiap tahun sehingga kesulitan untuk menentukan di awal perencanaan, berapa sebenarnya total arsip statis yang kita miliki		
							Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	20,00	15,42	77,10	Tinggi	Keterangan : Pengguna layanan kearsipan melalui JIKN pada tahun 2022 sebanyak 36.362 pengguna, dan capaian pengguna layanan kearsipan sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebanyak 41.970 pengguna. Persentase kenaikannya adalah = $\frac{5608}{36362} \times 100 = 15,42\%$ Faktor Pendorong : adanya dukungan koleksi arsip statis yang sudah diupload ke website JIKN. Faktor Penghambat : Koordinasi internal percepatan upload arsip statis ke aplikasi JIKN agak lemah.	Peningkatan koordinasi internal untuk percepatan dan ragam tema upload arsip ke dalam JIKN dan melakukan publikasi menyeluruh agar masyarakat dapat memanfaatkan JIKN secara lebih optimal	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						Tidak ada	
					Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	36.000	36.000	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Persiapan Pengelola arsip Dinamis konvensional, arsip vital, arsip media baru dan arsip inaktif OPD 2. Laporan hasil pendampingan arsip vital, arsip dinamis konvensional, arsip media baru dan arsip inaktif opd 3. Laporan hasil pendampingan arsip media baru dan arsip inaktif opd 4. Laporan hasil pendampingan arsip vital, arsip dinamis konvensional dan arsip inaktif opd 5. Laporan hasil pendampingan arsip inaktif opd Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Pengelola arsip OPD di lingkup Provinsi Banten sudah di SK kan dan di beri penghargaan berupa honor bulanan	Tidak ada	Tidak ada
					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60.000	60.000	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Hasil Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												2. Laporan hasil Konsultasi dan Koordinasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dengan ANRI 3. Laporan hasil Pendampingan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan0 Faktor Pendukung: Pengelola arsip OPD di lingkup Provinsi Banten sudah di SK kan dan di beri penghargaan berupa honor bulanan		
						Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	18,00	18,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Persiapan Pengawasan Arsip Eksternal dan Internal dan publikasi hasil pengawasan 2. Laporan Hasil Rakortek dan laporan hasil pengawasan/audit pengawasan internal OPD Prov. Banten dan publikasi hasil pengawasan 3. Laporan hasil Pengawasan internal OPD Prov. Banten dan Laporan hasil pengawasan Eksternal LKD 8 Kab/Kota dan publikasi hasil pengawasan 4. Laporan hasil pengawasan Eksternal	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											LKD 8 Kab/Kota dan publikasi hasil pengawasan 5. Laporan Hasil Rakortek dan laporan hasil pengawasan internal OPD Prov. Banten serta laporan hasil pengawasan eksternal LKD Kab/Kota dan publikasi hasil pengawasan Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Adanya pengelola arsip di OPD dan LKD Kab/Kota yang sudah dibina oleh DPK Provinsi Banten		
				Pengelolaan Arsip Statis Provinsi		Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						Tidak ada	
					Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	2,00	2,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Bulanan Realisasi Sub Kegiatan SAKIP (1 Laporan) 2. Rancangan Awal Renja Sub Kegiatan Tahun 2024 (1 Dokumen) 3. Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (1 Dokumen) Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Faktor Pendukung: Potensi naskah asli arsip yang ada di masyarakat		
						Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	3.000	3.000	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Bulanan Realisasi Sub Kegiatan SAKIP (1 Laporan) 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (1 Dokumen) 3. Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses (1 Dokumen) Faktor Penghambat: Penggantian Arsip asli kepala Daerah hanya terrealisasi 1 dari 4 arsip asli dengan alasan pihak keluarga keberatan menyerahkan arsip dan arsip tersebut masih digunakan. Faktor Pendukung: Potensi arsip statis yang ada di OPD, masyarakat dan Depo Arsip Provinsi	Ke depan lebih giat lagi dalam melakukan penelusuran arsip di masyarakat. Serta konsiten terhadap target yang sudah direncanakan	Tidak ada
					Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Ketercapaian Jumlah Pengguna Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						Tidak ada	
						Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah pengguna Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	76.517	76.517	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Sipling 6 titik, pemutara film dokumenter 1kali, bedah arsip 1 keg., Inhouse Training SIKN JIKN	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												2. Laporan Sipling 6 titik, pemutara film dokumenter 1kali, bedah arsip 1 keg 3. Laporan Sipling 6 titik, pemutara film dokumenter 1kali, bedah arsip 1 keg., keg. Pengelolaan JIKP, Workshop SIKN JIKN 4. Laporan Sipling 6 titik, pemutara film dokumenter 1kali, bedah arsip 1 keg., keg. Pengelolaan aplikasi SIKN JIKN Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan. Faktor Pendukung: Adanya dukungan aplikasi yang dikembangkan dan dibina oleh instansi pembina (ANRI)		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										
							Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media	20,00	18,06	90,30	Sangat Tinggi	Keterangan: Jumlah alih media arsip tahun 2022 adalah sebesar 43.768 arsip. Capaian alih media Januari - Desember 2023 adalah = 7905 Persentase penghitungannya adalah = $7905/43.768 \times 100\% = 18,06\%$ Faktor Pendorong : Sudah adanya nomenklatur kegiatan tersendiri yang mewadahi alih media arsip dalam SOTK baru Faktor Penghambat: Masih proses penataan	Tidaka ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											organisasi dan Bidang baru belum dilengkapi dengan sarana prasarana scaner yang mencukupi		
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun							
					Penilaian , Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300	300	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemusnahan Arsip OPD yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun 2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengelola Arsip Dinamis SMA/SMK Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK realisasi anggaran sisa dari kegiatan Faktor Pendukung: Adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pemusnahan arsip	Tidak ada	Tidak ada
					Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	300	300	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tidak ada Faktor Penghambat: Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip belum mendapat persetujuan dari pimpinan Faktor Pendukung: Adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pemusnahan arsip	Komunikasi intensif dengan pimpinan agar surat persetujuan pemusnahan arsip bisa segera ditandatangani oleh Pj Gubernur	Tidak ada
					Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip						Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Hasil Alih media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi							
					Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1,00	1,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan ROK, terdapat efisiensi dari honor narasumber dan makan minum Faktor Pendukung: Adanya potensi arsip yang bisa diautentifikasi	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan , karena silpa cukup tinggi dari efisiensi	Tidak ada
					Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000,00	5.000,00	100,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Faktor Penghambat: target 50 dilaksanakan 46 tersisa 4 titik dikarenakan keterbatasan waktu setelah APBD-P Faktor Pendukung: Adanya dukungan sarana prasarana untuk melakukan alih media	Lebih cermat dalam menyusun rancangan kegiatan , karena silpa cukup besar. Kedepan akan lebih konisten pada perencanaan dan melaksanakan semua target yang disusun	Tidak ada

3.3.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
I	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN												
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN									
						Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	25	32,61	130,44	Sangat Tinggi	- Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan tersebar hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu : a. Sertifikat di dalam kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan kompensasi belum selesai b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang tidak tuntas di masa lalu c. Adanya tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan sawit Masih adanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Belum adanya sinergitas program dan kegiatan antar OPD baik di tingkat Provinsi Banten maupun OPD di tingkat Kabupaten/Kota serta kerjasama yang	- Mengadakan sosialisasi peraturan terbaru terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Pinjam Pakai kawasan Hutan - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengelola kawasan hutan (Perum Perhutani) dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi pada kawasan hutan - Meningkatkan koordinasi dan melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan OPD lintas sektor baik antar OPD Provinsi Banten maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Banten; - Melakukan kegiatan-kegiatan temu usaha untuk membuka peluang-peluang pemasaran hasil produksi HHBK;	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; - Kelembagaan petani dan kelembagaan usaha belum mampu mendorong petani untuk memanfaatkan peluang usaha di bidang industri hilir		
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00		Belum tersosialisasinya peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan terutama terkait peraturan terbaru sebagai turunan dari UU Cipta Kerja secara menyeluruh	Mengadakan sosialisasi peraturan terbaru terkait kebijakan perundang – undangan di bidang kehutanan baik bagi pengelola kawasan hutan negara (Perum Perhutani) dan masyarakat sekitar kawasan hutan	
					Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00				
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00		- Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk bertani dan berkebun sehingga memanfaatkan kawasan hutan dan adanya sertifikat ganda di dalam kawasan hutan	- Mengadakan sosialisasi peraturan terbaru terkait kebijakan perundang – undangan di bidang kehutanan baik bagi pengelola kawasan hutan negara (Perum Perhutani) dan masyarakat sekitar kawasan hutan	
					Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 dokumen	100,00				
					Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 dokumen	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 dokumen	100,00				
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	15 Unit manajemen	15 Unit manajemen	100,00		Masih lemahnya sumberdaya manusia dan kelembagaan serta kurangnya informasi pasar serta masih kendala pemasaran dikarenakan hasil-hasil produksi bidang kehutanan masih banyak yang belum memenuhi syarat untuk dipasarkan secara luas sehingga perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada kelompok;	Memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas baik aparatur maupun kelompok-kelompok pembudidaya HHBK agar semakin kuatnya sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok;	
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	100,00				
					Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	14 Unit Manajemen	14 Unit Manajemen	100,00				
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Ketercapaian Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala	10 unit manajemen	10 unit manajemen	100,00		- Tidak semua industri IU-IPHHK yang menyampaikan laporan bulanan RPBB dan SIPUHH kepada Dinas Lingkungan Hidup dan	- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin ke Industri Kehutanan yang ada di provinsi banten yang telah berizin maupun tidak berizin dengan bekerjasama dengan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani					Kehutanan Provinsi Banten. - Belum ada kesepakatan dari industri kehutanan terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan	seksi lain dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Mendorong industri kehutanan yang belum memiliki izin usaha untuk mendaftarkan memiliki izin usaha di bidang kehutanan dengan mengadakan fasilitasi perizinan di bidang kehutanan	
					Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	5 Unit Management	5 Unit Management	100,00				
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit management	5 Unit management	100,00				
						Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	2500	2.837,63	113,51	Sangat Tinggi	- masih luas nya lahan kritis - masih minimnya upaya penyebarluasan dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan	- Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. - Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.	
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		tidak ada masalah	tidak ada masalah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Di wilayah CDLHK LT							
					Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	100%	100%	100,00		- Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja - Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM). Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas.	- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Penugasan, rapat kerja teknis, sosialisasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis yang terus menerus kepada SDM aparatur, unsur Penyuluh, PKSM dan Kelompok tani Hutan. - Optimalisasi teknologi komunikasi melalui alat komunikasi handphone.	
					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	325 Ha	325 Ha	100,00				
					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	9 hektar	9 Ha	100,00				
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	100,00				
					Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	40 Laporan	40 Laporan	100,00				
					Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	2 Hektar	2 Hektar	100,00				
						Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah	2500	2.582,71	103,31	Sangat Tinggi	- masih luas nya lahan kritis - masih minimnya upaya penyebarluasan	- Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Pandeglang, Serang dan Cilegon					dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan	bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. - Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.	
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		tidak ada masalah	tidak ada masalah	
					Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	100%	100%	100,00		- Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja - Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM). Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas.	- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Penugasan, rapat kerja teknis, sosialisasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis yang terus menerus kepada SDM aparatur, unsur Penyuluh, PKSM dan Kelompok tani Hutan. - Optimalisasi teknologi komunikasi melalui alat komunikasi handphone.	
					Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00				
					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	478 Ha	478 Ha	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Hektar	5 Hektar	100,00				
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	247 Unit	247 Unit	100,00				
					Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	31 Ha	31 Ha	100,00				
					Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	2 Laporan	100,00				
					Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	22 Hektar	22 Hektar	100,00				
						Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	90	90,38	100,42	Sangat Tinggi	- Kompetensi SDM yang tidak ter up grade setiap tahunnya, padahal teknologi perbenihan terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman dan nilai ekonomis dari setiap jenis tanaman; - Sarana dan prasarana yang rusak yang mengganggu proses produksi di laboratorium kultur jaringan sehingga banyak tanaman mati terkontaminasi penyakit karena rusaknya bangunan dan tidak berfungsinya pendingin ruangan. - Kondisi persemaian yang memerlukan perbaikan terutama pada tiang penyangga paranet, system penyiraman otomatis dan perlindungan dari binatang besar dan unggas yang masuk	- Data minimal kebutuhan anggaran per kegiatan sesuai target renja. - Memiliki lahan sendiri sehingga pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dapat dilaksanakan. - Penambahan SDM yang berkompeten untuk pelaksana teknis kegiatan terutama yang berstatus PNS/P3K.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											dalam persemaian. - Jumlah pegawai yang masih kurang terutama untuk kegiatan di persemaian permanen dan laboratorium kultur jaringan yang berkompeten. - Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi distribusi bibit tanaman hutan dan produktif untuk masyarakat		
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	Ketercapaian ketersediaan jumlah bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat pada UPTD SPTH	182.401 Batang	184.695 batang	101,26		Sarana dan prasarana yang rusak yang mengganggu proses produksi di laboratorium kultur jaringan sehingga banyak tanaman mati terkontaminasi penyakit karena rusaknya bangunan dan tidak berfungsinya pendingin ruangan.	Mengajukan pengadaan lahan sehingga pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dapat dilaksanakan.	
					Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Hutan dan Produktif bersertifikat yang tersedia	182.401 Batang	184.695 batang	101,26				
					Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	100%	100%	100,00		- Masih rendahnya kemauan Pelaku usaha perbenihan tanaman hutan mendaftarkan perusahaannya karena lebih menguntungkan menjual benih/bibit non sertifikat langsung kepada petani hutan; - Sulitnya mendapatkan luasan garapan petani hutan yang dapat di jadikan calon sumber benih dengan syarat minimal seluas 1 (satu) Ha. Syarat penetapan sumber benih berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 03	Perlu adanya pemberian reward sebagai bentuk motivasi Pelaku Usaha Perbenihan Tanaman Hutan berupa pekerjaan pengadaan penunjukan langsung kepada Pengadaan Pengedaran Benih Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, serta rutin melakukan pembinaan kepada Kelembagaan Majelis Perbenihan dan Pembibitan Indonesia Kehutanan di Provinsi Banten; - Perlu adanya perubahan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap syarat luasan penetapan sumber benih tanaman hutan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;		
					Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100,00				
					Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100,00				
					Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100,00				
					Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	10 Sertifikat	10 Sertifikat	100,00				
					Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	100,00				
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA									
						Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Perda pengelolaan Tahura Banten baru disahkan pada akhir tahun 2023 sehingga sosialisasi pengelolaan Tahura Banten belum optimal.	Perlu nya sosialisasi terkait Perda yang baru dttatpkan pada tahun anggaran berikutnya	
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100%		100,00		tidak ada masalah	tidak ada masalah	
					Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah desa pelaksanaan penyuluhan tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	4 Desa	4 Desa	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	48 Operasi	48 Operasi	100,00				
						Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	60 Ha	60 Ha	100,00				
						Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Luas Areal Pengelolaan Koridor Hidupan Liar pada Jenis Satwa Liar di Habitatnya yang berada di Kawasan Tahura Provinsi	100 Ha	100 Ha	100,00				
						Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12,5 Ha	12,5 Ha	100,00				
						Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	3 Permohonan	3 Permohonan	100,00				
						Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
						Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4 Desa	4 Desa	100,00				
						Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui pembinaan daerah penyangga di sekitar Tahura Banten	5 Desa	5 Desa	100,00				
						Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
						Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Lapora n	1 Laporan	100,00		Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	Perlu dilaksanakan kegiatan pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diwilayah Lebak dan Tangerang	
					Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Lapora n	1 Laporan	100,00				
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	100%	100%	100,00		tidak ada masalah	tidak ada masalah	
					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	1 Ha	1 Ha	100,00				
					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	1 Ha	100,00				
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	40 Orang	100,00				
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah	1 Lapora n	1 Laporan	100,00		Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	Perlu dilaksanakan kegiatan pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi diwilayah pandeglang serang dan cilegon	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Pandeglang Serang dan Cilegon							
					Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/ atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan	100,00				
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	100%	100%	100,00		tidak ada masalah	tidak ada masalah	
					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	5 Ha	5 Ha	100,00				
					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	1 Ha	100,00				
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	40 Orang	100,00				
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100%	100%	100,00		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
					Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00				
					Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	10 Ha	10 Ha	100,00				
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
						Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	42 kelompok	43 kelompok	102,38	Sangat Tinggi	terbatasnya Bantuan alat untuk menunjang organisasi Kelompok Tani Hutan	Mengusulkan bantuan alat sarana prasarana organisasi kelompok tani hutan	
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100%	100%	100,00		terbatasnya Bantuan alat untuk menunjang organisasi Kelompok Tani Hutan	Mengusulkan bantuan alat sarana prasarana organisasi kelompok tani hutan	
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	160 orang	160 orang	100,00				
					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	40 Kelompok	40 Kelompok	100,00				
					Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha	100,00				
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)									
						Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	20	20	100,00	Sangat Tinggi	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%		100,00		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				
					Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah Laporan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	0 Laporan		100,00				
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	220 Orang	220 Orang	100,00				
					Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00				
					Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Laporan	1 Laporan	100,00				
2	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
		Dinas Kelautan dan Perikanan											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100	Sangat Tinggi	Keterangan : Realisasi menggunakan nilai akumulasi Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bappeda Faktor Pendorong : 1. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 2. Sarana dan prasarana pendukung memadai Faktor Penghambat : 1. Bersifat persediaan sehingga realisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/kondisi 2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi terkait memerlukan waktu yang		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												cukup sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	106 Orang	106 Orang	100				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	100				
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	100				
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100				
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									
						Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi	2 Hektar	2 Hektar	100	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tingginya dukungan dari stakeholder terhadap lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Faktor Penghambat : minimnya lahan konservasi penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha	1 Ha	100				
					Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100 Persen	100 Persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100				
						Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100				
						Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100				
						Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100 Persen	100 Persen	100				
						Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	4 Kelompok	100				
						Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	114 Orang	114 Orang	100				
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
							Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan	75 Rekomendasi	202 Rekomendasi	269,33	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tinggi nya permintaan hasil perikanan tangkap serta adanya subsidi bagi nelayan kapal perikanan kewenangan provinsi untuk mendapatkan BBM subsidi Faktor Penghambat : masih belum meratanya sarana dan prasarana		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												yang memadai untuk pendaratan hasil penangkapan ikan		
							Produksi Perikanan Tangkap	75632,2	73280,25	96,89	Sangat Tinggi			
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	12 Dokumen	100				
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	1 Unit	100				
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	6 Unit	6 Unit	100				
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Persen	100 Persen	100				
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	3 Dokumen	100				
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	100				
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	12 Dokumen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100 Persen	100 Persen	77,8				
					Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	3 Pelabuhan Perikanan	3 Pelabuhan Perikanan	100				
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	9 Unit	7 Unit	77,78				
					Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Persen	100 Persen	100				
					Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	100				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
						Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani	50 Unit	52 Unit	104,00	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tinggi nya permintaan hasil perikanan budidaya serta banyaknya unit perbenihan skala perusahaan di Provinsi Banten Faktor Penghambat : masih minimnya penerapan teknologi unit budidaya yang menerapkan sistem budidaya intensif		
						Produksi Perikanan Budidaya	111.563 Ton	116.231 Ton	98,11	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100				
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
						Luas Laut yang terawasi	500 Mil Persegi	507 Mil Persegi	101,40	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : peran kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) perikanan yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan kelautan dan perikanan Faktor Penghambat : sarana dan prasarana pengawasan patroli laut yang belum memadai sehingga rutinitas pengawasan masih terbatas		
						Pelaku usaha perikanan yang terawasi	50 Unit Usaha	62 Unit Usaha	124,00	Sangat Tinggi			
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	10 Dokumen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	10 Dokumen	100				
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	10 Dokumen	100				
					Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	15 Kelompok	15 Kelompok	100				
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Perikanan yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10 Dokumen	10 Dokumen	100				
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10 Dokumen	10 Dokumen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Dokumen	10 Dokumen	100				
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
						Hasil uji mutu perikanan	250 Sampel	792 Sampel	316,8	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : penerapan keamanan jaminan mutu pangan hasil perikanan yang wajib diterapkan Faktor Penghambat : masih terbatasnya jenis pengujian yang sudah memiliki standar nasional Indonesia		
						Sertifikasi usaha pemasaran dan pengolahan perikanan	150 Sertifikat	280 Sertifikat	186,67	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100				
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	2 Dokumen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Ketercapaian Jumlah Unit Usaha Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100				
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100				
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	100				
					Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100	Sangat Tinggi	Keterangan : Realisasi menggunakan nilai akumulasi Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bappeda		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											Faktor Pendorong : 1. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 2. Sarana dan prasarana pendukung memadai Faktor Penghambat : 1. Bersifat persediaan sehingga realisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/kondisi 2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi terkait memerlukan waktu yang cukup sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Pers en	100 Persen	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapor an	1 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan	100 Pers en	100 Persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Barang Milik Daerah Penunjang							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100				
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	100				
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	100				
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									
						Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang	2 Hektar	2 Hektar	100	Sangat Tinggi	Keterangan :		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							terehabilitasi dan terkonservasi					Faktor Pendorong : tingginya dukungan dari stakeholder terhadap lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Faktor Penghambat : minimnya lahan konservasi penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100 Persen	100 Persen	100				
						Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha	100				
						Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	200 Orang	200 Orang	100				
						Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100 Persen	100 Persen	100				
						Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	100				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN			TANGKAP							
							Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan	75 Rekom	202 Rekom	269,33	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tinggi nya permintaan hasil perikanan tangkap serta adanya subsidi bagi nelayan kapal perikanan kewenangan provinsi untuk mendapatkan BBM subsidi Faktor Penghambat : masih belum meratanya sarana dan prasarana		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												yang memadai untuk pendaratan hasil penangkapan ikan		
							Produksi Perikanan Tangkap	130.338 Ton	73.280,25 Ton	56,22	Rendah			
						Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	302 Dokumen	302 Dokumen	100				
						Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	100 Dokumen	100 Dokumen	100				
						Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	78,5				
						Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	6 Layanan	100				
						Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
						Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100	Sangat Tinggi	Keterangan : Realisasi menggunakan nilai akumulasi Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bappeda Faktor Pendorong : 1. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 2. Sarana dan prasarana pendukung memadai Faktor Penghambat : 1. Bersifat persediaan sehingga realisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/kondisi 2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi terkait memerlukan waktu yang cukup sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	36 Unit	36 Unit	100				
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	23 unit	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit	14 Unit	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi							
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL										
							Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terhabilitasi dan terkonservasi	2 Hektar	2 Hektar	100	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tingginya dukungan dari stakeholder terhadap lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Faktor Penghambat : minimnya lahan konservasi penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100 Persen	100 Persen	100				
						Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha	100				
						Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200 Orang	200 Orang	100				
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100 Persen	100 Persen	100				
						Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	100				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										
							Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan	75 Rekomendasi	202 Rekomendasi	269,33	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tingginya permintaan hasil perikanan tangkap serta adanya subsidi bagi nelayan kapal perikanan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												kewenangan provinsi untuk mendapatkan BBM subsidi Faktor Penghambat : masih belum meratanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pendaratan hasil penangkapan ikan		
							Produksi Perikanan Tangkap	130.338 Ton	73.280,25 Ton	56,22	Rendah			
					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	302 Dokumen	302 Dokumen	100				
					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	100 Dokumen	100 Dokumen	100				
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 layanan	2 layanan	100				
					Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Ukuran sampai dengan 10 GT								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		Rendah	Keterangan : Realisasi menggunakan nilai akumulasi Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bappeda Faktor Pendorong : 1. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 2. Sarana dan prasarana pendukung memadai Faktor Penghambat : 1. Bersifat persediaan sehingga realisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/kondisi 2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi terkait memerlukan waktu yang cukup sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100				
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	106 Unit	106 Unit	100				
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100				
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
						Hasil uji mutu perikanan	250 Sampel	792 Sampel	316,00	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : penerapan keamanan jaminan mutu pangan hasil perikanan yang wajib diterapkan Faktor Penghambat : masih terbatasnya jenis pengujian yang sudah memiliki standar nasional Indonesia		
						Sertifikasi usaha pemasaran dan pengolahan perikanan	150 Sertifikat	280 Sertifikat	186,67	Sangat Tinggi			
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Ketercapaian Jumlah Unit Usaha Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha					
					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100	Sangat Tinggi	Keterangan : Realisasi menggunakan nilai akumulasi Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bappeda Faktor Pendorong : 1. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 2. Sarana dan prasarana pendukung memadai Faktor Penghambat : 1. Bersifat persediaan sehingga realisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/kondisi 2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi terkait memerlukan waktu yang cukup sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100				
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan	100 Persen	100 Persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Barang Milik Daerah Penunjang							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	100				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
						Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani	50 Unit	52 Unit	104,00	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tinggi nya permintaan hasil perikanan budidaya serta banyaknya unit perbenihan skala perusahaan di Provinsi Banten Faktor Penghambat : masih minimnya penerapan teknologi unit budidaya yang menerapkan sistem budidaya intensif		
						Produksi Perikanan Budidaya	116.231 Ton	114.029,18 Ton	98,11	Sangat Tinggi			
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	100 Persen	100 Persen					
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	4 Unit	100				
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	3 Unit	100				
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Ketercapaian Jumlah Unit Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Kegiatan Perairan Darat yang Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi	52 Unit	52 Unit	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	33 Unit	33 Unit	100				
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit	16 Unit	100				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100	Sangat Tinggi	Keterangan : Realisasi menggunakan nilai akumulasi Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bappeda Faktor Pendorong : 1. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 2. Sarana dan prasarana pendukung memadai Faktor Penghambat : 1. Bersifat persediaan sehingga realisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/kondisi 2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												penyesuaian pada sistem informasi terkait memerlukan waktu yang cukup sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	2Unit	100				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
						Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan	75 Reko m	202 Reko m	269,33	Sangat Tinggi	Keterangan : Faktor Pendorong : tinggi nya permintaan hasil perikanan tangkap serta adanya subsidi bagi nelayan kapal perikanan kewenangan provinsi untuk mendapatkan BBM subsidi Faktor Penghambat : masih belum meratanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pendaratan hasil penangkapan ikan		
						Produksi Perikanan Tangkap	130.338 Ton	73.280,25Ton	56,22	Rendah			
					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	302 Dokumen	302 Dokumen	100				
					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan	100 Dokumen	100 Dokumen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Berukuran sampai dengan 10 GT	Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan							
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100				
					Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	100				
					Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	100				
3	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
		Dinas Pariwisata											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (satuan : persen)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00		Terdapat potongan pada belanja m bizz yang tidak masuk ke dalam realisasi pencapaian keuangan	Mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00		Terdapat potongan pada belanja m bizz yang tidak masuk ke dalam realisasi pencapaian keuangan	Mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku	Tidak ada
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00		Terdapat potongan pada belanja m bizz yang tidak masuk ke dalam realisasi pencapaian keuangan	Mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku	Tidak ada
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00		Terdapat potongan pada belanja m bizz yang tidak masuk ke dalam realisasi pencapaian keuangan	Mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku	Tidak ada
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00		Terdapat potongan pada belanja m bizz yang tidak masuk ke dalam realisasi pencapaian keuangan	Mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku	Tidak ada
					Sub Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00		Terdapat sisa belanja perjalanan dinas eselon III dan uang perjalanan dinas ASN per orang untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang tidak dipergunakan, dikarenakan biaya perjalanan dinas untuk eselon III sudah tertangani oleh kegiatan SPPD sub bagian umum dan kepegawaian dan untuk uang perjalanan dinas per orang tertangani dengan melakukan pembayaran biaya perjalanan untuk 1 orang perjalanan namun teknis pelaksanaannya keberangkatannya	Akan mengalokasikan anggaran biaya perjalanan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan rill dan akan merasionalisasikan kebutuhan biaya perjalanan dinas ASN per orang	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											dilakukan secara bersama - sama (tim)		
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	100		tidak ada	tidak ada	
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100		tidak ada	tidak ada	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100		Terdapat biaya pemotongan administrasi oleh penyedia sehingga realisasi penyerapan keuangan tidak mencapai 100 %	Mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam e purchasing	Tidak ada
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100		Terdapat biaya pemotongan administrasi oleh penyedia sehingga realisasi penyerapan keuangan tidak mencapai 100 %	Mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam e purchasing	Tidak ada
					Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2 Dokumen	100		Terdapat biaya pemotongan administrasi oleh penyedia sehingga realisasi penyerapan keuangan tidak mencapai 100 %	Mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam e purchasing	Tidak ada
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100		Terdapat biaya pemotongan administrasi oleh penyedia sehingga realisasi penyerapan keuangan tidak mencapai 100 %	Mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam e purchasing	Tidak ada
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100		Terdapat biaya pemotongan administrasi oleh penyedia sehingga realisasi penyerapan keuangan tidak mencapai 100 %	Mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam e purchasing	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100		Terdapat biaya pemotongan administrasi oleh penyedia sehingga realisasi penyerapan keuangan tidak mencapai 100 %	Mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam e purchasing	Tidak ada
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
					Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Terdapat belanja penjiilidan yang tidak dipergunakan dikarenakan penggunaan laporan tidak memerlukan belanja penjiilidan	tidak akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk pembelanjaan penjiilidan	Tidak ada
					Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Terdapat belanja penjiilidan yang tidak dipergunakan dikarenakan penggunaan laporan tidak memerlukan belanja penjiilidan	tidak akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk pembelanjaan penjiilidan	Tidak ada
					Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100		Terdapat belanja penjiilidan yang tidak dipergunakan dikarenakan penggunaan laporan tidak memerlukan belanja penjiilidan	tidak akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk pembelanjaan penjiilidan	Tidak ada
					Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100		Terdapat belanja penjiilidan yang tidak dipergunakan dikarenakan penggunaan laporan tidak memerlukan belanja penjiilidan	tidak akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk pembelanjaan penjiilidan	Tidak ada
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Terdapat belanja penjiilidan yang tidak dipergunakan dikarenakan penggunaan laporan	tidak akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk pembelanjaan penjiilidan	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												tidak memerlukan belanja penjiilidan		
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Terdapat belanja penjiilidan yang tidak dipergunakan dikarenakan penggunaan laporan tidak memerlukan belanja penjiilidan	tidak akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk pembelanjaan penjiilidan	Tidak ada
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Terdapat belanja penjiilidan yang tidak dipergunakan dikarenakan penggunaan laporan tidak memerlukan belanja penjiilidan	tidak akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk pembelanjaan penjiilidan	Tidak ada
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan mengingat terdapat biaya yang sudah dianggarkan ke dalam paket pelatihan namun oleh penyedia biaya dimaksud tidak tersedia	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	160 Orang	100		Terdapat ketidakhadiran dari jumlah peserta yang direncanakan hal ini disebabkan adanya kegiatan lain yang diikuti oleh beberapa peserta tersebut	akan melakukan penegasan melalui surat pemberitahuan terkait kewajiban para pegawai untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut	Tidak ada
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
						Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan mengingat terdapat biaya yang sudah dianggarkan ke dalam	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												<i>paket pelatihan namun oleh penyedia biaya dimaksud tidak tersedia</i>		
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan mengingat terdapat barang - barang yang masih dapat dipergunakan tanpa harus dibeli kembali	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
						Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100		Terdapat belanja penggandaan yang tidak dipergunakan dikarenakan terdapat kelebihan penganggaran penggandaan pada kegiatan tersebut	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100		belanja makan minum kegiatan tamu dapat terfasilitasi pada kegiatan makan minum umum	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100		Terdapat belanja SPPD yang dianggarkan pada masing - masing kegiatan di bidangnya sehingga belanja SPPD umum menjadi berkurang	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Terdapat kelebihan penganggaran (melebihi volume) sehingga tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	101 Unit	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
						Rata-Rata Lama inap (satuan : Hari)	1,66	1,51	90,96	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
						Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : persen)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								
					Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Pariwisata Provinsi (Satuan : Dokumen)							
					Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								
					Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (satuan : lokasi)	9 Lokasi	9 Lokasi	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi								
					Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Satuan : Lokasi)	13 Lokasi	13 Lokasi	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								
					Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Satuan : Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (satuan : Kawasan)	2 Kawasan	2 Kawasan	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (satuan : unit)	11 Unit	11 Unit	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Prvinsi (satuan : Laporan) Ket	2 Laporan	2 Laporan	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						: ref dari Permendagri No : 18/2021							
					Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
					Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (Satuan : Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi (Satuan : Unit Usaha)	24 Unit Usaha	24 Unit Usaha	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual									
						Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 4998799,05)	4.998.799	2.347.107	46,95	Sangat Rendah	Rendahnya pengeluaran disebabkan adanya keterbatasan daya beli masyarakat (faktor ekonomi global) serta ditunjang masih rendahnya daya saing produk lokal kerajinan, kuliner dan home stay di Provinsi Banten	Meningkatkan daya saing produk pariwisata melalui pengemasan produk hingga pemasaran produk di lokasi - lokasi strategis/lokasi destinasi wisata	Tidak ada
					Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif								
					Sub Kegiatan Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif (Satuan : Unit)	6 Unit	6 Unit	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
					Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (satuan : Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								
					Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (satuan : Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Kekayaan Intelektual yang terfasilitasi (satuan : Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas (satuan : Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				Program Pemasaran Produk Pariwisata									
						Persentase Jumlah Promosi Wisata (%)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
						Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (%)	5	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								
					Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data, Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
						Persentase SDM yang memiliki sertifikat di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (%)	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								
					Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya (Satuan : Orang)	414 Orang	414 Orang	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Satuan : Orang)	830 Orang	830 Orang	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (satuan : Orang)	160 Orang	160 Orang	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (satuan : Orang)	661 Orang	661 Orang	100		Adanya kelebihan anggaran yang tidak dipergunakan	akan lebih teliti untuk menganggarkan komponen biaya tersebut	Tidak ada
					Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								
					Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (satuan : Orang)	100 Orang	100 Orang	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
					Sub Kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di bidang Ekonomi Kreatif (satuan : Orang)	120 Orang	120 Orang	100		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
		Dinas Pertanian											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang	100	100	100	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/Bulan	200 Orang/Bulan	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	2 Dokumen	100				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18 Laporan	18 Laporan	100				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	100				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit	2 Unit	100				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	100 persen	100 persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah	10 Unit	10 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Paket	1 Paket	100				
					penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	100 persen	100				
					Pemeliharaan alat dan mesin lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100				
					Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	100				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	1 Unit	1 Unit	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Paket	4 Paket	100				
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah	5 Unit	5 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	100				
					penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Uni	12 Uni	100				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	7 Paket	7 Paket	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	2 Paket	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Paket	5 Paket	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah	12 Laporan	12 Laporan	100				
					penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 persen	100 persen	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	30 Unit	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah			100				
					Penyediaan Komponen Instalasi	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	2 Paket	100				
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Paket	3 Paket	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah	6 Unit	6 Unit	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	100 persen	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	2 Unit	2 Unit	100				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	2 Paket	2 Paket	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Paket	2 Paket	100				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	100 persen	100				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Belanja Pengadaa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Belanja Pengadaa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10 Unit	10 Unit	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah			100				
					penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar	100 persen	100 persen	100				
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
						Produktivitas padi (Kw/Ha)	52,00	53,71	103,29	Sangat Tinggi			
						Peningkatan Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	42,20	70,51	167,09	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah (Kw/Ha)	12,40	11,3	91,13	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas cabai (Kw/Ha)	8,75	8,87	101,37	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas Durian (Kw/ha)	7,91	9,00	113,78	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih (sertifikat)	409,00	237	57,95	Rendah			
							Peningkatan Produktivitas kelapa (Ton)	0,77	4,03	523,38	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas aren (Ton/pohon)	2,95	2,52	85,42	Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas Daging sapi (kg)	230,06	241,25	104,86	Sangat Tinggi			
							Tersedianya bibit ternak ruminansia bembu (ekor)	339	689	203,24	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas Daging kerbau (kg)	145,88	141,28	96,85	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas Daging domba (kg)	12,95	14,23	109,88	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas Daging kambing (kg)	12,84	13,76	107,17	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas Daging ayam ras (Kg)	1,17	1,32	112,82	Sangat Tinggi			
							Peningkatan Produktivitas Pisang (Kg/rumpun)	3,38	2,9	85,80	Tinggi			
					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	100 persen	100 persen	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	100,00				
					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	100,00				
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	12 Laporan	12 Laporan	100,00				
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	4 Laporan	4 Laporan	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Peredaran Benih/Bibit pangan							
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	4 Laporan	4 Laporan	100,00				
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	4 Laporan	4 Laporan	100,00				
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman BPSB	Ketercapaian Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman BPSB			100,00				
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	401 Sertifikat	237	100,00				
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	8 Laporan	8 Laporan	100,00				
					Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	50 ton	50 ton	100,00				
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi P3T	Ketercapaian Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi P3T			100,00				
					Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduks	4 Laporan	4 Laporan	100,00				
					Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan	4 laporan	4 laporan	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	umlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00				
					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00				
					Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	8 Laporan	8 Laporan	100,00				
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100 persen	100 persen	100,00				
					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	4 Laporan	4 Laporan	100,00				
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100 persen	100 persen	100,00				
					Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Kultivar	1 Kultivar	100,00				
					Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Ketercapaian Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	100%	-	100,00				
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	Persentase Ketercapaian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	100%	-	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain							
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
						Peningkatan Akses Infrastruktur Pertanian (KM)	28,40	66,70	234,86	Sangat Tinggi			
					Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	100 persen	100 persen	100				
					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen	4 Dokumen	100				
					Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen	4 Dokumen	100				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tan	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	100				
					Penataan Prasarana Pertanian UPT PPV				100				
					Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 unit	1 unit	100				
					Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 laporan	1 laporan	100				
					Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit	1 Laporan	1 Laporan	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dan Rumpun/Galur Ternak	Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
						Penurunan jumlah kasus penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (satuan;Jumlah Kasus)	22,00	4,00	198,00	Sangat Tinggi			
						Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Hewan (satuan;Unit Usaha)	37,00	37,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	ketercapaian jumlah laporan kegiatan Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 laporan	4 laporan	100				
					Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 Laporan	4 Laporan	100				
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	8 laporan	8 laporan	100				
					Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	100				
					Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provins	4 Laporan	4 Laporan	100				
					Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	ketercapaian Jumlah Sertifikasi kegiatan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	155 sertifikat	155 sertifikat	100				
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	125 Sertifikat	125 Sertifikat	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kesejahteraan Hewan	ketercapaian Jumlah sertifikat kegiatan Kesejahteraan Hewan	155 sertifikat	155 sertifikat	100				
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	125 Sertifikat	125 Sertifikat	100				
					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	ketercapaian Jumlah dokumen Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	4 dokumen	4 dokumen	100				
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 dokumen	4 dokumen	100				
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
						Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (satuan %)	95,00	97,00	102,11	Sangat Tinggi			
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Ketercapaian Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	20400 Ha	20400 Ha	100				
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20400 Ha	20400 Ha	100				
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	20400 Ha	20400 Ha	100				
					Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20400 Ha	20400 Ha	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	12 Laporan	100				
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi (UPI BPTPHP)	Ketercapaian Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	20400 Ha	20400 Ha	100				
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20400 Ha	20400 Ha	100				
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	20400 Ha	20400 Ha	100				
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
						Rekomendasi izin usaha pertanian (Sertifikat)	229,00	280,00	122,27	Sangat Tinggi			
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	4 laporan	100				
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	4 Laporan	4 Laporan	100				
					Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi (%)	100,00	-	100,00				
					Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan (%)	100,00	-	100,00				
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dan petani	276,00	276,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Ketercapaian Jumlah Orang kegiatan pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	68 Orang	68 Orang	100				
					Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang	34 Orang	100				
					Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	34 Orang	34 Orang	100				
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Ketercapaian Jumlah kelompok kegiatan Pengembangan Penerapan penyuluhan Pertanian	48 kelompok	48 kelompok	100				
					Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen	4 Dokumen	100				
					Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	48 Kelompok	48 Kelompok	100				
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	4 laporan	4 laporan	100				
					Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	4 laporan	4 laporan	100				
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	48 Unit	48 Unit	100				
5	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)							
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25	25	100,00				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		71	71	100,00				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14	14	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan	Sisa anggaran menjadi SILPA	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Tunjangan ASN (Orang/Bulan)					yang merupakan efesiensi kegiatan		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	100,00				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	100,00				
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	100,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	100,00				
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	100,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	100,00				
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)	1	1	100,00				
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5	5	100,00				
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100,00				
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17	17	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	100,00				
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8	8	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	100,00				
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		52	52	100,00				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5	5	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	47	47	100,00				
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	36	100,00				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		156	156	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	119	119	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	100,00				
				Program Pengelolaan Aspek Kegeologian									
						Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	56,52	57,71	102,10	Sangat Tinggi			
					Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		6	6	100,00				
					Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	6	6	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		26	35	114,29				
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	21	30	142,86		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	100,00				
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	100,00				
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara													
						Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	45,40	72,39	159,46	Sangat Tinggi			
					Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		8	24	188,89				
					Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	1	1	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	6	22	366,67				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Laporan)	1	1	100,00				
					Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		13	57	393,33				
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	7	7	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	5	49	980,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan	1	1	100,00				
					Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		6	6	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	2	2	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	0	0	0,00				
					Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (Laporan)	4	4	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Program Pengelolaan Energi Terbarukan										
							Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	17,86	17,86	100,00	Sangat Tinggi			
					Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			6	6	100,00				
						Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan (Dokumen)	5	5	100,00		Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efesiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan (Laporan)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Ketenagalistrikan										
							Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah	17.000	11.339	66,70	Sedang	1. Adanya Keterbatasan pendanaan/ Anggaran untuk pembangunan	1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait khususnya Bappeda dan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Terpencil dan Perdesaan (RTS)					infrastruktur penyediaan tenaga listrik; 2. Untuk tahun 2023 anggaran dari APBD hanya tersedia untuk 8.500 RTS dan 2.839 RTS dari Anggaran APBN;	Pemerintah Pusat 2. Menyampaikan Usulan untuk dibiayai APBN melalui Kementerian ESDM	
							Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	77,17	83,67	108,42	Sangat Tinggi			
					Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			8.506	8.506	100,00				
					Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Laporan)	6	6	100,00	Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efisiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	8500	8500	100,00			
					Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan				80	157	136,67			
					Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan			Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan	7	7	100,00	Terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan yang merupakan efisiensi kegiatan	Sisa anggaran menjadi SILPA	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)							
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	70	147	210,00				
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3	3	100,00				
6	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
						Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	40,00	100,00	250,00	Sangat Tinggi	Setiap permohonan penerbitan rekomendasi teknis perizinan telah ditindaklanjuti sesuai SOP. Pada tahun 2023, jumlah pemohon adalah 107 perusahaan. Disperindag telah melayani 107 perusahaan tersebut sesuai SOP. Kendala yang dihadapi adalah proses survey ke lapangan yang	1) Manajemen waktu pelayanan; 2) Pembagian tugas tim survey disesuaikan dengan target kinerja lainnya/non pelayanan penerbitan rekomtek; 3) Layanan Hotline via Whatsapp.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											diwajibkan sebagai syarat sebelum penerbitan rekomtek terkadang berbenturan dengan aktivitas pekerjaan lain. Namun, sejauh ini masalah tersebut dapat dikendalikan dengan baik.		
					Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	100,00	100,00	100,00				
					Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar / Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar / Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	14	14	100,00				
					Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	100,00	100,00	100,00				
					Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	30	30	100,00				
					Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	100,00	100,00	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat	4	4	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Keterangan Asal							
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8	8	100,00				
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										
							Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	6,39	6,24	97,65	Sangat Tinggi	Pada tahun 2023, Disperindag mencatat terdapat 2828 sarana perdagangan di Provinsi Banten; artinya bertumbuh 6,24% dibandingkan tahun 2022 (sarana perdagangan tahun 2022 berjumlah 2662)		
					Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Persentase ketercapaian Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	1	100,00		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	4	4	100,00		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	14	14	100,00		Tidak Ada	Tidak Ada	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										
							Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	5,00	10,53	210,60	Sangat Tinggi	Koefisien variasi tersebut merupakan KV rata-rata dari 7 komoditi yaitu bawang merah rogol askip (7,69%), beras premium (8,4%), cabe rawit merah (29,29%),	Bekerjasama dengan distributor barang kebutuhan pokok untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke pengecer/retail serta masyarakat sebagai konsumen akhir. Selain itu,	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											daging ayam ras (6,51%), minyak goreng kemasan sederhana (6,67%), telur ayam ras (6,66%) dan daging sapi murni (7,10%). Kenaikan harga kebutuhan pokok umumnya terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal karena jumlah barang yang diminta terus meningkat sedangkan jumlah barang tetap atau cenderung kurang.	pemantauan harga juga dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok baik secara online melalui Sistem Informasi Harga Bahan Pokok (SIHBAPOK) maupun pemantauan secara langsung ke pasar-pasar di 8 Kab/Kota di Provinsi Banten. Operasi pasar juga dilakukan sebagai upaya pengendalian harga barang kebutuhan pokok.	
						Persentase kinerja realisasi pupuk	75,49	60,06	79,56	Tinggi	Pada tahun 2023, alokasi pupuk berdasarkan RDKK adalah 160.350 ton. Hingga Bulan November 2023, yang telah direalisasikan adalah 96.307 ton. Disperindag Provinsi Banten telah melakukan pengawasan terhadap 96.307 ton pupuk yang didistribusikan ke petani di wilayah Provinsi Banten. Kendala yang dihadapi diantaranya masih terdapat beberapa distributor pupuk yang belum menyampaikan Laporan Penyaluran Distribusi Pupuk secara rutin dan berkala, sehingga menghambat pengawasan alur distribusi	Bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten terkait penyediaan data alokasi pupuk yang digunakan sebagai database pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Banten.	
					Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan	3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						<i>Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	<i>Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>						
						<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>	1	1	100,00			
						Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100,00	100,00	100,00			
						<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	12	12	100,00			
						<i>Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	2	2	100,00			
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	100,00	100,00	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1	1	100,00				
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	100,00	100,00	100,00				
					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	1	1	100,00		1. Masih terdapat beberapa distributor pupuk belum sesuai dengan KBLI yang ditetapkan 2. Masih terdapat kelompok tani yang belum terdata pada e-Alokasi. Sehingga kios belum maksimal dalam mendistribusikan pupuk	Bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten terkait penyediaan data alokasi pupuk yang digunakan sebagai database pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Banten.	
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	1	100,00		Masih terdapat beberapa distributor pupuk yang belum menyampaikan Laporan Penyaluran Distribusi Pupuk secara rutin dan berkala, sehingga menghambat pengawasan alur distribusi.	Bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten terkait penyediaan data alokasi pupuk yang digunakan sebagai database pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Banten.	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
						Pertumbuhan nilai ekspor non migas	26,58	13,39	50,38	Rendah	Jika dibandingkan dengan ekspor non migas tahun 2020 (9656,96 Juta USD), ekspor non migas periode Jan-Nov 2023	Bekerjasama dengan BPS Provinsi Banten dalam penyediaan data ekspor non migas di Provinsi Banten.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											(10950,04 Juta USD) mengalami peningkatan 13,39%. Peningkatan ekspor nonmigas Jan - Nov 2023 dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor sepuluh golongan barang utama.. Peran terbesar berasal dari golongan alas kaki (HS 64) sebesar 18,35%, plastik dan barang dari plastik (HS 39) 10,33%, serta besi dan baja (HS 72) 7,44%..		
					Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100,00	100,00	100,00				
					Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6	6	100,00		Perubahan jadwal pameran secara mendadak dari pihak penyelenggara pameran		
					Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4	4	100,00		Perubahan jadwal pameran secara mendadak dari pihak penyelenggara pameran		
					Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	60	60	100,00		IKM peserta pameran kurang menguasai bahasa asing sehingga komunikasi dengan buyeer terkait penawaran produk tidak bisa disampaikan secara utuh		
					Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	60	60	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50	50	100,00				
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
						Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani	50,00	60,00	120,00	Sangat Tinggi	Pada tahun 2023, Disperindag menerima 5 pengaduan konsumen, 3 diantaranya telah selesai melalui mediasi. Kendala yang dihadapi adalah BPSK Provinsi Banten belum terbentuk. Seleksi anggota BPSK direchedule pada Tahun 2024. Selama tahun 2023, penyelesaian aduan konsumen dilakukan dengan mediasi dibantu oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang beroperasi di Kab/Kota di Provinsi Banten.	Koordinasi intensif dengan Biro Hukum, Inspektorat Provinsi Banten dan Kementerian Perdagangan R.I terkait pembentukan dan seleksi anggota BPSK Provinsi Banten.	
						Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan	36,04	100,00	277,47	Sangat Tinggi	Pada tahun 2023, Disperindag melakukan pengawasan terhadap 118 jenis barang yang beredar di pasar. Kendala yang sering dihadapi selama pengawasan adalah pelaku usaha yang tidak kooperatif selama proses pengawasan barang beredar.	Tim Pengawasan melakukan pendekatan yang humanis kepada para pelaku usaha dan edukasi perlindungan konsumen dilengkapi dengan materi peraturan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha.	
					Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100,00	78,72	78,72				
					Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2	-	0,00		Perubahan jadwal seleksi anggota BPSK	Koordinas intensif dengan Biro Hukum, Inspektorat Provinsi Banten dan Kementerian Perdagangan R.I terkait pembentukan dan seleksi anggota BPSK Provinsi Banten.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	5	5	100,00		Beberapa LPKSM tidak memiliki dokumen yang lengkap sehingga nomor TDLPK tidak dapat diterbitkan	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan pada LPKSM yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten dan berkomitmen untuk tidak menerbitkan TDLPK bagi LPKSM yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah sesuai ketentuan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	2	3	150,00				
					Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00				
					Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	130	130	100,00		1) Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami peraturan terkait standarisasi baik Label Bahasa Indonesia maupun K3L. 2) Belum ada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten sehingga belum dapat menindaklanjuti hasil temuan/pengawasan di lapangan.	1) Pada saat pengawasan, tim juga melakukan edukasi perlindungan konsumen kepada pelaku usaha dengan pendekatan yang humanis 2) Koordinasi intensif dengan Disperindag Jabar dan Lampung perihal perjanjian kerjasama pengawasan barang beredar di daerah perbatasan	
					Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	1	1	100,00		Mahalnya biaya pengujian terhadap produk hasil pengawasan, sehingga parameter yang diuji terbatas karena minimnya anggaran pengujian	Bekerjasama dengan Balai Pengujian Kementerian Perdagangan terkait pengujian produk sampel hasil pengawasan barang beredar.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
						Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	20,00	33,33	166,65	Sangat Tinggi	Masih lemahnya sistem jaringan dan informasi perdagangan	Melakukan sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota dan <i>stakeholder</i> dalam upaya optimalisasi penguatan sistem jaringan dan informasi perdagangan bagi pelaku usaha/IKM yang ada di Provinsi Banten (kerjasama dengan retail-retail modern seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart dan lain-lain)	
					Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	100,00	100,00	100,00				
					Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	8	8	100,00				
					Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	100,00	100,00	100,00				
					Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	200	200	100,00				
					Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase ketercapaian Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100,00	100,00	100,00				
					Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer							
					Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	120	120	100,00				
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	45	45	100,00				-
7	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	98,99	98,99	Sangat Tinggi	Pengadaan 2 Unit Laptop Tidak dapat direalisasikan karena berdasarkan surat LKPP Nomor 4 Tahun 2023 yang harus dibelanjakan core i5 sedangkan di DPA core i7 serta surat tanggapan Plt Inspektorat Provinsi Banten Nomor 700/1544-Inspektorat/2023 yang menerangkan Pengadaan tersebut harus sesuai spesifikasi DPA	Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Banten dalam proses pengadaan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	81	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	8	8	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1	1	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	92,96	92,96				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	20	90,91		Pengadaan 2 Unit Laptop Tidak dapat direalisasikan karena berdasarkan surat LKPP Nomor 4 Tahun 2023 yang harus dibelanjakan core i5 sedangkan di DPA core i7 serta surat tanggapan Plt Inspektorat Provinsi Banten Nomor 700/ 1544- Inspektorat / 2023 yang menerangkan Pengadaan tersebut harus sesuai spesifikasi DPA	Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Banten dalam proses pengadaan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	100,00				
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	48	48	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121	121	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
						Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	0,22	19,01	8640,91	Sangat Tinggi	Pada tahun 2023, jumlah industri yang tercatat pada SIINAS adalah 5241 perusahaan. Meningkat 19,09% dari tahun 2022 (4404 perusahaan). Artinya, capaian target kinerja Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi Banten melebihi target yang hanya 0,22%. Namun, Disiperindag masih menemui kendala yakni terdapat perusahaan yang belum patuh untuk melakukan input data pada SIINAS	Bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian R.I untuk mengevaluasi penerbitan Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang tidak melakukan input data/pelaporan pada SIINAS secara berkala.	
					Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100,00	100,00	100,00				
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3	3	100,00		Belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kab. Lebak dengan PT. KS terkait Pembangunan Kawasan Industri Hijau di wilayah Citeles	Memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kab. Lebak dengan PT. Krakatau Steel perihal pembangunan Kawasan Industri Hijau di wilayah Citeles.	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Perwilayahan Industri							
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	3	100,00				
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	2	100,00		Belum optimalnya kerjasama dengan pihak pengelola kawasan industri untuk membangun SIKIM di wilayah kawasan industri.	Bekerjasama dengan Disperindag Kab/Kota untuk mengevaluasi pengelola kawasan industri terkait pembangunan SIKIM dalam area kawasan industri. Selain itu, memfasilitasi kerjasama antara pelaku IKM dengan pihak industri dan kawasan industri terkait penyediaan produk/materi yang dapat diproduksi oleh IKM bagi industri.	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4	4	100,00				
						Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2	2	100,00		1. RTRW Kab/Kota kurang sinkron dengan rencana tata letak peruntukan perencanaan pembangunan industri Kab/Kota sehingga perlu adanya perubahan RTRW sesuai dengan rencana strategi pembangunan industri Kab/Kota (evaluasi RTRW dievaluasi) 2. Masih terdapat Disperindag Kab/Kota yang belum mengajukan permohonan	Bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian R.I untuk monitoring Disperindag Kab/Kota yang belum melakukan penyusunan RPIK. Selain itu, Disperindag Provinsi Banten juga melakukan pendampingan bagi Kab/Kota yang sedang menyusun RPIK.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												penyusunan maupun evaluasi RPIK		
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										
							Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar ,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pada tahun 2023, Disperindag menerbitkan rekomendasi teknis IUI bagi 32 perusahaan dan seluruhnya telah dipantau dan dianalisis sesuai SOP. Artinya, capaian kinerja Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar ,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait telah memenuhi target 100%. Walaupun beberapa perusahaan sulit dihubungi ketika dilakukan konfirmasi terkait pemantauan namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik.	Pemantauan dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan.	
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	100,00	100,00	100,00				
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI,		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan	20	20	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
						IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi							
						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	100,00	100,00	100,00				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	5	5	100,00				
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										
							Persentase data perusahaanindustri besar	55,00	100,00	181,82	Sangat Tinggi	Semua informasi industri telah dapat diakses pada	Bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nasterhadap total populasi perusahaan industri berdasarkan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota					SIINAS secara periodik per Semester sehingga mempermudah Disperindag untuk memperoleh data industri. Namun, Disperindag masih menemui kendala yakni terdapat perusahaan yang belum patuh untuk melakukan input data/pelaporan secara berkala pada SIINAS	R.I untuk mengevaluasi penerbitan Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang tidak melakukan input data/pelaporan pada SIINAS secara berkala.	
					Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100,00	100,00	100,00				
					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20	20	100,00				
					Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	4	4	100,00				
					Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	80	80	100,00		Masih terdapat perusahaan industri dan kawasan industri yang tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan pada SIINas	Bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian R.I untuk mengevaluasi penerbitan Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang tidak melakukan input data/pelaporan pada SIINas secara berkala.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
						Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	10,00	100,00	1000,00	Sangat Tinggi	UPT PSMB belum memiliki Laboratorium Pengujian Mutu dan Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang sehingga pengujian sampel harus dikirim ke Balai Pengujian Kementerian Perdagangan R.I.	1) Bekerjasama dengan Balai Pengujian Kementerian Perdagangan R.I. dalam melakukan pengujian sampel komoditi. 2) Koordinasi dengan BKD untuk mengupayakan penyediaan tenaga fungsional penguji mutu barang	
					Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00				
					Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	4	4	100,00				
					Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	100	100	100,00				
					Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1	1	100,00				
					Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	350	350	100,00				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	100,00	100,00	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi	100,00	100,00	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	100,00				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	100,00	100,00	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33	33	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada	100,00	100,00	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112	112	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	100,00				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	100,00	100,00	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengembangan	100,00	100,00	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Teknologi dan Standardisasi Industri							
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00	1	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	4	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Operasional atau Lapangan								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93	93	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	100,00				
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
						Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisi Industri	55,00	100,00	181,82	Sangat Tinggi	Pada tahun 2023, UPT PTSI telah melayani 227 pelaku usaha meliputi pelayanan rumah kemasan, pengujian dan kalibrasi, sertifikasi halal dan sertifikasi HaKI. Kendala yang dihadapi adalah UPT PTSI belum memiliki Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang untuk melakukan pengujian dan kalibrasi.	Koordinasi dengan BKD untuk mengupayakan penyediaan tenaga fungsional penguji mutu barang.	
					Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	100,00	100,00	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	2	100,00				
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4	4	100,00				

3.3.4. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
I	4.1 SEKRETARIAT DAERAH											
		Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
					Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
					Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)	100	100	100				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	100				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)	100	100	100				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	100				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100				
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	18	100				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)	100	100	100				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	3	100				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42	42	100				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)	100	100	100				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)	100	100	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100				
					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100				
					Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12	12	100				
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	100				
					Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12	12	100				
					Fasilitasi Keprotokolanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Keprotokolanan	100	100	100				
					Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12	12	100				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	12	100				
					Pengelolaan Hubungan Keprotokolanan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolanan	12	12	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan		Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100 Persen	Sangat Tinggi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen				
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	100 Persen				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	100 Persen		1. Harga satuan Diklat berbayar dibawah harga satuan DPA 2. Tidak teridentifikasi nya Kegiatan yang terkait sehingga biaya perjalanan dinas hanya dikhususkan untuk koordinasi	Pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan disesuaikan dengan harga satuan penyelenggara diklat, pelaksanaan kegiatan dan dokumen pelaksanaan APBD	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	100 Persen				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 Persen		Kelebihan Harga satuan	Pembayaran disesuaikan dengan harga pasar	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 Persen		Kelebihan Harga satuan	Pembayaran disesuaikan dengan harga pasar	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 Persen				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 Persen		Kelebihan Harga satuan	Pembayaran disesuaikan dengan harga pasar	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen		Penyesuaian uang transport Perjalanan Dinas	Pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan disesuaikan dengan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												pelaksanaan kegiatan dan dokumen pelaksanaan APBD	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen		Tagihan pembayaran bulan Desember tahun 2023 jatuh empo ke Tahun Anggaran 2024	Pembayaran tagihan bulan Desember tahun 2023 dilaksanakan Tahun 2024	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen				
				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
						Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30	23,16	77,20	Tinggi			
						Tingkat Kematangan UKPBJ	26,67	40	149,98	Sangat Tinggi			
						Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	24,13	25,45	105,47	Sangat Tinggi			
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
					Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen		1. Efisiensi Honorarium Tim Terkoordinasi Penyusunan Domplak Pengadaan Barang/Jasa (Terdapat beberapa anggota Tim Terkoordinasi yang tidak merealisasikan honorariumnya karena sudah mencapai batas maksimal 5 kali dalam setahun diantaranya dari BPKAD, Biro Hukum)	Pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pelaksanaan APBD	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											2.Efisiensi Honorarium Narasumber kegiatan rapat (pembayaran 50% bagi narasumber berasal dari internal) 3.Efisiensi belanja penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan 4. Penyesuaian uang harian dan transportasi Perjalanan Dinas		
					Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen				
					Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen				
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
					Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen				
					Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen				
					Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen				
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
					Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang	40 Orang	100 Persen		1. Efisiensi Narasumber (pembayaran 50% bagi narasumber berasal dari internal) 2. Penyesuaian uang transport pelaksanaan Perjalanan Dinas	Pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pelaksanaan APBD	
					Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen		1. Efisiensi Narasumber (pembayaran	Pelaksanaan dan pertanggung jawaban	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												50% bagi narasumber berasal dari internal) 2. Penyesuaian uang transport Perjalanan Dinas	keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pelaksanaan APBD	
						Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen		1. Efisiensi Narasumber (pembayaran 50% bagi narasumber berasal dari internal) 2. Penyesuaian uang transport Perjalanan Dinas	Pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pelaksanaan APBD	
		Biro Hukum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
							Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Hukum)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	100,00	100,00	100,00				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100,00		Efisiensi keuangan dalam belanja mematuhi ketentuan Domlak APBD 2023 tentang pembayaran uang lembur	Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00		Efisiensi keuangan belanja fotocopy	efisiensi belanja sesuai ketentuan	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00		Efisiensi keuangan belanja fotocopy DPA 2024 karena	Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan pelaksanaan kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												tanggal penyusunan DPA melewati batas pengajuan keuangan		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100,00		Efisiensi keuangan honorarium narasumber	efisiensi belanja sesuai ketentuan	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Hukum)	100,00	100,00	100,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Hukum)	100,00	100,00	100,00				
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	100,00		Harga satuan Diklat berbayar dibawah harga satuan DPA sesuai harga dari penyelenggara Diklat (menjadi efisiensi keuangan)	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan harga satuan penyelenggara diklat dan ketentuan peraturan perundang-undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Hukum)	100,00	100,00	100,00				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00		Penyesuaian uang transport Perjalanan Dinas sesuai keperluan dan riil kebutuhan	Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)	100,00	100,00	100,00				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100,00		Efisiensi keuangan	Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan	
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM									
						Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada Permasalahan		
						Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada Permasalahan		
						Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada Permasalahan		
						Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Tidak ada Permasalahan		
					Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100,00	97,50	97,50				
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun (Satuan : Dokumen)	30	30	100,00		Efisiensi keuangan	Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan	
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun (Satuan : Dokumen)	50	50	100,00		Efisiensi keuangan	Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan	
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasikan dan Dikelola Informasi Hukum nya (Satuan : Dokumen)	6	6	100,00		Efisiensi keuangan	Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												pelaksanaan kegiatan	
					Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi dan di Evaluasi (Satuan : Dokumen)	60	54	90,00		Jumlah usulan permintaan Fasilitasi/Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota yang masuk ke Biro Hukum hanya 54 usulan dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten	Biro Hukum hanya bersifat memfasilitasi usulan yang masuk (seluruh usulan selesai difasilitasi pada Tahun 2023)	
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	100,00	100,00	100,00				
					Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Satuan : Dokumen)	16	16	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
					Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Satuan : Dokumen)	34	34	100,00		Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	100	100	100				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1,00	100,00%				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1,00	100,00%				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1,00	100,00%				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1,00	100,00%				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,00	100,00%				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1,00	100,00%				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1,00	100,00%				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	100	100	100,00%		Mekanisme revolving uang persediaan memerlukan proses yang agak lama. Karena pada saat revolving persediaan harus menunggu minimal 50 % dari masing masing biro, berakibat pada daya serap realisasi keuangan agak terhambat.		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100,00%		Serapan keuangan hanya 87,60 % karena adanya efesiensi dari penyerapan belanja perjalanan dinas, , belanja barang pakai habis (atk), belanja mamin rapat dan kegiatan, honorarium narasumber internal yg hanya dibayar 50 %, dan penerapan implementasi perpres 33 tahun 2020 yang diperkuat se sekda tentang pembatasan honor tim terkoordinasi.	Revolving uang persediaan diharapkan bisa dilakukan oleh masing masing biro tidak harus oleh bendahara setda	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100,00%				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00%				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	100,00%				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00%				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Refromasi Birokrasi)	100	100	100,00%				
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1	100,00%				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6	75,00%				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	100	100	100,00%				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100,00%				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100,00%				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	100,00%				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1	100,00%				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1	100,00%				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1	100,00%				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	100	100	100,00%				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13	100,00%				
					Program Penataan Organisasi								
						persentase ketercapaian kebijakan penataan kelembagaan (Satuan : %)	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemda (Satuan : %)	100	100	100	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Presentase ketercapaian kebijakan ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (Satuan : %)	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	100	100,00%				
					Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	100,00%				
					Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	100,00%				
					Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	2	100,00%		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Evaluasi jabatan dan rancangan peraturan gubernur tentang standar kompetensi jabatan belum bisa diundangkan dikarenakan menunggu hasil validasi dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. sampai saat ini rekomendasi hasil validasi dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait hal tersebut belum keluar.		
					Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	100	100		Pada dokumen draft akuntabilitas point analisis penyebab	Pada tahun 2024, biro organisasi dan rb akan melakukan pendampingan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											keberhasilan dan kegagalan masih lemah karena perangkat daerah masih belum terbiasa mengulik dan menyusun keberhasilan maupun kegagalan terkait capaian kinerja (output dan outcome), sehingga dokumen akuntabilitas kinerja masih belum maksimal	penyusunan draft akuntabilitas kinerja oleh smart.id	
					Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2	100,00%				
					Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen	2	100,00%		Masih banyaknya penyusun dokumen lkip di perangkat daerah yang masih belum merujuk pada format penyusunan laporan kinerja pada permenpan 53 tahun 2014	Tahun 2024 perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi banten melalui biro organisasi dan rb akan didampingi oleh smart.id dalam menyusun dokumen lkip sesuai dengan permenpan 53 tahun 2014	
					Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	3 Laporan	3	100,00%		Perangkat daerah masih belum fokus terhadap dokumen - dokumen sakis sebagai dokumen pendukung penyusunan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											dokumen draft akuntabilitas kinerja		
					Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	3	100,00%				
					Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	3	100,00%				
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
						Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
						Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)	100%	100%	100%				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan dan Makan Minum Rapat		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00		Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan, Makan Minum Rapat dan Honor		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	100,00		Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan, Makan Minum Rapat dan Honor		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	101,18		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan dan Makan Minum Rapat		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan dan Makan Minum Rapat		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan dan Makan Minum Rapat		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan dan Makan Minum Rapat		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Perekonomian dan Adminsitasi Pembangunan)	100%	100%	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan dan Makan Minum Rapat		
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	0,00		Tidak ada bahan tanggapan Pemeriksaan pada Biro Ekbang		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Pengganaan dan Makan Minum Rapat		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Perekonomian dan Admnsitrasi Pembangunan)	100%	100%	100,00				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	0,00		Fumigasi Arsip tidak dilaksanakan dikarenakan Arsip Biro ekbang yang masih disusun		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00		Hanya Sisa anggaran dari Fasilitas belanja Cetak dan Penggunaan dan Fasilitas Makan Minum Jamuan Rapat		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Penggunaan, Makan Minum Rapat dan Belanja Materai yang tidak sesuai		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00		Efesiensi Kontrak ATK		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00		Tidak adanya pihak penyedia yang merespon pada Marketplace E-Catalog		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	100,00		Berdasarkan Realisasi Uang Saku sudah 100%, sisa hanya di Transport		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian dan Admnsitrasi Pembangunan)	100%	100%	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											Honorarium Non ASN		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Belanja Koran		
				Program Perekonomian dan Pembangunan									
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		100%	100%	100,00				
					Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bdan Usaha Milik Daerah dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bdan Usaha Milik Daerah dan Aneka Usaha	2	2	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Penggunaan, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas		
					Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2	2	100,00		Hanya Sisa anggaran dari belanja Cetak dan Penggunaan, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas		
					Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2	2	100,00		Efisiensi Kontrak Rumusan Kebijakan		
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		100%	100%	100,00				
					Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3	3	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber KDEKS, Makan Minum KDEKS, Cetak dan Penggandaan KDEKS dan Perjalanan Dinas KDEKS		
					Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3	3	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber, Makan Minum, Cetak dan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Penggandaan dan Perjalanan Dinas		
						Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		100%	100%	100,00				
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	2	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber, Makan Minum, Cetak dan Penggandaan dan Perjalanan Dinas		
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	7	7	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber, Makan Minum, Cetak dan Penggandaan dan Perjalanan Dinas		
						Program Kebijakan Administrasi Pembangunan								
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100%	100%	100,00				
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	3	3	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber, Makan Minum, Cetak dan Peggandaan dan Perjalanan Dinas Monitoring		
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	2	2	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber, Makan Minum, Cetak dan Peggandaan dan Perjalanan Dinas Monitoring		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2	2	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber, Makan Minum, Cetak dan Penggandaan dan Perjalanan Dinas Monitoring		
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100%	100%	100,00				
					Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4	4	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber dan Makan Minum.		
					Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2	2	0,00		1.Sampai dengan setelah Perubahan APBD TA.2023 tidak ada perubahan ketentuan peraturan Perundangan diatasnya sebagai rujukan untuk penyempurnaan perumusan kebijakan administrasi pembangunan, 2.Pergub No.62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah, diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 sudah disusun agar dapat digunakan setiap tahun		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	2	100,00		Hanya Sisa Anggaran dari Honorarium Narasumber dan Makan Minum.		
		Biro Umum dan Perlengkapan											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
						Persentase Capaian Tata Kelola Keuangan dan Aset SETDA	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
						Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
						Persentase Capaian Layanan Rumah Tangga Pimpinan Daerah dan Fasilitasi Layanan SETDA	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100%				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	446	446	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00				
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17	11	100,00				
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53	53	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	5	100,00				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	373	373	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22	22	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200	200	100,00				
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	329	329	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	371	371	100,00				
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	2	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00				
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1	100,00				
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100,00				
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1	100,00				
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)	100%	100%	100,00				
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	100,00				
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	1	100,00				
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah											
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100,00	100	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,00	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,00	100				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,00	100				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pemotda)							
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,00	100				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1,00	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1,00	100				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Pemotda)							
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1,00	100				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1,00	100				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4,00	100				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pemotda)							
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,00	100				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,00	100				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,00	100				
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
						Persentase Realisasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan							
					Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1,00	100				
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2,00	100				
					Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	3,00	100				
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah							
					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	2,00	100				
					Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3,00	100				
					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	4,00	100				
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah							
					Fasilitasi Kerja SamavAntar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	10 Dokumen	10,00	100				
					Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	1,00	100				
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	2,00	100				
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									
						Persentase Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual			100				
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	1,00	100				
					Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	2 Lembaga	2,00	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							
					Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2,00	100				
					Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	2,00	100				
					Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen	2,00	100				
					Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			100				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	3,00	100				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	3,00	100				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	1,00	100				
2	4.2 SEKRETARIAT DPRD												
		Sekretariat DPRD											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI									
						Persentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	99,42	99,42	Sangat Tinggi	Medical Check Up DPRD diikuti sebanyak 41 orang Anggota DPRD dari sebanyak 85 orang Anggota DPRD, Hal ini dikarenakan padatnya jadwal	Pelaksanaan Proses Medical Check Up DPRD akan di sesuaikan dengan jadwal dan agenda Pimpinan dan Anggota DPRD	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												dan Agenda DPRD		
												- Pengadaan 1 unit kendaraan dinas operasional Hi-ACE, hal ini dikarenakan unit tidak ready & harus inden. '- Pengadaan 1 Unit Roda 3 tidak diserap,hal ini dikarenakan unit tidak ready pada katalog nasional & lokasi dealer diluar dacrah.	Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan kendaraan operasional	
												Beberapa Paket Pekerjaan yang tidak dilaksanakan, yaitu :	Untuk paket pekerjaan tersebut akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan Pemeliharaan/pe rbaikan renovasi sarana dan prasarana Gedung	
												- Renovasi Pintu Lobby Utama, dikarenakan Renovasi lobby utama telah dilaksanakan bersamaan dengan paket pekerjaan Fasad		
												- Jasa Konsultasi Pemeliharaan Kubikel, genset hydran, dikarenakan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah proses pemindahan dan penempatan unit- Jasa Konsultasi		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Perencanaan Gd.Arsip, dikarenakan penyesuaian obyek pekerjaan		
												- Pemeliharaan Jalan Lingkungan, dikarenakan penyesuaian obyek pekerjaan		
												- Pengecetan Lobby Perkantoran, dikarenakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan agenda rutin		
												- Pengecetan Lobby Utama, dikarenakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan agenda rutin		
												- Renovasi Ruang Pimpinan 1,2,3,4, dikarenakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan agenda rutin		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	100,00			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	88	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	12	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	3	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah			100,00				
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	5	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	100	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			97,08				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	3	97,00		- Pengadaan 1 unit kendaraan dinas operasional Hi-ACE, hal ini dikarenakan unit tidak ready & harus inden. '- Pengadaan 1 Unit Roda 3 tidak diserap,hal ini dikarenakan unit tidak	Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan kendaraan operasional	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												ready pada katalog nasional & lokasi dealer diluar daerah.		
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	100,00				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	100	100,00				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	99,00		- Renovasi Pintu Lobby Utama, dikarenakan Renovasi lobby utama telah dilaksanakan bersamaan dengan paket pekerjaan Fasad	akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan Pemeliharaan/p erbaikan renovasi sarana dan prasarana Gedung	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	93,00		- Jasa Konsultasi Pemeliharaan Kubikel, genset hydran, dikarenakan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah proses pemindahan dan penempatan unit, Jasa Konsultasi Perencanaan Gd.Arsip, dikarenakan penyesuaian obyek pekerjaan	akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan Pemeliharaan/p erbaikan renovasi sarana dan prasarana Gedung	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00				
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	12	12	100,00				
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	100,00				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98,20				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	100	100,00				
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	30	100,00				
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1673	1673	100,00				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	91,00		- Pemeliharaan Jalan Lingkungan, dikarenakan penyesuaian obyek pekerjaan	akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan Pemeliharaan/p erbaikan renovasi sarana dan prasarana Gedung	
												- Pengecetan Lobby Perkantoran, dikarenakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan agenda rutin	akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan Pemeliharaan/pe rbaikan renovasi sarana dan prasarana Gedung	
												- Pengecetan Lobby Utama, dikarenakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan agenda rutin	akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan Pemeliharaan/pe rbaikan renovasi sarana dan prasarana Gedung	
												- Renovasi Ruang Pimpinan 1,2,3,4, dikarenakan	akan dilakukan inventarisir ulang kebutuhan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan agenda rutin	Pemeliharaan/pe rbaikan renovasi sarana dan prasarana Gedung	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	100,00				
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			99,00				
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	85	85	100,00				
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	5	100,00				
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	85	85	49,00		Medical Check Up DPRD diikuti sebanyak 41 orang Anggota DPRD dari sebanyak 85 orang Anggota DPRD, Hal ini dikarenakan padatnya jadwal dan Agenda DPRD	Pelaksanaan Proses Medical Check Up DPRD akan di sesuaikan dengan jadwal dan agenda Pimpinan dan Anggota DPRD	
					Layanan Administrasi DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Administrasi DPRD			100,00				
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	100,00				
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
						Presentase Capaian Layanan Kinerja Fungsi DPRD	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Capaian Prosentase Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			100				
					Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Pembahasan Rancangan Perda	5	5	100,00				
					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5	5	100,00				
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran			100				
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	100,00				
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	100,00				
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	100,00				
					Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1	100,00				
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	100,00				
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			100				
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	12	100,00				
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	12	100,00				
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	12	100,00				
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	12	100,00				
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	12	100,00				
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD			100				
					Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	1	100,00				
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1	1	100,00				
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42	42	100,00				
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	9	100,00				
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	12	100,00				
					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	2	100,00				
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyerapan dan Perhimpunan Masyarakat			100				
					Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	3	100,00				

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	2	100,00				
					Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	100,00				
					Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah			100				
					Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5	5	100,00				
					Penyusunan ahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	12	100,00				
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD			100				
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	12	100,00				
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12	12	100,00				
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	12	100,00				
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	100,00				
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	12	12	100,00				

3.3.5. Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
I	5.1 PERENCANAAN											
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	90	90	Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)	5,00	5,00	100,00	Kurangnya Koordinasi dengan Bidang-Bidang	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan - Koordinasi bagian perencanaan dengan pendamping mempercepat output yang dihasilkan	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100,00	Integrasi SIPD Go.id dengan SIPD RI harus input ulang datanya	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan - Koordinasi bagian perencanaan dengan pendamping mempercepat output yang dihasilkan	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100,00	tidak ada	tidak ada	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	2,00	Integrasi SIPD Go.id dengan SIPD RI harus input ulang datanya	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan - Koordinasi bagian perencanaan dengan pendamping mempercepat output yang dihasilkan	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100,00	tidak ada	tidak ada	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100,00	keterlambatan penyampaian laporan	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan - Koordinasi bagian perencanaan dengan pendamping mempercepat output yang dihasilkan	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	4,00	4,00	100,00	keterlambatan penyampaian	- SDM yang mendukung dalam penyusunan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											evaluasi kinerja dari bidang bidang	dokumen perencanaan - Koordinasi bagian perencanaan dengan pendamping mempercepat output yang dihasilkan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	90,00	90	100,00		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	12,00	12	12,00		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	12,00	12	12		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	12,00	12	12		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1,00	1	1		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	1,00	1	1		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	18,00	18	18		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)	1,00	1	1		Tidak Ada	Tidak Ada	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100		tidak ada	efesiensi kontrak	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	4,00	4,00	100		tidak ada	efesiensi kontrak	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	2,00	2,00	100		tidak ada	efesiensi kontrak	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (satuan : unit)	1,00	1,00	0				
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (satuan : paket)	90,00	90,00	100		efisiensi kontrak	efisiensi kontrak	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100		Keterlambatan informasi dalam pengolahan data	Menjalin komunikasi antar instansi terkait	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100		Sering terjadinya perubahan aturan baru	Meningkatkan jalin komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan kementerian	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan : Dokumen)	12,00	12,00	100		rendahnya disiplin para pegawai	Melakukan dan menerapkan Peraturan tata tertib para pegawai	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (satuan : orang)	3,00	3,00	100		Keterbatasan undangan dan jumlag peserta diklat	Menyesuaikan jadwal undangan serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BPSDM	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (satuan : orang)	200,00	200,00	0			Optimalisasi Anggaran Tahun 2023	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (satuan : paket)	1,00	1,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (satuan : paket)	4,00	4,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (satuan : paket)	4,00	4,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Dokumen)	12,00	12,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (satuan : paket)	2,00	2,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (satuan : paket)	1,00	1,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100		Terbatasnya aktivitas kunjungan tamu dari luar	Menyesuaikan agenda jadwal kunjungan tamu	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100		Keterbatasan Jumlah Pegawai yang melakukan tugas dinas luar	Penambahan jumlah pegawai untuk melakukan dinas luar	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	11,00	11,00	100		kurangnya fasilitas/ruang untuk penataan arsip	memiliki ruang/fasilitas tersendiri dan memadai	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100		sering terjadinya gangguan sistem	percepatan perbaikan sistem jaringan	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (satuan : paket)	5,00	5,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100		keterbatasan tenaga administrasi	Penambahan tenaga administrasi	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100		tidak ada	selalu tepat waktu	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100		tidak ada	menyesuaikan berdasarkan waktu dan kebutuhan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (satuan : unit)	7,00	7,00	100		tidak ada	selalu terpenuhi dan tepat waktu	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (satuan : unit)	69,00	69,00	100		tidak ada	selalu terpenuhi dan tepat waktu	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (satuan : paket)	5,00	5,00	100		tidak ada	efisiensi kontrak	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (satuan : unit)	1,00	1,00	100		tidak ada	efesiensi kontrak	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (satuan : unit)	1,00	1,00	100		tidak ada	efesiensi kontrak	
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
						Persentase dokumen perencanaan yang disahkan	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Persentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD	95	100	105	Sangat Tinggi			
						Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah	85	100	118	Sangat Tinggi			
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disahkan							
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100		tidak ada		
					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100		Target output sudah tercapai sehingga tidak diperlukan lagi koordinasi dan sinkronisasi ke luar daerah (pusat)		
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (satuan :Berita Acara)	2,00	2,00	100		tidak ada		
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (satuan :Berita Acara)	1,00	1,00	100		tidak ada		
					Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (satuan :Berita Acara)	1,00	1,00	100		tidak ada		
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100		Hasil Audit Inspektorat		
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan							
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	2,00	2	100		Tidak Ada Kendala		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Satuan : Dokumen)							
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100,00	100	100		Tidak Ada Kendala		
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	16,00	16	100		Target output sudah tercapai sehingga tidak diperlukan lagi koordinasi dan sinkronisasi ke luar daerah (pusat)	Pagu anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	
						Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	1,00	1	100		Tidak Ada Kendala		
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	17,00	17	100				
						Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1,00	1	100		- Ketidaksesuaian pekerjaan dengan penganggaran murni - Kebijakan Pimpinan terkait TJSKBL Provinsi	- Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan - Koordinasi dengan Pimpinan terkait pelaksanaan TJSKBL Provinsi	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,00	1	100				
						Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19,00	19	100		Tidak Ada Kendala		
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
						Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1,00	1	100		Adanya perubahan skema terkait modul	Koordinasi dengan tenaga ahli	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											pengendalian, evaluasi dan pelaporan akibat pemisahan bidang, sehingga perlu dilakukan efisiensi belanja tenaga ahli yang berdampak keterlambatan pengembangan modul tersebut		
					Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan (Satuan : Dokumen)	1,00	1	100		Output sudah tercapai sehingga rapat koordinasi dalam rangka penerapan sistem tidak di serap	Pagu akan disesuaikan dengan kebutuhan	
					Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan : Dokumen)	1,00	1	100		Tidak Ada Kendala		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
						Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)	2,00	2	100		Tidak ada		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan (satuan : Perangkat Daerah)	10,00	10	100		Tidak ada		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan (satuan : Perangkat Daerah)	10,00	10	100		Serapan sppd (transportasi) yang rendah karena efisiensi biaya transportasi	Pelaksanaan perjalanan dinas agar dapat dipergunakan fleksibel sesuai kebutuhan sesuai dengan lokasi dan undangan	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Satuan : Laporan)	2,00	2	100		-Serapan sppd yang rendah karena efisiensi biaya transportasi (perjalanan dinas sering kali tidak sesuai antara lokasi yang direncanakan dengan lokasi undangan) -Silpa dari narasumber internal yang hanya dapat dibayarkan 50 %	- Pelaksanaan perjalanan dinas agar dapat dipergunakan fleksibel sesuai kebutuhan sesuai dengan lokasi dan undangan - diusulkan agar dapat diakomodir di SIPD untuk belanja narasumber internal 50%	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)	4,00	4	100		Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal	- SDM yang mendukung dalam percepatan kegiatan - Perlu dilakukan koordinasi dalam proses perencanaan	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Pembangunan Manusia (satuan : Perangkat Daerah)	10,00	10	100		Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal	- SDM yang mendukung dalam percepatan kegiatan - Perlu dilakukan koordinasi dalam proses perencanaan	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Pembangunan Manusia (satuan : Perangkat Daerah)	10,00	10	100		Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan	- SDM yang mendukung dalam percepatan kegiatan - Perlu dilakukan koordinasi dalam proses perencanaan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											kegiatan kurang optimal		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan (Satuan : Laporan)	4,00	4	100		Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal	- SDM yang mendukung dalam percepatan kegiatan - Perlu dilakukan koordinasi dalam proses perencanaan	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam							
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100		- Informasi terkait optimalisasi anggaran yang tidak jelas '- Keterlambatan penyampaian dokumen renja dari opd mitra. '- keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	- Intensitas Koordinasi dengan OPD mitra terkait penyusunan dokumen perencanaan akan ditingkatkan. '- Dukungan dari pendamping OPD Bappeda sangat penting dalam mempercepat penyusunan dokumen perencanaan OPD mitra.	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (satuan : Perangkat Daerah)	7,00	7,00	100		- Informasi terkait optimalisasi anggaran yang tidak jelas '- Keterlambatan penyampaian dokumen renja dari opd mitra. '- keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	- Intensitas Koordinasi dengan OPD mitra terkait penyusunan dokumen perencanaan akan ditingkatkan. '- Dukungan dari pendamping OPD Bappeda sangat penting dalam mempercepat penyusunan dokumen perencanaan OPD mitra.	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (satuan : Perangkat Daerah)	7,00	7,00	100		- Keterbatasan SDM pada OPD Mitra menjadi salah satu penghambat dalam	- Intensitas Koordinasi dengan OPD mitra terkait penyusunan dokumen perencanaan akan ditingkatkan. '- Dukungan dari pendamping OPD Bappeda	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											penyampaian evaluasi kinerja.	sangat penting dalam mempercepat penyusunan dokumen perencanaan OPD mitra.	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Satuan : Laporan)	4,00	4,00	100		- Informasi terkait optimalisasi anggaran yang tidak jelas	- Lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. - Dukungan SDM Perencana dalam pelaksanaan kegiatan	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)	4,00	4,00	100,00		OPD sering telat dalam mengumpulkan dokumen hasil perencanaan	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan di OPD - Koordinasi antara mitra, pendamping dan PPTK mempercepat proses perencanaan program dan kegiatan	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (satuan : Perangkat Daerah)	6,00	6,00	100,00		OPD sering telat dalam mengumpulkan dokumen hasil perencanaan	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan di OPD - Koordinasi antara mitra, pendamping dan PPTK mempercepat proses perencanaan program dan kegiatan	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (satuan : Perangkat Daerah)	6,00	6,00	100,00		OPD sering lambat dalam melaporkan bukti kinerja. Sistem penilaian kinerja tidak bisa digunakan selama 1 tahun	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan di OPD - Koordinasi antara mitra, pendamping dan PPTK mempercepat proses evaluasi kinerja	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Satuan : Laporan)	4,00	4,00	100,00		OPD yang terkait dengan tematik belum sinkron dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tematik	- SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan di OPD - Koordinasi antara mitra, pendamping dan PPTK mempercepat proses sinkronisasi renstra/Renja dengan RPJMD/RKPD	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100,00		- perjalanan dinas sering kali tidak sesuai antara lokasi yang direncanakan dengan lokasi undangan - efisiensi dari narasumber internal yang hanya dapat dibayarkan 50 %	- dalam pelaksanaan perjalanan dinas agar dapat dipergunakan fleksibel sesuai kebutuhan menyesuaikan lokasi undangan - diusulkan agar dapat diakomodir di SIPD untuk belanja narasumber internal 50%	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (satuan : Perangkat Daerah)	3,00	3,00	100,00		tidak ada	tidak ada	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (satuan : Perangkat Daerah)	3,00	3,00	100,00		tidak ada	tidak ada	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Satuan : Laporan)	2,00	2,00	100,00		- perjalanan dinas sering kali tidak sesuai antara lokasi yang direncanakan dengan lokasi undangan - efisiensi dari uang pengganti transport yang hanya dapat dibayarkan sejumlah nilai kota pelaksanaan	- dalam pelaksanaan perjalanan dinas agar dapat dipergunakan fleksibel sesuai kebutuhan menyesuaikan lokasi undangan - uang pengganti transport agar dapat dibayarkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)	2,00	2,00	100,00		Efisiensi transportasi dari addcost perjalanan dinas	transport perjalanan dinas agar di serap sesuai dengan jumlah yang ada di DPA	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (satuan : Perangkat Daerah)	3,00	3,00	100,00		tidak ada	tidak ada	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (satuan : Perangkat Daerah)	3,00	3,00	100,00		Efisiensi transportasi dari addcost perjalanan dinas	transport perjalanan dinas agar di serap sesuai dengan jumlah yang ada di DPA	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Satuan : Laporan)	2,00	2,00	100,00		tidak ada	tidak ada	
2	5.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
						Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	100	100	100	Sangat Tinggi			
						Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	Sangat Tinggi			
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Satuan : Laporan)	3,00	3	100		tidak ada permasalahan krn dari persiapan, pembahasan dan pelaksanaan kajian sesuai KAK yg dibuat.	kegiatan di laksanakan setelah administrasi terpenuhi	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Satuan : Laporan)	1,00	1	100		tidak ada permasalahan krn dari persiapan, pembahasan dan pelaksanaan kajian sesuai KAK yg dibuat.	kegiatan di laksanakan setelah administrasi terpenuhi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Satuan : Laporan)	1,00	1	100		tidak ada permasalahan krn dari persiapan, pembahasan dan pelaksanaan Kajian sesuai KAK yg dibuat.	kegiatan di laksanakan setelah administrasi terpenuhi	
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Satuan : Dokumen)	2,00	2	100		tidak ada permasalahan krn dari persiapan, pembahasan dan pelaksanaan Kajian sesuai KAK yg dibuat.	kegiatan di laksanakan setelah administrasi terpenuhi	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan							
					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Satuan : Dokumen)	1,00	1	100		keterbatasan SDM dan anggaran penelitian	optimalisasi SDM dan anggaran penelitian.	
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Satuan : Dokumen)	1,00	1	100		keterbatasan SDM dan anggaran penelitian	optimalisasi SDM dan anggaran penelitian.	
					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Satuan : Dokumen)	1,00	1	100		keterbatasan SDM dan anggaran penelitian	optimalisasi SDM dan anggaran penelitian.	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan							
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00		kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan karena permasalahan administrasi pimpinan	kegiatan di laksanakan setelah administrasi terpenuhi	
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00		kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan karena permasalahan	kegiatan di laksanakan setelah administrasi terpenuhi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											administrasi pimpinan		
					Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00			kegiatan mengalami efisiensi dari 150.000.000 jadi 5.000.000 di Anggaran perubahan	kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena tidak termasuk dalam pengajuan ke keuangan terutama di SPPD hanya pengadaan yg diserap	
					Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100,00		kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan karena permasalahan administrasi pimpinan	kegiatan di laksanakan setelah administrasi terpenuhi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan							
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Satuan : Dokumen)	1,00	1	100		Pemotongan honor narasumber internal 50% dan sisa transport at cost	Sesuaikan Domlak	
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Satuan : Laporan)	2,00	2	100		Pemotongan honor narasumber internal 50% dan sisa transport at cost	Sesuaikan Domlak	
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Satuan : Laporan)	1,00	1	100		Pemotongan honor narasumber internal 50%	Sesuaikan Domlak	
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Satuan : Laporan)	1,00	1	100		Pemotongan honor narasumber internal 50%	Sesuaikan Domlak	
3	5.2 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah											
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah								
						Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien (Satuan : %)	100	100	100,00	Sangat Tinggi			
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Satuan : %)							
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Satuan : Dokumen)	4	4	100,00				
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Satuan : Dokumen)	--	--	--				
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Satuan : Dokumen)	--	--	--				
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Satuan : Dokumen)	--	--	--				
					Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan : Orang)	41	41	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota (Satuan : %)							
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota (Satuan : Laporan)	8	8	100,00				
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota (Satuan : Laporan)	8	8	100,00				
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Satuan : Laporan)	8	8	100,00				
				Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Satuan : Laporan)	3	3	100,00				
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Orang)	40	40	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Ketecapaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Satuan : %)							
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Satuan : Laporan)							
					Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Satuan : Dokumen)	--	--	--				
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Satuan : Orang)	--	--	--				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Satuan : %)							
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Satuan : Laporan)			100,00				
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Satuan : Laporan)			100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Satuan : Dokumen)			100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Satuan : Dokumen)			100,00				
					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Satuan : Dokumen)			100,00				
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Satuan : Dokumen)			100,00				
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Satuan : Orang)			100,00				
					Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Satuan : Lembaga)			100,00				
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Satuan : %)							
					Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Satuan : Laporan)	4	-	--				
					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (Satuan : %)							
					Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan : Orang)	41	41	100,00				
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									
						Capaian Database Aset Provinsi Banten (Satuan : %)	23,50	23,50	100,00	Sangat Tinggi			
						Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten (Satuan : %)	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten (Satuan : %)	16,50	16,50	100,00	Sangat Tinggi			
						Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten (Satuan : %)	22,00	22,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Satuan : %)							
					Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Satuan : Dokumen)	--	--	--				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Satuan : Laporan)	--	--	--				
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Satuan : Dokumen)	5	5	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Satuan : Laporan)	2	2	100,00				
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Satuan : Orang)	41	41	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : %)							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)	7	7	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	8	8	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Satuan : %)							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang/Bulan)	102	102	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Satuan : %)							
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	2	2	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Satuan : %)							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)	6	6	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Satuan : %)							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan : %)							
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Satuan : Unit)	20	20	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satuan : %)							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satuan : %)							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)	23	23	100,00				
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan : Unit)	30	30	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	243	243	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1	1	100,00				
		Badan Pendapatan Daerah											
				Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)	5	5	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	5	5	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : orang/Bulan)	356	356	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan : Paket)	3	3	100,00				
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan : Dokumen)	12	12	100,00				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)	8	8	100,00				
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan : Orang)	77	77	100,00				
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan : Orang)	500	500	100,00				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	3	3	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	8	8	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	2	2	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan : Unit)	5	5	100,00				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	375	375	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	4	4	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	3	3	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	6	6	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	49	49	100,00				
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan : unit)	61	61	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	306	306	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	28	28	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023,	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (Satuan : %)	2,90	2,43	83,79	Tinggi	A. Retribusi 1. Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang ada di BPSDM hanya terealisasi 97,21% 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Badan Penghubung hanya terealisasi 59,58% 3. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi 91,67% dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan(DK P) terealisasi 88,53% 4. Retribusi Laboratorium (DLHK) terealisasi 58,97% 5. Retribusi Pemakaian Bahu Jalan DPUPR terealisasi 83,38% 6.a. Retribusi	1. Penetapan target dari denda pajak daerah harus memperhatikan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah serta penetapan target jasa giro memperhatikan kondisi tercapainya target pajak daerah. 2. Penetapan target retribusi daerah memperhatikan kondisi eksisting retribusi jasa umum, ratribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												Laboratorium UPTD. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (DISPERINDAG) realisasi 90,46% 6.b. Retribusi Laboratorium UPTD Pengembangan Teknologi dan Srandardisasi Industri (PTSI) DISPERINDAG realisasi 68,71% 6.c. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan UPTD Pengembangan Teknologi dan Srandardisasi Industri (PTSI) DIPERINDAG realisasi 0% 7. Retribusi Izin Trayek (DISHUB) realisasi 91,99% B. PLL 1. Pendapatan denda pajak daerah terealisasi 52,32% dikarenakan adanya pengurangan pokok dan/ atau penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											penyerahan kedua dan seterusnya 2. Target jasa giro sebesar Rp30.000.000.000 terealisasi Rp25.490.911.241, 46 atau 84,97%		
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	2	2	100,00				
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	3	3	100,00				
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	1	1	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	1	1	100,00				
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Satuan : Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan)	1	1	100,00				
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan (Satuan : Dokumen LHP)	1	1	100,00				
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	10	10	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	137	137	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjuln BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024		
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	10	10	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	2	2	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	2	2	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	11	11	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	83	83	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjuln BBM di wilayah Provinsi Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	2	2	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	8	8	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	42	42	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengurangan dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	2	2	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	2	2	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	10	10	100,00				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	94	94	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjuln BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	1	1	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	11	11	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	97	97	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah													
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023,	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	1	1	100,00				
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi										
							Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	11	11	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	97	97	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah													
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	1	1	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	11	11	100,00				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	141	141	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjuln BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	12	12	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	6	6	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	111	111	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023,	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	1	1	100,00				
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi										
							Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	28	28	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	184	184	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	2	2	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100,00				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah													
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengurangan dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	12	12	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	0	0	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	7	7	100,00				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	143	143	100,00				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, penganguran dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjuln BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	2	2	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	2	2	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	3	3	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	7	7	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	95	95	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431 2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengurangan dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	1	2	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				
					Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi								
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)	1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : unit)	8	8	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : unit)	239	239	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : unit)	1	1	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	5,85	3,87	66,15	Sedang	1. Adanya kenaikan Target Pajak Daerah dari 2022 ke 2023 sebesar Rp437.760.492.431	1. Penyusunan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengurangan dll 2. Penyusunan target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											2. Meningkatnya penjualan kendaraan listrik 3. Adanya surat dari Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, Tanggal 23 November Nomor: T-609/MG.05/BPH/2023 4. penyaluran pajak rokok bulan November dan Desember Tahun 2023, disalurkan pada TW I Tahun 2024, dengan alasan penerimaan cukai rokok pada bulan November dan Desember baru dapat di hitung oleh Kementerian Keuangan di awal tahun 2024	Bermotor (PBBKB) memperhatikan peningkatan penjualan pajak kendaraan Listrik Dimana kendaraan Listrik tidak memakai BBM 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya Badan Pangatur Hilir Gas dan Minyak Bumi, ESDM dan Pertamina terkait Kuota penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 4. Mengoptimalkan pendataan jumlah Perusahaan yang melakukan penjualan BBM di wilayah Provinsi Banten 5. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait penyaluran Pajak Rokok	
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase ketercapaian dari seluruh sub kegiatan							
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan : Laporan)	12	12	100,00				
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan : Dokumen Ketetapan)	2	2	100,00				
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Satuan : Laporan)	1	1	100,00				
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Satuan : Dokumen SSPD)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
4	5.3 KEPEGAWAIAN											
		Badan Kepegawaian Daerah										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (satuan : dokumen)	12	12	100,00				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (satuan : laporan)	4	4	100,00				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (satuan : orang)	203	203	100,00				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (satuan : dokumen)	12	12	100,00				
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (satuan : dokumen)	12	12	100,00				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (satuan : dokumen)	12	12	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (satuan : laporan)	18	18	100,00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (satuan : laporan)	4	4	100,00				
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (satuan : laporan)	4	4	100,00				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (satuan : dokumen)	4	4	100,00				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (satuan : Unit)	4	4	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (satuan : paket)	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (satuan : orang)	20	20	100,00				
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (satuan : orang)	4	4	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (satuan : paket)	10	10	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (satuan : paket)	10	10	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (satuan : paket)	10	10	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (satuan : paket)	10	10	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (satuan : paket)	10	10	100,00				
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (satuan : paket)	10	10	100,00				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (satuan : laporan)	10	10	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (satuan : laporan)	10	10	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (satuan : dokumen)	10	10	100,00				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (satuan : dokumen)	10	10	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (satuan : unit)	5	5	100,00				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (satuan : unit)	5	5	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (satuan : laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (satuan : laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (satuan : laporan)	12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (satuan : laporan)	12	12	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (satuan : unit)	2	2	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (satuan : unit)	30	30	100,00				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (satuan : unit)	10	10	100,00				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (satuan : unit)	1	1	100,00				
					Program Kepegawaian Daerah								
						Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan (satuan : nilai)	4,98	5,00	100,40	Sangat Tinggi			
						Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja (satuan : nilai)	2,5	25,15	1006,00	Sangat Tinggi			
						Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi (satuan : nilai)	17	21,90	128,82	Sangat Tinggi			
						Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai (satuan : nilai)	38,5	40,00	103,90	Sangat Tinggi			
						Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai (satuan : nilai)	38,5	40,00	103,90	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi (satuan : nilai)	21	22,00	104,76	Sangat Tinggi			
						Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi (satuan : nilai)	32	37,50	117,19	Sangat Tinggi			
						Nilai Kriteria Pengembangan Karier (satuan : nilai)	65	65,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja (satuan : nilai)	78	72,50	92,95	Sangat Tinggi			
						Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (satuan : nilai)	34	37,50	110,29	Sangat Tinggi			
						Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan (satuan : nilai)	14,5	16,00	110,34	Sangat Tinggi			
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
					Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (satuan : lembaga)	1	1	100,00				
					Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (satuan : dokumen)	12	12	100,00				
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (satuan : laporan)	1	1	100,00				
				Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Ketercapaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN							
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (satuan : orang)	19	19	100,00				
					Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (satuan : dokumen)	2	1	100,00				
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (satuan : dokumen)	2	1	100,00				
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (satuan : orang)	18	18	100,00				
					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional (satuan : orang)	63	63	100,00				
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (satuan : orang)	63	63	100,00				
					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional (satuan : dokumen)	2	2	100,00				
					Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (satuan : laporan)	4	4	100,00				
					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (satuan : orang)	750	750	100,00				
					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (satuan : dokumen)	2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
					Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (satuan : orang)	2	2	100,00				
					Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (satuan : orang)	450	450	100,00				
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (satuan : orang)	1800	1800	100,00				
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (satuan : laporan)	1	1	100,00				
					Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (satuan : dokumen)	1	1	100,00				
					Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (satuan : laporan)	1	1	100,00				
5	5.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penanganan dan evaluasi kinerja perangkat daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4	4	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3	3	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	1	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	1	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12	12	100,00				
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	100,00				
					Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		12	12	100,00				
					Tersusunnya dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen (dokumen hasil rekonsiliasi data akuntansi OPD)		12	12	100,00				
					Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	100,00				
					Tersusunnya dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		1	1	100,00				
					Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		18	18	100,00				
					Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	1	100,00				
					Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	1	100,00				
					Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	1	100,00				
					Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	1	100,00				
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	100,00				
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	100,00				
					Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	1	100,00				
					Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	1	100,00				
					Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	1	100,00				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	1	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	1	100,00				
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	1	100,00				
					Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1	1	100,00				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	100,00				
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia									
						Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi (Satuan: %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Presentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi (Satuan: %)	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
						Presentase ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi (Satuan: %)	75	23,57	31,43	Sangat Rendah	1. Tidak semua peserta mempersiapkan Sertifikasi/ Uji kompetensi secara maksimal baik dengan mengikuti Bimtek maupun pembelajaran mandiri 2. BPSDMD sudah memfasilitasi bimbingan teknis pra uji kompetensi dengan menghadirkan widyaiswara pembimbing sehingga memudahkan peserta dalam melakukan simulasi maupun konsultasi , namun tidak semua peserta memaksimalkan pelaksanaan Bimtek tersebut	1. Pada Tahun 2024 BPSDMD meningkatkan jumlah pelatihan maupun target sasaran peserta pelatihan khususnya pelatihan fungsional, teknis, penjenjangan, hingga orientasi PPPK. 2. Model pelatihan Tahun 2024 terbagi pada pelatihan klasikal, blended learning, pelatihan terbuka, webinar, hingga Podcast. 3. Pelatihan difokuskan pada pelatihan fungsional (peningkatan kapasitas peralihan jabatan structural ke fungsional), orientasi DPRD, Penjenjangan (PKN, PKP,PKA), orientasi PPPK. 4. Pelatihan teknis lebih difokuskan pada dukungan BPSDMD terhadap peningkatan capaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. 5. Sertifikasi/ Uji Komapetensi tidak lagi difokuskan pada sertifikasi/ uji kompetensi barang dan jasa	
						Presentase peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta	75	93,16	124,21	Sangat Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						<i>Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL (Satuan: %)</i>							
						<i>Presentase peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL. (Satuan: %)</i>	75	89,42	119,22	Sangat Tinggi			
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Ketercapaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
					Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	3	3	100				
					Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	280	66	24				
					Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	10	10	100				
					Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang disusun	1	1	100				
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2330	4273	183				
					Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan, Kompetensi Pimpinan Daerah,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan, Kompetensi Pimpinan Daerah,	3	3	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpin	Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
					- Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional		520	1100	212				
					- Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajemen		360	980	272				
					- Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan		1095	1093	100				
					Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis							
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Orang)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1040	3241	312				
6	5.7 PENGELOLAAN PENGHUBUNG												
		Badan Penghubung Daerah											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
						Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penanganan dan evaluasi kinerja perangkat daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	1	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1	1	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	12	100,00				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	3	100,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25	25	100,00				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	100,00				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	12	100,00				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	100,00				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	12	100,00				
					Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1	1	100,00				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	1	100,00				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	1	100,00				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	1	100,00				
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1	1	100,00				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	100,00				
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		1	1	100,00				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah							
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD		2	2	100,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	100,00				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12	100,00				
					Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah							
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		3	3	100,00				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	1	100,00				
					Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		50	50	100,00				
				Program Pelayanan Penghubung									
						CAKUPAN KOORDINASI BADAN PENGHUBUNG TERHADAP PEMERINTAH DAERAH (Satuan: Indek)	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi			
					Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Penghubung							
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Satuan : laporan)	12	12	100				
					Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan (Satuan : laporan)	12	12	100		Belum adanya Anggaran di Tahun 2023 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan SDGs (dari Bappenas RI) yang bersinergi dengan Bappeda Provinsi Banten terkait dengan Mahasiswa Banten di Yogyakarta	Direncanakan dan sudah dianggarkan pada Tahun 2024 kegiatan Fasilitasi Kegiatan SDGs yang bersinergi dengan Bappeda Provinsi Banten yang dilaksanakan di Bandung	
					Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Satuan : Laporan)	12	12	100				
					Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Satuan : Laporan)	12	12	100		Pelaksanaan Pameran Produksi	Pada pada Tahun Anggaran 2025 Badan Penghubung akan merencanakan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
												unggulan yaitu pada Pameran Pekan Raya Jakarta yang berskala Nasional yang melibatkan dari Kabupaten Kota se Provinsi Banten terjadi transaksi UMKM yang sangat signifikan baik secara langsung maupun dengan pesanan, kendala yang dialami pada Tahun 2024 Badan Penghubung tidak teranggarkan sedangkan untuk Kabupaten/Kota masing masing sudah menganggarkan Kembali untuk kegiatan PRJ di Tahun 2024	menganggarkan Kembali untuk mensuport dan mengkomodir kegiatan yang sudah ada	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Satuan : Laporan)	12	12	100				

3.3.6. Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
I	6.1 INSPEKTORAT DAERAH											
		Inspektorat										
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100,00				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00		Efisiensi dari jumlah harga dan hari pada kegiatan forum opd, dpa mamin nasi box tidak diajukan karena rapat perkin dilaksanakan pada siang hari		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00		dokumen yang difotocopy menyesuaikan dengan jumlah lembar rka cetak		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00		efisiensi pada jumlah hari pada dpa dan dokumen rka tidak perlu dijilid cukup difotocopy		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00		tanggal penyusunan dpa melewati batas maksimal pengajuan di keuangan		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00		efisiensi dari jumlah hari yang ada di dpa dan dokumen dpa hanya difotocopy		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00		jumlah lembar fotocopy disesuaikan dengan jumlah lembar laporan triwulan		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	100,00		karena dokumen lkpj dikerjakan oleh bappeda menjadi lkpj provinsi dan dokumen lppd sudah menggunakan aplikasi sileupeut		
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100,00				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	135	100,00		- belanja pegawai disesuaikan dengan eksistensi jumlah pegawai sebanyak 132 pegawai dari pagu 135 pegawai.		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											- Perpindahan jabatan fungsional tidak terealisasi anggarannya sebanyak 21 pegawai x 5 bln - Rekrutmen penambahan pegawai tidak dapat di realisasikan		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00		- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen tidak terserap karena tidak adanya penetapan pelimpahan tugas PPK		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00		- Terdapat efesiensi pada kegiatan rapat yang semula di lakukan per bulan menjadi triwulanan dan semesteran - Terdapat efesiensi pada belanja penggandaan yang disesuaikan dengan volume dokumen laporan		
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100,00				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	4	100,00		Terdapat Efisiensi Anggaran (negosiasi nilai kontrak)		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	100,00		realisasi kegiatan untuk honorarium narasumber dan kegiatan senam tidak rutin setiap bulan dilaksanakan dikarenakan padatnya jadwal penugasan pengawasan		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	133	100,00		sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan diklat dimana jadwal diklat sudah berakhir di bulan November (BPKP dan Kemendagri)		
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100,00				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00		Efesiensi Kontrak		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	100,00		Efesiensi Kontrak		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100,00		Efesiensi Kontrak		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00		Biaya Penginapan Diklat PPUPD (Tidak aAda Pemanggilan Diklat), dan Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar) sesuai kebutuhan.		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100,00		Efisiensi Kontrak		
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100,00				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	100,00		direalisasikan sesuai kebutuhan		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	19	100,00		direalisasikan sesuai kebutuhan		
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00		Direalisasikan sesuai tagihan PLN dan Telkon		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00		Direalisasikan sesuai dengan Pengajuan Nota Dinas dan Kebutuhan		
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	100,00		direalisasikan sesuai dengan nota dinas pengajuan service dari pemegang BMD		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	100,00		direalisasikan sesuai dengan nota dinas pengajuan service dari pemegang BMD		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181	181	100,00		direalisasikan sesuai dengan nota dinas pengajuan service dari pemegang BMD		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00		Terdapat Efisiensi Anggaran (negosiasi nilai kontrak)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
						Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
						Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	80%	69,44%	87%	Tinggi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	100,00	100,00				
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	100,00				
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	100,00				
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	2	100,00				
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	2	100,00				
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	2	100,00				
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	2	100,00		terserap sesuai dengan realisasi		
				PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Persentase Ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	100	100,00				
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	2	100,00				
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2	2	100,00				
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
					Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi			
				PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	100	100,00				
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4	4	100,00		Pelaksanaan kinerja terealisasi 90% karena ada 2 rapat yang tidak terealisasi yaitu : Rapat penyusunan SOP2 dan Rapat Penyusunan Kebijakan dan Pengawasan, Hal ini dikarenakan padatnya waktu pelaksanaan pengawasan para irban, sedangkan kedua rapat tersebut harus melibatkan semua irban untuk penyerapan keuangan ada beberapa yg tidak terserap : belanja makan minum rapat dan belanja honorarium narasumber untuk 2 kali rapat tidak terserap		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100	100	100,00				
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12	12	100,00				
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	5	100,00				

3.3.7. Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
I	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
							Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	- Karena keterbatasan jumlah personil mengakibatkan pelaksanaan tugas dan pengadministrasian pertanggungjawaban menjadi sedikit terlambat - Diusulkan untuk dilakukan penambahan personil pegawai termasuk SDM pada Sekretariat - Sarana ruangan tempat pelaksanaan kegiatan secara fasilitas dan kapasitasnya kurang memadai untuk beberapa kegiatan yang mengundang banyak peserta - Perlu adanya penyesuaian (pinjam tempat dan atau sewa) tempat kegiatan peserta agar penyelenggaraannya optimal		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD	1	1	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100				
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	1	1	100				
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	9	3	100				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	2	100				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	3	100				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9	9	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	6	100				
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	3	100				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5	100				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100				
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	4	100				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100				
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100				
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	1	100				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	100				
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	0	100				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	0	100				
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	2	100				
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3	100				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100				
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	4	100				
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3	100				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	100				
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	100				
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11	3	100				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3	100				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	100				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	10	100				
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	3	100				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
						Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100%	100%	100	Sangat Tinggi			
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	19	13	100				
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	8	3	100				
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	10	3	100				
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5	3	100				
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	6	3	100				
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
						Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	66,98	66,98	100	Sangat Tinggi			
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	36	11	100				
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9	3	100				
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	6	1	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaksanaan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	1	1	100				
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	3	100				
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah	10	3	100				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
						Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100	Sangat Tinggi			
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaandan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8	2	100				
					Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	0	100				
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	1	0	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah yang Disusun							
					Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan DibidangPendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1	100				
					Pelaksanaan Koordinasi Dibidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1	100				
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DibidangPendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	4	100				
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
						Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	88,02	88,02	100	Sangat Tinggi			
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknisdan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	29	12	100				
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3	3	100				
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	10	3	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2	1	100				
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	2	100				
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	3	100				
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
						Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	100%	100%	100	Sangat Tinggi			
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	41	15	100				
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	3	100				
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	7	3	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun							
					Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	1	100				
					Pelaksanaan Koordinasidi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang KewaspadaanDini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflikdi Daerah	10	3	100				
					Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di BidangKewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan PerbatasanAntar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah	6	2	100				
					Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi	12	4	100				

3.4. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan target pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026. Kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan strategis dengan menetapkan peraturan daerah sebanyak 8 (delapan) peraturan daerah. Selain itu, juga telah ditetapkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kebijakan strategis melalui peraturan kepala daerah. Adapun uraian kebijakan strategis tersebut diuraikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
PERATURAN DAERAH			
1	Perencanaan tata ruang wilayah daerah Provinsi Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2034	Untuk menjadi dasar hukum dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Banten
2	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Sebagai bentuk pelaporan menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
3	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023	Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan program kegiatan Pemerintah Daerah pada masa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4	Deregulasi atau pengurangan Peraturan	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2023	Untuk mengatasi masalah obesitas peraturan daerah (terlalu banyak Peraturan Daerah) yang tumpang tindih

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Daerah dengan metode omnibus	tentang Pencabutan Peraturan Daerah	dan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
5	Penguatan dan pengembangan Bank Pembangunan Daerah Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk	Sebagai dasar hukum Untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian Banten, Bank Pembangunan Daerah Banten yang sebelumnya berkedudukan sebagai anak Perusahaan BUMD PT. Banten Global Development, sekarang Bank Banten menjadi BUMD Perseroda langsung di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
6	Penguatan implementasi nilai-nilai pengarusutamaan gender di Provinsi Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Sebagai dasar hukum dalam Penguatan implementasi nilai-nilai pengarusutamaan gender di Provinsi Banten di sebagai aspek program dan kegiatan di Provinsi Banten
7	Pengelolaan taman hutan raya Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya	Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan taman hutan raya sehingga taman hutan raya di wilayah Banten dapat memiliki nilai manfaat bagi Pembangunan daerah dan masyarakat sekitar
8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan program Pembangunan daerah, rencana pendapatan, dan belanja daerah di Tahun 2024
	PERATURAN GUBERNUR		
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran	Sebagai dasar hukum dalam penjabaran dari perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten Tahun 2023, untuk menyelesaikan target pendapatan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	dan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2023
2.	Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Tahun 2023-2026.	Sebagai dasar hukum dalam perencanaan yang bersifat strategis dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping
3.	BATAL		
4.	Sistem akuntansi pemerintah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.	Sebagai dasar hukum dalam penerapan dan pengelolaan sistem akuntansi pemerintah daerah Provinsi Banten, sebagai amanat dari pemerintah pusat dan agar meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten
5.	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Ketiga Belas	Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	Sebagai peraturan teknis turunan dari amanat ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
6.	Bantuan Keuangan Provinsi Banten.	Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.	Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan di Provinsi banten dan untuk mengakomodir kebutuhan yang belum diatur dalam Pergub Nomor 6 Tahun 2021
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran	Sebagai dasar hukum dalam penjabaran dari perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten Tahun 2023 dan untuk mengakomodir kebutuhan yang belum diatur Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	
8.	Rencana Penanggulangan Bencana	Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027.	Sebagai dasar hukum dalam perencanaan dan pemetaan dalam penanggulangan bencana serta mitigasi risiko potensi bencana di Provinsi Banten
9.	Rencana Strategis Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.	Sebagai dasar hukum dalam perencanaan program kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dan mengakomodir kebutuhan kebijakan yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022
10.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten	Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.	Sebagai dasar hukum dalam perencanaan kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024 dan sebagai acuan rencana kerja Provinsi Banten dalam pembangunan di tahun 2024
11.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten	Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.	Sebagai dasar hukum dalam perencanaan kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, diharapkan setiap perangkat daerah dapat melaksanakan kinerja sesuai perencanaan kerjanya
12.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan	Sebagai dasar hukum dalam penetapan harga satuan dalam belanja Pemerintah Provinsi Banten
13.	Standar Harga Satuan Barang/Jasa	Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum dalam penetapan harga satuan dalam belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Banten

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
14.	Standar Harga Satuan Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur	Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur	Sebagai dasar hukum dalam penetapan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.
15.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023	Sebagai dasar hukum dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023
16.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Sebagai dasar hukum dalam pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Banten
17.	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
18.	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sebagai pedoman dalam penerapan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di Provinsi Banten
19.	Sistem Kerja	Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja	Sebagai pedoman hukum dalam penerapan sistem kerja bagi pegawai di Pemerintah Provinsi Banten
20.	Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten	Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Sebagai pedoman peta jalan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026	
21.	Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan kedua dan seterusnya	Sebagai dasar hukum dalam pemberian insentif bagi masyarakat berupa Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor
22.	Keamanan dalam kearsipan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Sebagai pedoman dalam penerapan Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
23.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Sebagai dasar hukum dalam penjabaran uraian laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
24.	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Sebagai dasar hukum dalam penerapan Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Banten, diharapkan pegawai dapat melaksanakan kinerja dengan pola yang lebih baik
25.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Sebagai dasar hukum dalam penjabaran lengkap dari rencana pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
26.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah	Sebagai dasar hukum dalam penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, yang menjadi acuan pemetaan penempatan formasi Aparatus Sipil Negara di Provinsi Banten
27.	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten	Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten	Sebagai dasar hukum dalam penetapan besaran dan acuan harga untuk Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, terutama dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
28.	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun	Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024	Sebagai dasar hukum dalam penetapan rencana aksi daerah program pelayanan kepemudaan
29.	Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus	Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaran Perpustakaan di Sekolah kewenangan Provinsi Banten terutama agar setiap perpustakaan meningkatkan standar kualitas perpustakannya
30.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan setiap Pejabat di Provinsi Banten untuk melaporkan harta kekayaannya

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
31.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.	Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, terutama untuk mengatur beberapa mekanisme dan prosedur yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021
32.	Standar Harga Satuan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan	Sebagai dasar hukum dalam ketentuan besaran Standar Harga Satuan di Provinsi Banten terutama dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
33.	Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah.	Sebagai dasar hukum untuk mengatur Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Banten, yang diharapkan setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dapat lebih profesional dan berintegritas dalam pelaksanaan pengadaan
34.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar hukum dan uraian penjabaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta rencana Pendapatan dan belanja daerah tahun 2024
35.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis	Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Sebagai dasar hukum dalam Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Provinsi Banten, terutama untuk mengatur adanya penyesuaian jumlah dan nomenklatur UPTD
36.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem	Sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Provinsi Banten,

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat lebih akuntabel dalam pelaporan kinerjanya

Sumber: Biro Hukum, Setda Provinsi Banten

3.5. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI BANTEN ATAS LKPJ GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan melalui pembahasan Pansus LKPJ TA 2022 telah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah/Biro sebagaimana dituangkan dalam Dokumen LKPJ Gubernur Banten TA 2022. Hasil pembahasan Pansus LKPJ diperoleh sejumlah rekomendasi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Banten.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Rekomendasi DPRD Provinsi Banten tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya. Adapun tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Banten
Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	PD
1	Capaian pelaksanaan program kegiatan organisasi Perangkat Daerah agar disajikan tidak hanya sebatas outputnya saja tapi disajikan juga hasil pengukuran sampai kepada manfaat dan pengaruhnya terhadap sasaran dari sebuah program secara berkelanjutan, sehingga mencerminkan berfungsinya	Terhadap pelaksanaan pengukuran kinerja Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara periodic dimulai dari capaian sub kegiatan, kegiatan sampai pada program. Dimana Kepala Perangkat daerah juga terlibat dan memberikan arahan berupa kebijakan dan strategi pencapaian Indikator Kinerja	Penguatan Pengukuran kinerja Pada Perangkat Daerah menjadi lebih akuntabel, valid dan dapat menjadi perbaikan perencanaan kinerja kedepan	Bappeda

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	PD
	barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan	Utamanya. Tahun ini ada penguatan Aplikasi dalam perencanaan dan pengukuran kinerja agar lebih maksimal berjalan		
2	Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,22% dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,69% menunjukan belum optimalnya penggalan kedua komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, mengingat potensinya masih sangat besar. Oleh karena itu agar dilakukan Kembali penataan terhadap beberapa aspek antarlain kelembagaan, system dan prosedur serta sumber daya manusia	Peningkatan retribusi daerah dilakukan berbagai upaya dan optimalisasi yaitu: Penyesuaian tarif retribusi, Peningkatan Retribusi Pemakaian Bahu Jalan, Optimalisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seperti Retribusi Alat Berat, Pengadaan peralatan klinik hewan, pengujian laboratorium, dan retribusi jalan kepelabuhan Digitalisasi Retribusi melalui Sistem Informasi Retribusi Daerah (SIREDA) Selain itu, terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum menunjukan kinerja yang memadai (Performance Based) akan dilakukan langkah-langkah Optimalisasi kinerja seperti dilakukan restrukturisasi, Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif serta melakukan rasionalisasi	Meningkatkan kinerja BUMD sehingga BUMD dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	BPKAD
3	Perlu penguatan relevansi jurusan SMK dengan dunia kerja salah satunya ketersediaan teaching factory yang menggambarkan dunia kerja sebenarnya bagi para siswa SMK optimalnya teaching factory karena perlu didukung kelembagaan BLUD pada SMK	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa terkait retribusi daerah dari kantin sudah ada pada perda tersebut. Sedangkan untuk pembentukan BLUD SMK yang menghasilkan	Meningkatkan pengelolaan Pendidikan melalui Pembentukan BLUD	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	PD
	sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. provinsi banten satusatunya provinsi di pulau jawa yang tidak memilki BLUD level SMK. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perekonomian dan Biro Adpem, dan BPKAD untuk melakukan identifikasi dan pengembangan SMK yang potensial untuk ditransformasikan menjadi BLUD	pendapatan daerah dari jasa lainnya akan diatur tersendiri karena masing-masing SMK mempunyai jasa usaha yang berbeda, tergantung pada spesifikasi jurusan smk tersebut. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kajian BLUD Pendidikan Pemerintah Provinsi Banten, dari hasil kajian ini diperoleh potensi sekolah untuk bisa dijadikan BLUD ada 8 (delapan) sekolah, yaitu: SMKN 1 Pandeglang SMKN 2 Pandeglang SMKN 1 Cilegon SMKN 3 Cilegon SMKN 2 Tangerang SMKN 3 Tangerang SMKN 1 Serang SMKN 3 Serang Selanjutnya dari kajian ini rekomendasinya adalah kepada para stakeholder khususnya perangkat daerah di provinsi banten agar melaksanakan rencana aksi yang sudah dipetakan dalam kajian, khususnya kepada Biro Perekonomian untuk menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis: Peraturan Kepala Daerah tentang BLUD		
4	dinas pupragar segera menyelesaikan ruas jalan yang belum tuntas pembebasan lahannya terutama jalan syekh nawawi albantani, sempu-dukuh kawung dan palima-pasar teneng	1. Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembebasan lahan ruas jalan Syekh Nawawi Al-bantani (Pakupatan Palima) sebanyak 13 bidang dengan luas lahan kurang lebih 2.413	Penyelesaian kinerja Infrastruktur Daerah	Dinas PUPR

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	PD
		m2 . dan dapat kami laporkan masih terdapat 2 bidang lahan yang belum terbayarkan karena kendala pemilik lahan yang kurang kooperatif. 2. Pembebasan lahan Ruas Jalan Sempu - Dukuh Kawung pada Tahun 2023 sebanyak 76 bidang dengan luas lahan kurang lebih 7.857 m2, 3. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penanganan rehabilitasi Ruas Jalan Palima-Pasang Teneng (Cinangka) kurang lebih sepanjang 500 m, sedangkan untuk pengadaan lahan ruas tersebut masih persiapan pengadaan lahan (penetapan lokasi)		
5	Banten telah memiliki stadion bertaraf internasional yang cukup membanggakan, Kepada Dinas PUPR hendaknya menyiapkan Langkah-langkah konkrit agar aksesibilitasnya menuju stadion bisa memadai, dan venue-venue yang direncanakan agar segera bisa dibangun sehingga pemerintah Provinsi Banten bisa memiliki Kawasan olahraga yang bisa dinikmati oleh Masyarakat, Biro organisasi dan Reformasi Birokrasi berserta OPD terkait agar mendorong pembentukan kelembagaan yang jelas untuk mengelola stadion tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga Bersama PSSI Banten, agar bisa memanfaatkan stadion ntuk memutar kompetisi sepakbola sehingga stadion yang kita miliki	Pada tahun 2023 Dinas PUPR telah melakukan beberapa kegiatan terkait Banten Internasional Stadium (BIS), diantaranya: 1. Pemeliharaan rutin pada bangunan Banten Internasional Stadium (BIS) meliputi fasilitas stadion, Lintasan Atletik Stadion maupun pemeliharaan rumput. 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur BIS 3. Penyusunan Final Business Cash (FBC) untuk persiapan KPBU (Market Sounding dengan pihak ketiga yang berminat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten)	Pemanfaatan bangunan strategis provinsi	DPUPR

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	PD
	bisa segera dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang prestasi olahraga sepakbola di Provinsi Banten di kancah nasional, mengingat sepakbola merupakan olahraga yang banyak digemari oleh 520omest seluruh lapisan Masyarakat			
6	Dalam rangka mengembangkan potensi wisata pada Kawasan Gunung Karang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Serang dan Pandeglang, maka wacana pelebaran ruas jalan Serang-Pandeglang perlu utuk dikaji dan direalisasikan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut	Jalan Serang – Pandeglang merupakan jalan kewenangan pemerintah pusat, atas dasar hal tersebut pada tahun 2023 kami belum melakukan kajian terkait pelebaran ruas jalan Serang-Pandeglang untuk mendukung pengembangan potensi wisata pada Kawasan Gunung Karang	Penguatan aksesibilitas infrastruktur dalam rangka mendorong ekonomi dan pariwisata	DPUPR
7	Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan ekstrem dan stunting pemerintah daerah hendaknya melakukan kolaborasi dengan berbagai Lembaga lintas sektor. Karena masalah pengangguran, kemiskinan dan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah tertentu saja.	Dalam Hal Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Stunting, dan Pengangguran, Pemerintah Provinsi Banten, sedang Berkolaborasi dan Bekerjasama dengan beberapa instansi Vertikal seperti BAZNAS, BPJS Ketenagakerjaan dan sudah berkoordinasi dan sedang menentukan Langkah-langkah Penangann yang berdampak kepada Masyarakat terutama Penerima Manfaat Program baik kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Serta Lembaga bantuan CSR yang membantu kepada	Penanganan kemiskinan	Bappeda

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	PD
		Masyarakat Miskin, sesuai dengan Target kerja dari masing – masing perusahaan yang telah memiliki CSR.		
8	Diketahui bahwa pada Tahun 2022 persentase lulusan SMK yang terserap di pasar kerja dengan capaian 58,89% masuk dalam kategori rendah. Persentase Guru SMK dan SMA yang bersertifikat dengan capaian 50% kategori sangat rendah dan 63,60 kategori rendah. Perangkat Daerah terkait agar melakukan Upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan capaian indikator kinerja program dimaksud.	Sertifikat pendidik guru merupakan program pemerintah pusat (Kemendikbudristek) yang diberikan kepada daerah dengan menggunakan kuota nasional pertahun dengan jumlah yang berbeda – beda sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah pusat. Adapun jumlah kuota yang diberikan ke daerah tiap tahun akan mengikuti perubahan sejumlah kuota yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam penentuan target dan realisasi mengalami kesulitan karena tidak ada kepastian jumlah data, serta untuk mendapatkan sertifikat pendidik guru harus mengikuti program PPG.	Penguatan sertifikasi tenaga pendidik	Dindikbud
9	Persentase penyelesaian jalan baru dengan capaian 8,96%, cakupan penyediaan prasarana persampahan regional dengan capaian 0% dan cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan capaian 20% , ketiga indikator kinerja tersebut masuk dalam kategori sangat rendah. Kepada Perangkat daerah terkait hendaknya melaksanakan program secara terarah dan terukur.	Dinas PUPR telah menyelesaikan ruas jalan baru Banten Lama-Tonjong sepanjang 773 m pada tahun 2023 sehingga persentase capaian penyelesaian jalan baru adalah 15,15%. Sampai dengan Tahun 2023 belum terbangun TPST Regional yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu Review Dokumen Rencana Induk Persampahan (RISPAH)	Pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka percepatan ekonomi dan kelestarian lingkungan	DPUPR

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	PD
		Provinsi Banten dan Penyusunan DPPT TPST yang berlokasi di Kecamatan Maja. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota belum terlaksana karena Dokumen rencana induk belum tersusun dan infrastruktur SPALD Regional belum terbangun.		

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, diolah

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah tingkat Atasnya

Selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

4.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pusat Pemberi Tugas Pembantuan di Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) Kementerian sebagai berikut.

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia.
2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
4. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
5. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

4.1.3. Satuan Kerja yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 59.401.537.000 dengan realisasi Rp. 58.088.432.077 atau setara 97,79 persen yang dilaksanakan oleh lima Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten,
2. Dinas Pertanian Provinsi Banten,
3. Dinas Pariwisata Provinsi Banten
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Perangkat Daerah Pemerintah Daerah ada Provinsi Banten tersebut melaksanakan Adapun capaian Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Banten diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023

NO	OPD	KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	DINAS PUPR PROVINSI BANTEN	31.385.769.000	31.159.500.512	99,28	100	100	100
2	DINAS PERTANIAN	25.966.223.000	25.554.855.815	98,42	100	100	100
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	250.045.000	249.400.000	99,74	100	100	100
4	DINAS PARIWISATA	1.270.000.000	1.077.771.750	82,09	100	100	100
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	529.500.000	12.625.000	2,38	0	0	0
	JUMLAH	59.401.537.000	58.088.432.077	97,79			

**4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baku, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Beberapa dana yang dialokasikan oleh kementerian menurun dari tahun sebelumnya, sehingga banyak target atau sasaran yang belum tercapai. Pemerintah pusat diharapkan dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal serta dana yang diberikan ke daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan yang ada dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

Tabel.4.2.
Permasalahan dan Tindak lanjut Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Permasalahan	Tindak Lanjut	Perangkat Daerah
1	Kegiatan tugas pembantuan di DKP masih terkendala kondisi cuaca perairan di lokasi penenggelaman (sangat beresiko tinggi) dan Pembukaan Blokir di Bulan	Akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian KKP Pada tahun berikutnya	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Permasalahan	Tindak Lanjut	Perangkat Daerah
	Agustus dan Permasalahan Akun yang lama.		
2	Aturan Juknis terbit pada Bulan Juli. Pada awal tahun belum ada bendahara, dan bendahara baru yang bersertifikat pada bulan Agustus, secara umum kegiatan tinggal menunggu pencairan dana.	Penyusunan SK Satker dengan memasukan nama pegawai yang akan menjadi bendahara	Dinas Pariwisata
3	Vaksinasi Penyakit Mulut Kuku, kesulitannya adalah tidak semua peternak mau ternaknya di Vaksin, kendala lainya karena peternak mengelola semi intensif dimana ternak-ternak tersebut di anggon di lapangan bukan di kandang, sehingga kesulitan dalam melakukan vaksin ternak	Terus dilakukan Upaya sosialisasi massif dari pihak penyuluh peternakan	Dinas Pertanian
4	Kegiatan perlindungan luasan lahan pertanian terkendala pada koordinasi dengan Badan pertanahan nasional terkait peta luasan pertanian yang datanya belum sinkron	Dilakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional	Dinas Pertanian
5	Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil holtikultura terkendala pada proses kontrak pengadaan sarana pengolahan	Percepatan dalam proses kontrak	Dinas pertanian
6	Pada kegitan operasi dan pemeliharaan jaringan air, terdapat bangunan liar yang ada di sepanjang DI Cidurian terutama yang ada didekat PT. Mayora, sudah di koordinasikan dengan perangkat desa. Ada juga terkendala anggaran yang kurang dalam penyelesaian pekerjaan secara komprehensif terutama pada Daerah irigasi yang perlu penanganan lebih optimal untuk mencegah banjir. Daerah irigasi Cibaliung ada bangunan yang terputus, ada beberapa	Dilakukan kordinasi dengan perangkat desa untuk pelaksanaan pembersihan di Cidurian.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Permasalahan	Tindak Lanjut	Perangkat Daerah
	pekerjaan sudah dikerjakan namun belum di bayar. Sinergitas dengan balai C3 karena pekerjaan ini semestinya dimulai dengan tahap rehabilitasi baru diikuti dengan OP		
7	Pada kegiatan daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi difasilitasi pemberangkatan warga sebanyak 7 KK 30 jiwa ke kabupaten Simeulue Aceh 2 KK 11 jiwa dari pandeglang dan kabupetn toli-toli Sulawesi Tengah 5 KK 29 jiwa, dari wilayah Kab.Serang, Kota Serang dan Kab.Tangerang. Untuk kegiatan ini terkendala anggaran yang kurang dikarenakan kementerian membatasi jumlah Keluarga yang akan diberangkatkan ke wilayah transmigrasi, sedangkan ada anak dari Kepala Keluarga tersebut yang tidak di cover.	Dicover dari dana APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023

KEMENTERIAN /LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN (OUTPUT)				KINERJA KEUANGAN			KINERJA OUTPUT		
							ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA- 026.13.3.299022/2023 tanggal 30 November 2022	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN				250.045.000	249.400.000	99,74				
			Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	184.445.000	184.445.000	100,00	100	100	100	
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	65.600.000	64.955.000	99,02	100	100	100	
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN				529.500.000	12.625.000	2,38				
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.700.000	7.650.000	43,22	40	40		
			Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	511.800.000	4.975.000	0,97	1	1		
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA- 040.01.4.640022/2023 tanggal 30 November 2022	DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN				1.270.000.000	1.112.050.750	87,56				
			Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	110.000.000	93.003.000	84,55	100	100	100	

KEMENTERIAN /LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN (OUTPUT)			KINERJA KEUANGAN			KINERJA OUTPUT		
						ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN
			Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	195.000.000	160.659.250	82,39	100	100	100
				Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Konferensi dan Event	500.000.000	474.891.000	94,98	100	100	100
				Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	82.500.000	53.859.500	65,28	100	100	100
				Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	82.500.000	60.877.500	73,79	100	100	100
				Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Koordinasi	300.000.000	268.760.500	89,59	100	100	100
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	SK MENTERI NOMOR : 90/KPTS/M/2023 SURAT GUBERNUR BANTEN NOMOR 903/978-DPUPR/2023 TANGGAL 27 JANUARI 2023 TENTANG KESEDIAAN DAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN				31.385.769.000	31.159.500.512	99,28			
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Layanan Dukungan Manajemen Internal	878.281.000	845.583.612	96,28	100	100	100
				Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Layanan Dukungan Manajemen Internal	799.492.000	790.862.620	98,92	100	100	100
			Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Dukungan Teknis	35.000.000	33.323.800	95,21	100	100	100
					OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	24.128.366.000	23.976.800.560	99,37	100	100	100
					OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	254.680.000	254.598.720	99,97	100	100	100

KEMENTERIAN /LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN (OUTPUT)			KINERJA KEUANGAN			KINERJA OUTPUT		
						ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN
			Program Ketahanan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	5.289.950.000	5.258.331.200	99,40	100	100	100
KEMENTERIAN PERTANIAN	Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.20-Huk/2023 tanggal 24 Januari 2023, Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Provinsi Banten Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN				25.966.223.000	25.554.855.815	98,42			
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	336.037.000	336.013.000	99,99	100	100	100
				Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	61.960.000	60.150.000	97,08	100	100	100
					Layanan Manajemen Kinerja Internal	388.838.000	373.072.340	95,95	100	100	100
				Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Manajemen Kinerja Internal	534.680.000	534.680.000	100,00	100	100	100
				Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	849.614.000	848.780.100	99,90	100	100	100
				Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Perencanaan dan Penggangan	120.000.000	119.210.000	99,34	100	100	100

KEMENTERIAN /LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN (OUTPUT)			KINERJA KEUANGAN			KINERJA OUTPUT		
						ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	126.157.000	126.157.000	100,00	100	100	100
				Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Koordinasi	235.802.000	235.802.000	100,00	100	100	100
					Pelayanan Publik kepada masyarakat	319.388.000	319.388.000	100,00	100	100	100
				Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.518.450.000	3.516.450.000	99,94	100	100	100
				Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Koordinasi	250.000.000	247.718.800	99,09	100	100	100
					Sarana Pengembangan Kawasan	10.500.000	10.500.000	100,00	100	100	100
				Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan	Koordinasi	199.000.000	197.490.000	99,24	100	100	100
					Sarana Pengembangan Kawasan	2.354.525.000	2.246.305.000	95,40	100	100	100
				Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Koordinasi	150.000.000	150.000.000	100,00	100	100	100
				Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Koordinasi	210.000.000	209.940.000	99,97	100	100	100
					Sarana Pengembangan Kawasan	4.860.875.000	4.832.250.000	99,41	100	100	100
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Publik Lainnya	3.029.475.000	3.022.343.000	99,76	100	100	100
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	125.000.000	120.735.000	96,59	100	100	100

KEMENTERIAN /LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN (OUTPUT)			KINERJA KEUANGAN			KINERJA OUTPUT		
						ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN
					Penyidikan dan Pengujian Produk	236.000.000	234.034.500	99,17	100	100	100
					Sertifikasi Lembaga	384.750.000	382.510.000	99,42	100	100	100
				Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Bantuan Peralatan / Sarana	400.000.000	396.157.000	99,04	100	100	100
					Penyidikan dan Pengujian Produk	760.000.000	622.289.050	81,88	100	100	100
				Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Sarana Pengembangan Kawasan	800.000.000	791.848.600	98,98	100	100	100
				Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Hewan	514.733.000	499.214.610	96,99	100	100	100
					Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	807.080.000	803.080.000	99,50	100	100	100
				Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Koordinasi	50.000.000	50.000.000	100,00	100	100	100
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi	100.700.000	100.567.000	99,87	100	100	100
					Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	108.000.000	108.000.000	100,00	100	100	100
					Standarisasi Produk	286.100.000	270.987.600	94,72	100	100	100
				Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Data dan Informasi Publik	179.000.000	178.105.000	99,50	100	100	100
					Koordinasi	374.700.000	373.139.100	99,58	100	100	100
					Sarana Bidang Pertanian,	863.245.000	837.228.370	96,99	100	100	100

KEMENTERIAN /LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN (OUTPUT)			KINERJA KEUANGAN			KINERJA OUTPUT		
						ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	CAPAIAN
					Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
					Sertifikasi Produk	160.500.000	158.262.750	98,61	100	100	100
				Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	205.000.000	204.500.000	99,76	100	100	100
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	720.000.000	716.550.000	99,52	100	100	100
					Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	665.000.000	655.886.595	98,63	100	100	100
				Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	85.950.000	85.900.000	99,94	100	100	100
					Sarana Pengembangan Kawasan	125.755.000	124.721.400	99,18	100	100	100
				Penguatan Perlindungan Perkebunan	Sertifikasi Produk	459.409.000	454.890.000	99,02	100	100	100

Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 tentunya terdapat berbagai kendala dan permasalahan. Adapun hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dilaporkan sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	HAMBATAN/ PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi	Adanya Keterlambatan SK Pengelola APBN yang harus ditandatangani oleh Kepala Daerah dan secara bersamaan di Provinsi Banten masa jabatan Gubernur telah habis Adanya Pergantian Ketua Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Banten yang harus diusulkan kembali ke LA-LPK Kemnaker R.I Proses Adaptasi terhadap sistem SAKTI yang merupakan hal baru sehingga proses pencairan dana sedikit agak tersendat sementara seluruh kegiatan sudah terjadwal dari Kemnaker R.I	Perlu adanya percepatan proses administrasi agar program / kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta evaluasi terhadap pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pelaksanaan kegiatan sumber dana APBD serta menyebarkan program kegiatan yang diperlukan oleh daerah Perlu adanya percepatan proses administrasi agar program / kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta evaluasi terhadap pelaksanaannya Perlu dilaksanakannya sosialisasi / pelatihan terkait penggunaan aplikais / sistem baru seperti SAKTI sehingga para operator / pelaksana dapat segera beradaptasi dan menggunakannya
Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Terkendala kondisi cuaca perairan di lokasi penenggelaman (sangat beresiko tinggi) 2. Pembukaan Blokir di Bulan Agustus dan Permasalahan Akun yang lama.	tidak dilaksanakan realisasi kinerja di tahun 2023

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Secara umum pelaksanaan urusan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal, yang tentunya hal ini merupakan pencapaian bersama sebagai bentuk sinergi antara PJ.Gubernur dan DPRD selaku unsur Penyelenggara Pemerintahan. Indikasi atas pencapaian hal tersebut, antara lain didukung dengan kondisi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja indikator makro daerah, yang antara lain dilihat dari capaian IPM Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar 75,77 yang melebihi dari target yang ditetapkan dan naik 0,52 poin dari realisasi tahun sebelumnya. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,52 persen melebihi dari target yang ditetapkan dan menunjukkan kenaikan 0,57 poin dibanding realisasi sebelumnya, Persentase Penduduk Miskin capaian sebesar 6,17 persen lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya naik menjadi 0.14 poin dan mendekati target yang ditetapkan, capaian gini ratio sebesar 0,368 dimana capaian ini menunjukkan kenaikan positif 0,001 poin dibanding realisasi sebelumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,81 berhasil melampaui dari target namun turun -0,2 poin dari realisasi tahun sebelumnya.
2. Pada APBD Provinsi Banten TA 2023, bahwa dari target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp 12.062.539.880.255,00 terealisasi sebesar Rp11.576.544.862.694,00 atau sebesar 95,97 persen. Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2023 dialokasikan sebesar Rp12.381.442.698.251 dengan realisasi sebesar Rp 11.815.058.168.746 atau Sebesar 95,43 persen. Selanjutnya Pembiayaan Daerah yang pada Perubahan APBD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp 318.902.817 terealisasi sebesar Rp 324.461.765.949 atau 101,74 persen.
3. Capaian Indikator Kinerja Daerah, secara umum telah menunjukkan capaian yang baik dimana terdapat 33 indikator Kinerja Utama Daerah dengan capaian 31 indikator memiliki kriteria kinerja sangat tinggi ($\geq 91-100\%$), 1 indikator tinggi (76-90%), 1 indikator sangat rendah ($\leq 50\%$), dengan kendala dan permasalahan yang sangat dinamis dan beragam. Untuk kinerja pada Perangkat Daerah berhasil merealisasikan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Provinsi

Banten Tahun 2023. Terhadap kondisi kinerja yang belum tercapai tentunya bagian yang harus diupayakan untuk dapat dipenuhi pada tahun 2024 dan/atau periode selanjutnya.

4. Berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.401.537.000 dengan realisasi Rp. 58.088.432.077 atau setara 97,79 persen yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Banten baik dari Pemerintah Pusat/Kementerian/Badan/Lembaga Lainnya sebagai indikasi terobosan atau inovasi daerah yang senantiasa diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.
6. Pemerintah Provinsi Banten akan terus melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang berdampak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya dalam hal:
 - a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan;
 - b. Penanganan Stunting secara komprehensif dengan melibatkan peran stake holder pembangunan sehingga angka prevalensi stunting bisa turun seperti halnya tahun mencapai 14 persen di tahun 2024;
 - c. Pengendalian Inflasi melalui 6 (enam) langkah konkrit meliputi: Operasi pasar murah, Sidak Pasar dan Distributor, Kerjasama antar daerah demi kelancaran pasokan, gerakan menanam, dan merealisasikan belanja tak terduga;
 - d. Penguatan Program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia sesuai dengan siklus percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - e. Penguatan Investasi melalui kemudahan perizinan dan dukungan penyiapan kawasan industri baru dan pengembangan kawasan industri yang ada sehingga pembangunan ekonomi bisa lebih merata dan cepat;
 - f. Digitalisasi pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

Selanjutnya Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD atas kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan untuk pencapaian target pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, untuk dibahas dan diberikan rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** .